LAPORAN KINERJA





2023

BIRO ORGANISASI, KEPEGAWAIAN, DAN HUKUM

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Daftar Isi

Daftar I	si	2
Daftar (Sambar	3
Daftar 1	abel	4
lkhtisar	Eksekutif	6
Bab 1 P	endahuluan	7
1.1	Latar Belakang	7
1.2	Gambaran Umum	7
1.3	Struktur Organisasi	8
1.4	Isu Strategis Organisasi	8
1.5	Sistematika dan Ruang Lingkup Pelaporan	8
Bab 2 P	erencanaan Kinerja	10
2.1	Rencana Strategis	10
2.2	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	11
2.3	Perjanjian Kinerja	17
2.4	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	18
2.5	Rencana Penarikan Dana	27
2.6	Metode Pengukuran	31
Bab 3 A	kuntabilitas Kinerja	33
3.1	Capaian Kinerja Renstra	33
3.2	Capaian Kinerja Organisasi	33
3.3	Analisis Akuntabilitas Kinerja	109
3.4	Capaian/Realisasi Anggaran	116
3.5	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Internal	121
3.6	Prestasi	121
Bab 4 P	enutup	123
4.1	Kesimpulan	123
4.2	Saran	123
Lampira	an	124

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat Utama	8
Gambar 2 Penilaian Indeks Sistem Merit 2023	121
Gambar 3 Penghargaan JDIHN Awards 2023	

Daftar Tabel

Tabel 1 Rencana Kinerja Tahunan Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	Tahun 202311
Tabel 2 Rencana Kinerja Kegiatan Layanan Hukum	14
Tabel 3 Rencana Kinerja Kegiatan Layanan Umum	15
Tabel 4 Rencana Kinerja Kegiatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan	17
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Revisi-1 Karo OKH	17
Tabel 6 Rencana Aksi Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum 2023	18
Tabel 7 Rencana Aksi Kinerja Layanan Hukum	22
Tabel 8 Rencana Aksi Layanan Umum	25
Tabel 9 Rencana Aksi Layanan Pendidikan dan Pelatihan	26
Tabel 10 RPD Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	28
Tabel 11 RPD Layanan Umum	29
Tabel 12 RPD Layanan Pendidikan dan Pelatihan	30
Tabel 13 RPD Layanan Reformasi Kinerja	30
Tabel 14 IKU Biro OKH Tahun 2023	31
Tabel 15 Capaian Kinerja Layanan Umum	72
Tabel 16 Capaian Kinerja Layanan Pendidikan dan Pelatihan	99
Tabel 17 Capaian Kinerja Biro OKH Tahun 2023	109
Tabel 18 Capaian Kinerja Layanan Umum	113
Tabel 19 Realisasi Anggaran Layanan Hukum	116

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Biro OKH Tahun 2023	124
Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Biro OKH Tahun 2023	125
Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Revisi-1 Biro OKH Tahun 2023	126
Lampiran 4 Perjanjian Kinerja Revisi-1 Biro OKH Tahun 2023	
Lampiran 5 Renaksi Biro OKH Tahun 2023	132
Lampiran 6 Renaksi Biro OKH Revisi-1 Tahun 2023	133
Lampiran 7 Renaksi Biro OKH Revisi-2 Tahun 2023	134
Lampiran 8 Realisasi Keuangan Biro OKH Tahun 2023	135

Ikhtisar Eksekutif

Sebagai bagian dari struktur organisasi ANRI berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, Biro Organisasi, Kepegawaian, Hukum harus memberikan pelaporan dan mengenai akuntabilitas dan kinerja yang akan menjadi bagian dari laporan akuntabilitas dan kinerja dari Arsip Nasional Republik



Indonesia. Dokumen ini merupakan Laporan Kinerja Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum pada Tahun 2023.

Laporan Kinerja Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum Tahun 2023 selain memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dan juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kerangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih guna mencapai visi ANRI melalui 2 (dua) misi Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum yakni : (1) mewujudkan pembinaan dan pelayanan yang profesional di bidang administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, hukum ANRI, dan (2) mewujudkan koordinasi yang menyeluruh dalam perumusan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan tugas ANRI.

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum ini disusun untuk memberikan gambaran ringkas mengenai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan merupakan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Arah kebijakan ANRI disusun untuk memberikan dampak nyata terhadap upaya perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Dampak nyata yang akan diberikan oleh ANRI tersebut tentunya tidak luput dari salah satu sasaran strategisnya yaitu "Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI".

Di samping itu, penyusunan laporan kinerja ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan kegiatan secara transparan dan akuntabel. Keterbukaan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan yang dituangkan secara lengkap, dan tepat waktu dan disampaikan secara berkala, diharapkan dapat memberikan nilai positif bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.

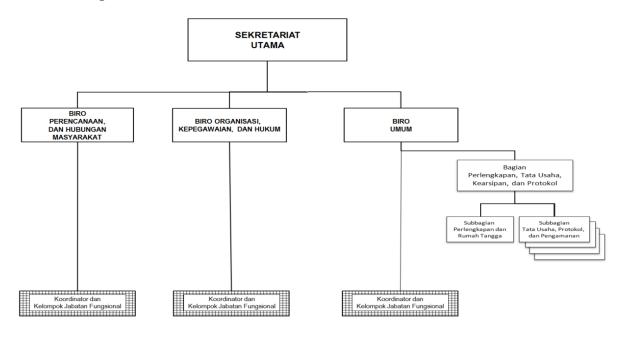
1.2 Gambaran Umum

Laporan Kinerja tahun 2023 ini diarahkan pada implementasi tugas dan fungsi Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum. Adapun tugas Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum yaitu melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengelolaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian, serta koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, dan internalisasi reformasi birokrasi;
- b. pengelolaan urusan kepegawaian; dan
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta bantuan hukum.

1.3 Struktur Organisasi



Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat Utama

1.4 Isu Strategis Organisasi

Arah kebijakan dari Sasaran Strategis "Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI" adalah Penguatan tata kelola ANRI yang efektif dan efisien melalui strategi:

- a. Pelayanan Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum; dan
- b. Pelayanan Umum.

Penciptaan tata kelola yang efektif dan efisien diarahkan untuk meningkatkan kemampuan ANRI baik kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SDM dalam menyukseskan tahap transformasi digital penyelenggaraan kearsipan nasional.

1.5 Sistematika dan Ruang Lingkup Pelaporan

Penyajian Laporan Kinerja terdiri dari empat (4) bab dan beberapa lampiran serta Ikhtisar Eksekutif.

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Gambaran Umum
- 1.3 Struktur Organisasi

- 1.4 Isu Strategis Organisasi
- 1.5 Sistematika dan Ruang Lingkup Pelaporan

Bab 2 Perencanaan Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- 2.3 Perjanjian Kinerja
- 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
- 2.5 Rencana Penarikan Dana
- 2.6 Metode Pengukuran

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Kinerja Renstra
- 3.2 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.3 Analisis Akuntabilitas Kinerja
- 3.4 Capaian/Realisasi Anggaran
- 3.5 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Internal
- 3.6 Prestasi

Bab 4 Penutup

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran

Bab 2 Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis dilaksanakan melalui beberapa program, salah satunya Program Dukungan Manajemen dengan sasaran program "Terwujudnya tata kelola yang baik di ANRI" yang dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pelayanan organisasi, kepegawaian, dan hukum dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya layanan organisasi, kepegawaian, dan hukum; dan
- b. Pelayanan umum dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya layanan umum.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Tabel 1 Rencana Kinerja Tahunan Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum Tahun 2023

PROGRAM	KEGIATAN	SASARA KEGIATA INDIKATO TARGET/ SA	N/ OR/	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)/ INDIKATOR/TARGET/ SATUAN		RINCIAN OUTPUT (R INDIKATOR/TARGE SATUAN		ALOKASI ANGGARAN (Rp.000)	кет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dukungan Manajemen	Pelayanan Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	Meningkatnya Layanan Organisasi, Kepegawaian dan Hukum Indikator Kinerja Kegiatan: - Indeks Reformasi Birokrasi - Indeks Sistem Merit	A (80,05) A	1 Layanan Dukungan Manajemen Internal Indikator KRO: Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal	3 Layanan	1 Layanan Hukum Indikator RO: Jumlah Layanan Hukum	1 Layanan	883.706	

	2 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Indikator RO: Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 435. Layanan	860
	3 Layanan Kesehatan Indikator RO: Jumlah layanan Kesehatan di lingkungan ANRI	1 407. Layanan	653

Pe da In Ji A d	Layanan 687 Pendidikan Orang lan Pelatihan Indikator RO: Jumlah SDM ANRI yang ditingkatkan kompetensinya	1.016.143
Manajemen Kinerja Internal Indikator KRO: Jumlah Layanan Manajemen	Layanan Layanan Reformasi Kinerja Indikator RO: Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	336.775
TOTAL	•	4.042.097

A. Layanan Hukum

Output Layanan Hukum Tahun 2023 adalah 1 Layanan, meliputi 3 (tiga) komponen, yaitu:

051 Pembentukan Produk Hukum Kearsipan

- A. Sosialisasi Peraturan Bidang Kearsipan
- B. Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Kearsipan (Program Legislasi ANRI)
- C. Penelaahan Peraturan Kearsipan
- D. Harmonisasi Rancangan
- E. Penyempurnaan Peraturan
- F. Finalisasi Peraturan
- G. Penyusunan Naskah Akademik RUU Kearsipan

052 Pengelolaan Pelayanan Hukum

- A. Pendokumentasian dan Penyediaan Jaringan Informasi Hukum
- B. Finalisasi Penyusunan Keputusan Kepala ANRI
- C. Penyusunan Penelaahan (bantuan hukum dan Keputusan Kepala ANRI)
- D. Koordinasi dalam rangka pengelolaan JDIH
- E. Penyuluhan hukum

053 Bantuan Hukum

Tabel 2 Rencana Kinerja Kegiatan Layanan Hukum

Rincian Kegiatan	Kode	Besaran Biaya
Layanan Hukum	3614.EBA.957	Rp883.706.000
1. Pembentukan Produk Hukum Kearsipan	051A	Rp454.161.000
2. Pengelolaan Pelayanan Hukum	052A	Rp312.801.000
3. Bantuan Hukum	053A	Rp116.744.000

B. Layanan Umum

Rencana Kinerja Tahunan Layanan Umum pada Tahun Anggaran 2023 dengan output (RO) yaitu 1 layanan selama 12 bulan yang terdiri dari 1 (satu) komponen yaitu :

051 Pelayanan Kesehatan di Lingkungan ANRI

Pelayanan Kesehatan di Lingkungan ANRI adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan bagi seluruh pegawai ANRI untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan kesehatan dibagi dalam 3 (tiga) sub komponen yaitu:

- A. Layanan Poliklinik/Obat-obatan
- B. Check-up Kesehatan
- C. Seminar Kesehatan

Tabel 3 Rencana Kinerja Kegiatan Layanan Umum

No. Kode Akun	Jenis Kegiatan	Target	Anggaran
3614.	Layanan Umum	1 Layanan	407.653.000
EBA.962			
051	Pelayanan Kesehatan di Lingkungan ANRI		
А	Layanan Poliklinik/Obat-obatan	12 Bulan	306.314.000
В	Check-up Kesehatan	4 Kegiatan	76.139.000
С	Seminar Kesehatan	2 Kegiatan	25.200.000

C. Layanan Manajemen SDM

a. Perencanaan dan Mutasi Pegawai [051]

Kelompok Substansi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan mutasi pegawai. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, diperlukan proses pelaksanaan komponen layanan perencanaan dan mutasi pegawai. Adapun subkomponen yang menjadi bagian dari pelaksanaan layanan ini antara lain:

- a) Pengadaan Pegawai;
- b) Uji Kompetensi Pegawai;
- c) Pelantikan Pegawai;
- d) Mutasi Pegawai;
- e) Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah.
- b. Pelayanan Administrasi dan Kedisiplinan Pegawai [052]

Kelompok Substansi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data pegawai serta penerapan disiplin pegawai. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi tersebut,

diperlukan proses pelaksanaan komponen layanan administrasi dan kedisiplinan pegawai. Adapun subkomponen yang menjadi bagian dari pelaksanaan layanan ini antara lain:

- a) Pengelolaan Administrasi Data Pegawai;
- b) Pembinaan, Koordinasi, dan Monitoring Administrasi Pegawai pada UPT ANRI:
- c) Pengembangan Sistem Administrasi Negara;
- d) Kedisiplinan Pegawai;
- e) Administrasi Pengurusan Satyalancana Karya Satya.
- c. Pembinaan dan Penilaian Kinerja Pegawai [053]

Kelompok Substansi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan penilaian prestasi kerja dan pembinaan jabatan fungsional. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, diperlukan proses pelaksanaan komponen layanan pembinaan dan penilaian kinerja pegawai. Adapun subkomponen yang menjadi bagian dari pelaksaaan layanan ini antara lain:

- a. Tahap Persiapan Layanan pembinaan dan penilaian jabatan fungsional;
- b. Layanan Penyusunan SKP;
- c. Layanan Penilaian Jabatan Fungsional;
- d. Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional.

D. Layanan Pendidikan dan Pelatihan

Output Layanan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023 dengan target 687 (enam ratus delapan puluh tujuh) orang yang ditingkatkan kompetensinya selama 12 bulan meliputi 3 (tiga) komponen, yaitu:

051. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Pendidikan dan Pelatihan Teknis adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS.

052. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenjang jabatan fungsional.

053. Pelatihan Kepemimpinan

Pelatihan Kepemimpinan adalah diklat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu.

Tabel 4 Rencana Kinerja Kegiatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan

No. Kode Akun	lonic Kogiatan	Target	Presentase (%) 100
	Jenis Kegiatan	(orang)	(%)
3614. EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	687	100
051	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	658	100
052	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional	26	100
053	Pelatihan Kepemimpinan	3	100

2.3 Perjanjian Kinerja

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Revisi-1 Karo OKH

No	Sasaran Kegiatan	Ind	ikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya Layanan	Indeks Reformasi Birokrasi		A (80,05)
	Organisasi,	2.	Indeks Sistem Merit	A (325)
	Kepegawaian, dan	3.	Indeks BerAkhlak	65
	Hukum	4. Indeks Profesionalitas ASN		Tinggi (81)
		5.	Indeks Reformasi Hukum	85

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Tabel 6 Rencana Aksi Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum 2023

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI			
REGINITIAL ST		KINERJA KEGIATAN		TWI	TWII	TW II TW III TW IV Membuat rencana ksi RB general dan B Tematik Melakukan pisialisasi dan kternalisasi RB epada seluruh TW III TW IV 1. Membuat roadmap RB evaluasi rencana aksi RB	
Pelayanan kegiatan organisasi, kepegawaian, dan hukum	Meningkatnya layanan organisasi, kepegawaian dan hukum	Indeks Reformasi Birokrasi	80,05 (A)	1. Menyusun tim RB	Membuat rencana aksi RB general dan RB Tematik Melakukan sosialisasi dan internalisasi RB kepada seluruh pegawai	roadmap RB	evaluasi rencana aksi

Indeks Sist	em Merit 325 (A)	1. Penghitungan kebutuhan ASN Tahun 2023 dan 2024 2. Melakukan Seleksi Kompetensi dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Pengadaan PPPK Tahun 2022 3. Koordinasi dengan unit kerja Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi terkait SKJ JF Arsiparis 4. Studi Banding Penilaian Kompetensi Pegawai ke BPOM 5. Pelaksanaan Assesment Center JF Muda dan JF Madya 6. Pemeriksaan Kesehatan (MCU) bagi 62 pegawai 7. Edukasi mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Program Return To Work	1. Verfikasi/validasi usul kebutuhan ASN ANRI Tahun 2024 2. Usul Penetapan Kebutuhan ASN ANRI Tahun 2023 3. Melakukan Pengumuman Kelulusan Calon PPPK Tahun 2022 4. Melakukan Pengisian dan Usul Penetapan NI PPPK Tahun 2022 3. Pelatihan Feedback/Coaching Hasil Assesment 4. Pemeriksaan Narkoba bagi 25 orang 5. Sosialisasi mengenai Program dan Layanan Bpjs Kesehatan, Taspen Dan Peningkatan Kesejahteraan ASN Melalui Program Taspen Life 6. Sosialisasi dan Penerapan Aktifitas Peregangan diwaktu Kerja	1. Menerima Penetapan Formasi ASN Tahun 2023 (aspek 1) 2. Telah dilaksanakan Orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 sejumlah 42 orang yang dilaksanakan secara luring di Gedung C lantai 3 tanggal 3 s.d. 21 Juli 2023 dengan kurikulum sebagai berikut: a. Pengenalan Fungsi dan Tugas ASN melalui Massive Open Online Course (MOOC) b. Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah 3. Melakukan Pelantikan PPPK Tahun 2022 4. Melakukan Persiapan Pengadaan PPPK Tahun 2023 5. Melakukan Pengumuman Seleksi Pengadaan PPPK Tahun 2023	1. Melakukan Seleksi Kompetensi dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Pengadaan PPPK Tahun 2023 2. Melakukan Persiapan Seleksi Terbuka JPT Pratama ANRI (Aspek 2) 3. Pengelolaan Data Hasil penilaian Kompetensi pada Aplikasi Talent Pool 4. Koordinasi dengan BPOM, BKN dan LAN mengenai rencana magang/praktek kerja JF Asesor SDMA/JF Analis SDMA 5. Penyusunan laporan ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi 6. Kerjasama Program Taspen Life Ansurance bagi seluruh pegawai ANRI
-------------	------------------	---	--	---	---

				6. Penilaian Kompetensi Pegawai dengan Metode SJT dan Psikotest 7. Pemeriksaan narkoba bagi 32 orang peserta	
Indeks BerAKHLAK	65	1. melakukan sosialisasi dan Internalisasi 2. Menyusun Tim Agen Perubahan 3. melakukan apel setiap senin pagi 4. melakukan olahraga bersama setiap Jumat pagi	1. Menyusunan rencana aksi agen perubahan 2. Membangun Sistem Manajemen Talenta dan Karir	1. mengukur indeks BerAKHLAK 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi rencana aksi agen perubahan	1. Penghargaan dan apresiasi pegawai terbaik 2. Penghargaan dan apresiasi Agen Perubahan terbaik

Indeks Profesionalitas ASN	Tinggi (81)	1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat Tahun 2022 2. Menyusun Analis Kebutuhan Diklat Tahun 2023 3. Pengumpulan SKP tahun 2022	1. Pengelolaan Data Diklat dalam rangka Penilaian IP ASN Tahun 2022 2. Koordinasi dengan unit kerja mengenai Data Diklat Triwulan I- 2023	1. Pengelolaan Data Diklat dalam rangka Penilaian IP ASN Tahun 2022 2. Koordinasi dengan unit kerja mengenai Data Diklat Triwulan I- 2023 3. Sosialisasi IP ASN bagi seluruh pegawai ANRI dalam rangka meningkatnya pemahaman pegawai tentang IP ASN	1. Pengelolaan Data Diklat dalam rangka Penilaian IP ASN Tahun 2022 2. Koordinasi dengan unit kerja mengenai Data Diklat Triwulan III- 2023 3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat Triwulan I-III Tahun 2023
Indeks Reformasi Hukum	85	1. Membentuk Tim Kerja dan Asesor Penilaian IRH dalam bentuk Keputusan Kepala 2. Membentuk Tim Analis dan Evaluasi Hukum (koordinasi dengan Pusjibang- Analis Kebijakan) 3. Melakukan evaluasi terhadap penilaian IRH Tahun 2022	1. Mengumpulkan bukti dukung penilaian IRH 2023 2. Berkoordinasi dengan Kepegawaian terkait penilaian variabel Pengembangan Kompetensi Perancang Per-UU 3. Melakukan Mapping, Evaluasi Produk Hukum guna kepentingan Proleg dan Deregulasi 4. Berkoordinasi dalam pengelolaan JDIH	1. Melakukan unggah tahap akhir bukti dukung penilaian IRH 2023 2. Melaksanakan rapat pleno penetapan nilai IRH 2023 bersama Asesor dan Tim Kerja 3. Menetapkan BAP	1. Melakukan evaluasi dan persiapan untuk penilaian IRH Tahun 2024

A. Layanan Hukum

Tabel 7 Rencana Aksi Kinerja Layanan Hukum

					RENCANA AKSI		
NO	INDEKS RB	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	KENDALA YANG DIHADAPI	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Indeks Reformasi Hukum	Melakukan harmonisasi Produk Hukum ANRI dengan Ke-menterian Hukum dan HAM, dan intansi terkait (Sekretariat Kabinet dan Kementerian PAN RB) Tingkat kehadiran pimpinan tinggi dalam rapat pleno pengharmonisasian yang memiliki ke-wenangan dalam pengambilan keputusan. Melakukan kegiatan pembinaan pengembangan kompetensi Perancangan Peraturan Per-undang-Undangan	Surat Permohonan Harmo-nisasi yang di tandatangani Pejabat yang berwenang Rancangan Per-ANRI yang sudah di paraf persetujuan Program Penyusunan (Proleg) atau izin prakarsa Keputusan mengenai pemben-tukan Panitia Antar Kemente-rian/ non kementerian Naskah Akademik/ Naskah Urgensi Undangan dan Daftar Hadir Program dan anggaran pe-ningkatan kompetensi Pe-rancang Per-UU Surat Penugasan mengikuti Pelatihan Dokumen yang berisi jumlah partisipasi Perancang Per-UU dalam pengembangan kompetensi (diklat, bimtek, workshop baik klasikal maupun non klasikal.	B (80 Kriteria Lengkap) Catatan: Seluruh indikator output (1 s. d 6) dalam pengharmonisasian Produk Hukum ANRI lengkap. A (100- Interval 91-100%) Catatan: Partisipasi Perancang ANRI dalam setahun untuk mengikuti pengembangan kompetensi	Salah satu indikator penilaian yang tidak dapat dipenuhi dalam penilaian tahun 2023 adalah penilaian terhadap pengaharmonisasian RUU, RPP, dan RPERPRES yang tidak disusun oleh ANRI di tahun 2023. RPERPRES tentang ANRI sudah diajukan dalam penilaian IRH tahun 2022. Penyesuaian dengan rencana (kebijakan dan anggaran) pengembangan kompetensi khusus untuk Perancang Per-UU. Ragam diklat terbatas yang terselenggara bagi Perancang yang diselenggarakan oleh Instansi Pembina	Januari 2022 s.d Agustus 2023 Januari 2022 s.d Agustus 2023	Ketua Tim Pro-gram Legislasi dan Deregulasi Peratu- ran Kearsipan Kepegawaian*)
		Melakukan kegiatan peman-tauan dan evaluasi terhadap Peraturan Perundang-undangan	Kepka Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Per-UU. Daftar Jumlah Peraturan Per-UU yang ditargetkan untuk dievaluasi. Daftar Jumlah Peraturan Per-UU yang sudah dievaluasi. Laporan dan Rekomendasi hasil dari evaluasi.	A (100- Jumlah Peraturan yang berhasil di evaluasi dan ditindak-lanjuti.	Peran serta pejabat fungsional dari seluruh unit kerja ANRI untuk dapat kembali melakukan evaluasi terhadap Peraturan Per-UU (Peranri) dan melaksanakan rekomen-dasi dari hasil analisis dan evaluasi Tim Kerja.	Januari 2022 s.d Agustus 2023	Ketua Tim Pro-gram Legislasi dan Deregulasi Peratu- ran Kearsipan

Jumlah Peraturar UU yang dievalua 6. Tindak lanjut Rekomendasi kegiatan peman dan evaluasi terl Peraturan Perun undangan 7. Tingkat keterli pejabat fung analis hukum omelakukan pemantauan	i Analis Hukum 6. Kepka Tim Analisis dan Evaluasi hukum terhadap Peraturan Per-UU luan luan luan luan luan luan luan luan	Meskipun tidak menjadi faktor pembagi, peran jafung analis hukum tetap dibutuhkan bagi pemantauan dan evaluasi terhadap Peraturan Per-UU		
kegiatan pengembangan Aplikasi JDIH terbaru, khus untuk penaml beberapa fitur a lain: a. Capture JDIH terintergrasi	sesuai dengan indikator penilaian yang ditentukan oleh BPHN. ndar nen m. nasi Data ntuk alam NRI snya shan stara man vang ke kum	Pengembangan sistem JDIH penambahan fitur baru. Migrasi data portal lama ke dalam portal baru (ILDIS)	Juni s.d Desember 2023 (Agustus 2023 akan direview kembali mengingat pengumpulan bukti dukung penilaian IRH 2023 berakhir di Agustus 2023)	Ketua Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

d. Struktur Organisasi Pengelo-la JDIH. e. SOP Pengelolaan JDIH. f. Abstrak Peraturan Perundangan.	
Pengelo-la JDIH. e. SOP Pengelolaan JDIH. f. Abstrak Peraturan Perun-	
e. SOP Pengelolaan JDIH. f. Abstrak Peraturan Perun-	
JDIH. f. Abstrak Peraturan Perun-	
f. Abstrak Peraturan Perun-	
Peraturan Perun-	
g. Capture Pelaporan melalui	
F Danet	
E Report.	
h. Capture Metadata	
Pengo-lahan Pengo-lahan	
Dokumen Hukum.	
i. Capture Update	
Data di tahun	
penilaian.	
j. Capture URL	
Integrasi.	
k. Capture log	
sinkronisasi	
Integrasi.	
I. Capture Media	
Sosial JDIH Sosial JDIH	

B. Layanan Umum

Tabel 8 Rencana Aksi Layanan Umum

INDIKATOR KINERJA	TARGET		RENCAI	NA AKSI	
KEGIATAN		TWI	TW II	TW III	TW IV
Indeks Sistem Merit	325 (A)	 Pemeriksaan Kesehatan (MCU) bagi 62 pegawai Pelaksanaan Edukasi mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Program Return To Work Pengelolaan informasi vaksinasi Covid19 Booster 2 Pelatihan Hiperkes dan Kesehatan Kerja bagi 2 tenaga kesehatan 	 Pemeriksaan Narkoba bagi 25 orang Sosialisasi mengenai Program dan Layanan Bpjs Kesehatan, Taspen Dan Peningkatan Kesejahteraan ASN Melalui Program Taspen Life Sosialisasi dan Penerapan Aktifitas Peregangan diwaktu Kerja Pemeriksaan Kesehatan sesuai indikasi medis bagi 19 pegawai BAST Pelayanan kesehatan dan pengobatan bagi 59 pegawai Pusdiklat Kearsipan 	 Pelayanan Konsultasi Psikologi sebanyak 6 orang Pemeriksaan narkoba bagi 32 orang peserta Layanan kepesertaan BPJS bagi 150 pegawai 	1. Pengujian kesehatan PNS sebanyak 1 pegawai 2. Pendampingan pemeriksaan kelaikan kerja bagi 1 pegawai 3. Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular melalui pemeriksaan antropometri dan tanda-tanda vital bagi 56 pegawai Pusdiklat Kearsipan 4. Layanan Skrining DM bagi 138 pegawai 5. Layanan Skrining Papsmear bagi 74 pegawai

C. Layanan Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 9 Rencana Aksi Layanan Pendidikan dan Pelatihan

INDIKATOR KINERJA	TARGET		RENCA	ANA AKSI	
KEGIATAN		TWI	TW II	TW III	TW IV
Indeks Sistem Merit	325 (A)	1. Koordinasi dengan unit kerja Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi terkait SKJ JF Arsiparis 2. Studi Banding Penilaian Kompetensi Pegawai ke BPOM 3. Pelaksanaan Assesment Center JF Muda dan JF Madya	1. Pelatihan Feedback/Coaching Hasil Assesment	1. Penilaian Kompetensi Pegawai dengan Metode SJT dan Psikotest	1. Pengelolaan Data Hasil penilaian Kompetensi pada Aplikasi Talent Pool 2. Koordinasi dengan BPOM, BKN dan LAN mengenai rencana magang/praktek kerja JF Asesor SDMA/JF Analis SDMA 3. Penyusunan laporan ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi
Indeks Profesionalitas ASN	Tinggi (81)	1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat Tahun 2022 2. Menyusun Analis Kebutuhan Diklat Tahun 2023	1. Pengelolaan Data Diklat dalam rangka Penilaian IP ASN Tahun 2022 2. Koordinasi dengan unit kerja mengenai Data Diklat Triwulan I- 2023	1. Pengelolaan Data Diklat dalam rangka Penilaian IP ASN Tahun 2022 2. Koordinasi dengan unit kerja mengenai Data Diklat Triwulan I-2023 3. Sosialisasi IP ASN bagi seluruh pegawai ANRI dalam rangka meningkatnya pemahaman pegawai tentang IP ASN	1. Pengelolaan Data Diklat dalam rangka Penilaian IP ASN Tahun 2022 2. Koordinasi dengan unit kerja mengenai Data Diklat Triwulan III-2023 3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat Triwulan I-III Tahun 2023

2.5 Rencana Penarikan Dana

A. Layanan Hukum

	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/	Rencana				BULAN		
KODE	KOMPONEN/SUBKOMPONEN/DETIL BELANJA	Pelaksanaan	PAGU	LS/UP	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
087.01.WA	Program Dukungan Manajemen							0
3614	Pelayanan Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum							0
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]							0
EBA.957	Layanan Hukum	1 Layanan	883.706.000					
051	Pembentukan Produk Hukum Kearsipan		454.601.000					
Α	Sosialisasi peraturan Bidang Kearsipan		20.700.000					0
521211	Belanja Bahan		14.100.000					0
522151	Belanja Jasa Profesi		6.600.000					0
В	Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Kearsipan (Program Legislasi ANRI)		2.880.000					
521211	Belanja Bahan		2.880.000					0
С	Penelaahan Peraturan Kearsipan		1.820.000					
521211	Belanja Bahan		1.820.000		1.820.000			1.820.000
D	Harmonisasi Rancangan Peraturan		6.561.000					
521211	Belanja Bahan		6.561.000					0
Е	Penyempurnaan Peraturan		239.040.000					
522151	Belanja Jasa Profesi		34.200.000					0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		101.300.000				101.300.000	101.300.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		103.540.000				103.540.000	103.540.000
F	Finalisasi Peraturan		98.000.000					
521211	Belanja Bahan		10.000.000			2.450.000		2.450.000
522151	Belanja Jasa Profesi		9.400.000					0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		78.600.000					0
G	Penyusunan Naskah Akademik RUU Kearsipan		85.600.000					
522151	Belanja Jasa Profesi		38.300.000					0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		47.300.000					0
052	Pengelolaan Pelayanan Hukum		312.801.000					
Α	Pendokumentasian dan Penyediaan Jaringan Informasi Hukum		179.805.000					
521211	Belanja Bahan		3.375.000					0
521213 524114	Honor Output Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Paket		113.850.000 62.580.000			28.462.500		28.462.500
324114 B	Meeting Dalam Kota Finalisasi Penyusunan Keputusan		3.685.000					
	Kepala ANRI							
521211	Belanja Bahan		3.685.000			2.560.000		2.560.000
С	Penyusunan Penelaahan (Bantuan Hukum dan Keputusan KA ANRI)		78.525.000					
521211	Belanja Bahan		1.125.000					0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		77.400.000			77.400.000		77.400.000
D	Koordinasi dalam rangka pengelolaan JDIH		2.400.000					
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		2.400.000			600.000		600.000

E	Penyuluhan Hukum	48.386.000			
521211	Belanja Bahan	39.986.000			0
522151	Belanja Jasa Profesi	8.400.000			0
053	Bantuan Hukum	116.304.000			
Α	TANPA SUB KOMPONEN	116.304.000			
521211	Belania Bahan	44.000.000	0.050.000	0.050.000	4 500 000
]	<u>Delanja Danan</u>	11.250.000	2.250.000	2.250.000	4.500.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	97.554.000	2.250.000	2.250.000	0

B. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

Tabel 10 RPD Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

Kode	Komponen	Jumlah		Triw	/ulan	
Noue	Komponen	Pagu 2023	TW I	TW II	TW III	TW IV
051	Monitoring dan Evaluasi SOP AP Unit Kerja di Lingkungan ANRI	Rp. 24.623.000,-	Rp. 6.155.750.	Rp. 6.155.750	Rp. 6.155.750	Rp. 6.155.750
052	Penyusunan Analisis Jabatan di Lingkungan ANRI	Rp117.300.0 00	Rp29.325. 000	Rp29.325 .000	Rp29.325. 000	Rp29.325. 000
053	Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja ANRI	Rp69.505.00 0	Rp17.376. 250	Rp17.376 .250	Rp17.376. 250	Rp17.376. 250
054	Penerapan Analisis Beban Kerja di Lingkungan ANRI	Rp58.600.00 0	Rp14.650. 000	Rp14.650 .000	Rp14.650. 000	Rp14.650. 000
055	Monitoring dan Evaluasi Proses Bisnis	Rp.9.187.000	Rp.2.296. 750,-	Rp.2.296. 750	Rp.2.296. 750	Rp.2.296. 750
056	Penyempurnaan Evaluasi Jabatan	Rp13.125.00 0	Rp3.281.2 50	Rp3.281. 250	Rp3.281.2 50	Rp3.281.2 50

	di Lingkungan ANRI					
057	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan ANRI	Rp45.910.00 0 (revisi)	Rp11.477. 500	Rp11.477 .500	Rp11.477. 500	Rp11.477. 500

C. Layanan Umum

Tabel 11 RPD Layanan Umum

	No. Kode	Akun: 3614.EBA.9	962	
	051 Pelayanan Kesehatan di Lingkungan ANRI			
Bulan	Layanan	Check-up	Seminar	Jumlah
	Poliklinik/Obat-	Kesehatan	Kesehatan	
	obatan			
Januari	0	600.000	0	600.000
Februari	77.977.770	900.000	3.600.000	82.477.770
Maret	15.792.300	49.770.400	0	65.562.700
April	27.734.600	0	5.175.000	32.909.600
Mei	14.092.300	9.887.342	11.605.000	35.584.642
Juni	16.702.300	181.600	1.500.000	18.383.900
Juli	40.637.240	189.200	0	40.826.440
Agustus	13.728.342	750.000	3.300.000	17.778.342
September	15.228.342	300.000	0	15.528.342
Oktober	45.628.603	12.333.075	0	57.961.678
November	21.641.776	1.226.200	20.000	22.887.976
Desember	14.357.342	0	0	14.357.342
	404.858.732			
Anggaran Tidak terserap				2.794.268
Total Pagu Anggaran				407.653.000

D. Layanan Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 12 RPD Layanan Pendidikan dan Pelatihan

	No. Kode Akun: 3614. EBC.996			Jumlah
	051	052		
Bulan	Pendidikan	Pendidikan	053	
Balan	dan	dan	Pelatihan	
	Pelatihan	Pelatihan	Kepemimpinan	
	Teknis	Fungsional		
Januari	9.100.000	-	-	9.100.000
Februari	85.420.000	-	-	85.425.000
Maret	142.045.000	-	56.450.000	198.495.000
April	16.800.000	-	-	16.800.000
Mei	56.500.000	6.238.000	-	62.732.000
Juni	67.840.000	183.960.000	-	251.800.000
Juli	153.730.000	-	-	153.730.000
Agustus	136.622.000	57.692.000	-	194.134.000
September	3.600.000	-	-	3.600.000
Oktober	5.460.000	1.300.000	-	6.760.000
November	7.531.000	-	-	7.531.000
Desember	13.350.000	-	-	13.350.000
	1.003.643.000			

E. Layanan Reformasi Kinerja

Tabel 13 RPD Layanan Reformasi Kinerja

Kode	Komponen	Jumlah	Triwulan			
			TWI	TW II	TW III	TW IV
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	105.830. 000	26.457.5 00	26.457.5 00	26.457.5 00	26.457. 500
052	Implementasi Revolusi Mental	36.893.0 00	9.223.25	9.223.25	9.223.25	9.223.2 50

2.6 Metode Pengukuran

Tabel 14 IKU Biro OKH Tahun 2023

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	URAIAN
S.P.1 Terwujudnya tata kelola yangbaik di ANRI	I.K.P.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	Deskripsi: Indeks Reformasi birokrasi merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim reformasi birokrasi nasional terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah pusat dan daerah.
		Sumber Data: Hasil penilaian mandiri atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi ANRI yang diverifikasi oleh Kementerian PANRB.
		Cara Menghitung: Hasil penilaian dan evaluasi Kementerian PANRB.
		Unit Bertanggung Jawab: Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum
		Penanggung Jawab Data: Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum

 	_
I.K.P.1.5 Indeks Sistem Merit	Deskripsi: Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.
	Implementasi awal sistem merit yang dilaksanakan ANRI adalah sebagai berikut: a. Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif; b. Manajemen SDM secara efektif dan efisien; c. Melindungi pegawai dari intervensi politikdan dari tindakan semena-mena.
	Sumber Data: Laporan penilaian mandiri dan penilaian sistem merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Cara Menghitung: Penilaian mandiri dan penilaian sistem meritoleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
	Unit Bertanggung Jawab: Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum Penanggung Jawab Data: Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Renstra

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik di ANRI, Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum telah mengoptimalkan perannya dalam melaksanakan pelayanan organisasi, kepegawaian, dan hukum melalui kegiatan layanan hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan umum (kesehatan), layanan manajemen sdm dan layanan reformasi kinerja.

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

A. Layanan Hukum

Pada bulan Januari s.d. Desember pada Tahun 2023, Layanan Hukum telah melaksanakan realisasi capaian kinerja sebagai berikut:

1. Proleg Dan Deregulasi Peraturan Kearsipan

- a. penyusunan Rancangan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Arsiparis Teladan dan Unit Pengolah Terbaik di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia pada tanggal 10 Januari;
- b. pengharmonisasian Rancangan Peraturan ANRI tentang Pedoman
 Autentikasi Arsip Statis, pada tanggal 27 Maret 2023
- c. penyusunan Raperpres tentang Arsip Nasional Republik Indonesia;
- d. penyusunan Rancangan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja;
- e. penyusunan Rancangan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang autentikasi Arsip tanggal 1 Februari;
- f. Rapat alih Bahasa Peranri Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI;
- g. Penyusunan SE tentang Hari Kearsipan.
- h. Pembahasan rancangan peranri PAD
- i. rapat koordinasi persiapan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH)
 dan deregulasi pada tanggal 5 Mei;
- j. pengundangan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Autentikas Arsip Statis pada tanggal 9 Mei 2023.

k. Menindaklanjuti kegiatan pemetaan Peraturan ANRI (PERANRI) dalam rangka melakukan kegiatan klasifikasi, menyusun statistik jumlah PERANRI, dan menemukan potensi awal untuk dilakukan deregulasi, dibutuhkan suatu instrumen evaluasi agar proses evaluasi dan pengujian dapat dilakukan dengan metode yang tepat. Tim secara cermat dan komprehensif telah menyusun instrumen evaluasi yang akan dijadikan modul kerja bagi terlaksananya kegiatan evaluasi yang menyeluruh dan terstruktur terhadap seluruh PERANRI. Melalui kegiatan evaluasi yang menyeluruh dan terstruktur ini, diharapkan akan menghasilkan suatu bagan data yang valid yang akan memberikan rekomendasi kebijakan atas potensi deregulasi bagi kebijakan produk hukum di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Dalam menyusun Instrumen Evaluasi, Tim melakukan benchmarking dan penyesuaian terhadap Pedoman Evaluasi Peraturan Perundangundangan yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.01.03-Penyesuaian dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan dan 07. kondisi faktual produk hukum yang ada di ANRI. Berdasarkan pedoman tersebut, Tim mencoba merumuskan Instrumen Evaluasi dengan dimensi/indikator penilaian sebagai berikut:

a. Indikator Ketepatan Jenis

Melalui indikator ini, Tim secara cermat akan melakukan telaah dan evaluasi terhadap PERANRI yang telah dilakukan pemetaan. Evaluasi dilakukan terhadap apakah telah tepat atau sesuai suatu materi muatan diatur dalam bentuk/level Peranri. Evaluasi juga dilakukan apakah terdapat delegasi langsung dari Peraturan yang lebih tinggi.

b. Indikator Disharmorni

Melalui indikator ini, PERANRI akan diuji apakah mengalami kondisi tumpang tindih dan/atau memiliki materi muatan yang menyimpang dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, baru, dan/atau yang setara.

c. Indikator Kejelasan

Melalui indikator ini akan dievaluasi PERANRI dari aspek kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu akan dievaluasi terkait penggunaan ragam bahasa dan kata untuk menjamin apakah materi muatan dari PERANRI tersebut sudah tercantum dengan baik.

d. Indikator Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundangundangan

Melalui indikator ini akan dievaluasi dari aspek operasional, rasio beban dan manfaat, relevansi dengan kondisi saat ini, kekosongan peraturan, koordinasi kelembagaan, dsb.

Indikator yang telah disampaikan tersebut adalah yang akan digunakan sebagai alat uji dalam Instrumen Evaluasi. Selanjutnya Instrumen Evaluasi akan dituangkan dalam Kertas Kerja Instrumen Evaluasi yang akan digunakan Tim untuk melakukan evaluasi seluruh PERANRI.

- I. Melakukan penyiapan bahan sebagai pemenuhan dari variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum 2023.
- m. Evaluasi produk hukum untuk deregulasi juga telah dilakukan, diantaranya:
 - Melakukan penentuan Peranri yang akan menjadi bahan penilaian di tahun 2023. Penentuan dilakukan pada kelompok Peranri Pengelolaan Arsip (dinamis dan statis, cakupan nasional dan internal anri)
 - Evaluasi dan penilaian menggunakan kertas kerja sebagai bukti dukung penilaian untuk IRH 2023
- n. melaksanakan pleno penilaian mandiri IRH dengan total hasil 89,45 penilaian nasional pada tahun 2022 mendapatkan nilai 81,45 (A);
- o. telah dilakukan penyusunan kertas kerja evaluasi peraturan di bidang pengelolaan: arsip statis sebanyak 8 peraturan, arsip elektronik sebanyak 6 peraturan, arsip dinamis sebanyak 3 peraturan, dan arsip dinamis di ANRI sebanyak 8 peraturan.
- p. Penyusunan kertas kerja evaluasi.
- q. Regulasi yg sedang dibahas dengan Kementerian Hukum dan HAM:

- Rancangan Peraturan ANRI tentang Pedoman Pengawasan Internal di lingkungan ANRI.
- 2) Rancangan Peraturan ANRI tentang Pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan ANRI.
- r. ANRI pada penilaian Indeks Reformasi Hukum tahun 2023 berdasarkan surat dari Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor PPH-LT.01.02-78 hal Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2023, mendapatkan nilai akhir 86.68 (delapan puluh enam koma enam puluh delapan).
- s. Pada bulan desember 2023 melaksanakan tahap harmonisasi dan pengundangan terhadap Peraturan ANRI sebagai berikut:
 - 1) Rancangan Peraturan ANRI tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan ANRI dan rancangan Peraturan ANRI tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan ANRI saat ini menunggu tandatangan dari Plt Kepala ANRI untuk kemudian dapat dilanjutkan ke tahap pengundangan PERANRI ke Kementerian Hukum dan HAM
 - 2) Pengajuan harmonisasi rancangan Peraturan ANRI tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI sebagaimana tindak lanjut dari sudah disetujuinya materi muatan rancangan oleh Kementerian PAN RB
- t. Selama tahun 2023 terbentuknya Produk Hukum Perundangundangan dan Instrumen Hukum Lainnya, sebagai berikut:
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023
 Tentang Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
 2023 Tentang Pedoman Autentikasi Arsip Statis;
 - 3) Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Himbauan Penggunaan Jasa Kearsipan oleh Perusahaan Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan Terakreditasi;
 - 4) Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peringatan Hari Kearsipan Ke-52 Tahun 2023;

5) Instruksi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja di Arsip Nasional
Republik Indonesia;

2. Naskah Akademik, Sosialisasi, Dan Penyuluhan Hukum

- Rapat koordinasi dengan Kapus Perencanaan Hukum Nasional,
 BPHN, dan Kemenkumham dalam rangka penyusunan naskah akademik
- b. Konsultasi dan koordinasi dengan pusat analisis dan evaluasi hukum,
 BPHN, dan Kemenkumham dengan hasil sebagai berikut:
 - disampaikan petunjuk dan arahan terkait langkah penyempurnaan
 NA RUU kearsipan menuju penyelarasan NA tahun 2024
 - 2) bersurat resmi sebagai dasar kegiatan
- c. Penyuluhan hukum dgn tema "Netralitas PNS dalam Pemilu 2024" pada tanggal 29 Mei 2023;
- d. menyusun daftar inventaris masalah Undang-Undang Nomor 43
 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- e. melaksanakan rapat teknis persiapan sosialisasi tgl 16 Juni dgn pembahasan: teknis kegiatan yg meliputi PIC kegiatan, rundown acara, narasumber, moderator;
- f. permohonan masukan NA dari sestama kepada JPT Madya;
- g. Persiapan dan koordinasi sosialisasi Peranri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Autentifikasi Arsip Statis
- h. telah dilaksanakan sosialisasi peraturan bidang kearsipan dengan tema Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Statis pada tanggal 8 Agustus sebanyak 158 peserta.
- i. Persiapan pembahasan dan koordinasi penyusunan Naskah Akademik RUU Kearsipan dengan BPHN
- j. Pada Bulan November Konsultasi dan koordinasi dengan pusat analisis dan evaluasi hukum, BPHN, Kementerian Hukum dan HAM.
 - tanggapan analis hukum madya selaku koordinator substansi politik, hukum, keamanan, dan kesejahteraan rakyat bphn terhadap draft naskah akademik ruu kearsipan.

- rapat virtual brainstorming penyusunan analisis dan evaluasi na ruu kearsipan oleh perancang peraturan perundang undangan, arsiparis ahli utama, analis kepegawaian (perwakilan), widyaiswara ahli utama degan narasumber BPHN
- 3) penyusunan analisis pasal per pasal usulan ubah cabut tetap berdasarkan hasil rapat konsinyering di bulan Oktober

k. Pelaksanaan Diskusi Terfokus:

- 1) simplifikasi regulasi dan deregulasi kebijakan
 - a. perumusan norma pendelegasian ketentuan dalam rancangan UU diusahakan selesai sampai di tingkat Peraturan Pemerintah
 - b. pencabutan berbagairegulasi, baiksecara keseluruhanmaupun sebagian
 - menggabungkan beberapa regulasi yang memiliki pengaturan substansi sarna untuk memudahkan pelaksanaan regu/asi serta efisiensi biaya dan waktu
- 2) reviu ketentuan pidana UU No 43 Tahun 2009
 - a. perbandigan ekuivalensi sanksi pidana denda dan penjara dalam KUHP baru
 - b. pencantuman unsur dengan sengaja
 - c. alternatif dengan sengaja: dengan maksud, yang diketahuinya, dll
 - d. timeline NA atau RUU Kearsipan berlaku apakah sebelum atau sesudah KUHP baru berlaku (2026)
 - e. pertimbangan untuk mengeliminasi ketentuan pidana jika secara umum pidana kearsipan telah diatur dalam KUHP baru (perlu penguatan).

3. Keputusan Kepala ANRI

- Rapat Pembahasan Mekanisme Penginputan Kepka ANRI dalam Aplikasi SINORI pada tanggal 13 Jan 2023;
- b. Keputusan Kepala ANRI:
 - Periode Januari s.d Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023 telah dikeluarkan sebanyak 138 Keputusan Kepala ANRI;

- 2) Pada periode Maret 2023, telah dikeluarkan sebanyak 42 Keputusan Kepala ANRI;
- 3) Periode April dikeluarkan sebanyak 66 Keputusan Kepala ANRI;
- 4) Periode Mei dikeluarkan sebanyak 42 Keputusan Kepala ANRI;
- 5) Periode Januari sampai dengan Juni 2023 telah menghasilkan Kepka sebanyak 282 Kepka;
- Pada bulan Juli 2023 telah menghasilkan Kepka sebanyak 26
 Kepka;
- Pada bulan Agustus 2023 telah menghasilkan Kepka sebanyak
 14 Kepka;
- 8) Pada bulan September 2023 telah menghasilkan Keputusan terkait dengan Tim sebanyak 7 Kepka;
- Pada Oktober 2023 telah menghasilkan Kepka sebanyak 21 Kepka;
- 10) Pada bulan November 2023 telah menghasilkan Kepka sebanyak 30 Kepka ;
- 11) Pada bulan Desember 2023 telah menghasilkan Kepka sebanyak28 Kepka ;

Total Kepka ANRI Tahun 2023 sebanyak 444 Keputusan Kepala ANRI.

- c. Rapat Pembahasan Perubahan Kepka Nomor 33 Tahun 2023 ttg Pengadaan/Penyediaan Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh bagi Pegawai ANRI TA 2023 pada tanggal 10 Maret;
- d. finalisasasi Penyusunan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (KEPKAANRI) sesuai dengan inisiasi dari unit pemrakarsa.
- e. revisi SOP Finalisasi Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

4. JDIH ANRI

- a. Melaksanakan perbaikan metadata peraturan dalam JDIH;
- b. Proses penyusunan SOP makro pengelolaan JDIH dan SOP unggah peraturan;
- c. Mengunggah peraturan dan instrumen hukum dalam JDIH;

- d. Koordinasi Dan Konsultasi Mengenai Pengembangan Pengelolaan JDIH dengan Kementerian Komunikasi Dan Informatika, bertempat di Gedung C Lantai 7 Arsip Nasional Republik Indonesia, pada tanggal 13 Maret 2023;
- e. Koordinasi Dan Konsultasi Mengenai Pengembangan Pengelolaan JDIH dengan Ombudsman, bertempat di Gedung C Lantai 7 Arsip Nasional Republik Indonesia, pada tanggal 30 Maret 2023;
- f. FGD Desain Naskah Pra Kebijakan Analisis Strategi Kebijakan Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan di BPHN;
- g. Diskusi Publik Dalam Rangka Pembahasan Naskah Draft Final I Pra Kebijakan Analisis Strategi Kebijakan Perubahan Atas Permenkumham Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM pada tanggal 16 Mei 2023;
- h. Seminar Nasional dengan tema "Kebijakan Perumusan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan Pasca Pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" dan Pra Kongres Ikatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Indonesia yang diselenggarakan Badan Keahlian DPR RI pada tanggal 17 dan 18 Mei;
- pengembangan website JDIH ANRI dengan aplikasi IDLIS, proses instalasi website dan database sudah selesai. Link untuk website JDIH ANRI dengan aplikasi ILDIS sebagai berikut: http://10.37.2.81/ILDIS_31/backend/, beberapa link sudah dilakukan integrasi data;
- j. revisi SOP Pengelolaan JDIH ANRI.
- k. Menerima Kunjungan Tim Hukum Pengelola JDIH Pemerintah Kota Tegal. Dilakukan koordinasi dan berbagi ilmu terkait pengelolaan JDIH dimasing-masing instansi dengan terlaksananya kegiatan ini

diharapkan sinergi yang dilakukan dapat membuat pengelolaan JDIH semakin profesional, efektif, dan bermanfaat bagi Masyarakat. Perwakilan Bagian Hukum Sekretariat Kota Tegal yang hadir terdiri atas 2 (dua) orang Analis Hukum dan 5 (lima) orang Staf;

- I. Migrasi data dari portal lama ke dalam portal baru (ILDIS)
 Telah dilakukan migrasi data untuk produk hukum ANRI dalam portal
 baru JDIH, ILDIS, dimana melibatkan seluruh Tim Kerja Jaringan
 Dokumentasi dan Informasi Hukum untuk mengunggah kembali
 dokumen peraturan perundang-undangan kearsipan ke dalam
 Aplikasi ILDIS. Data yang telah diupload per bulan Desember 2023,
 sebagai berikut:
 - 1) Perumusan abstrak dan penggunggahan database sejumlah 658 Peraturan yang terdiri atas:
 - (1) 14 Undang-Undang
 - (2) 10 Peraturan Pemerintah
 - (3) 2 Peraturan Presiden
 - (4) 2 Keputusan Presiden
 - (5) 2 Peraturan Menteri
 - (6) 261 Peraturan Kepala ANRI
 - (7) 84 Peraturan ANRI
 - (8) 18 Instruksi Kepala ANRI
 - (9) 7 Surat Edaran Kepala ANRI
 - (10) 41 Keputusan Kepala ANRI
 - (11) 1 Surat Edaran Menteri
 - (12) 2 Keputusan Menteri
 - 2) Pengunggahan 921 Monografi yang terdiri atas:
 - 787 buku koleksi perpustakaan Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum yang telah di input metadata dan pemindaian cover buku.
 - 134 koleksi langka yang bersumber dari daftar khasanah arsip statis Direktorat Layanan dan Pemanfaatan.
 - 3) Pengunggahan 462 Artikel yang bersumber dari Jurnal Kearsipan dan Majalah Arsip sebagai referensi bagi masyarakat umum.

- m. Menjawab pertanyaan pengunjung JDIH yang terdapat pada fitur Kotak Saran
- n. Koordinasi dengan Pusdatin terkait pengembangan portal baru JDIH, ILDIS untuk penambahan domain: jenis peraturan perundangundangan, metadata, dan kategori bidang hukum.
- JDIH ANRI menerima penghargaan ke 3 (tiga) sebagai Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Terbaik (JDIHN AWARDS) Tahun 2023.
- p. Koordinasi Mengenai Pengembangan Pengelolaan Laman JDIH Baru (ILDIS).

Pada tanggal 22 Desember 2023 telah dilaksanakan rapat koordinasi mengenai pengembangan laman JDIH baru (ILDIS). Rapat dihadiri oleh Sekretaris Utama, Kepala Biro Organisasi, kepegawaian, dan Hukum, Kepala Pusat Pusat Data dan Informasi, Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pranata Komputer, dan Arsiparis.

Dimana agenda rapat menyampaikan laporan bahwa telah dilakukan penataan database peraturan, Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum bekerja sama dengan Pusat Data dan Informasi juga telah menyusun laman baru JDIH dimana beberapa fitur telah disesuaikan dengan Permenkumham No. 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. 4.

Pada rapat dimaksud telah mendapatkan masukan dari peserta rapat untuk kemudian akan diakomodir oleh Pusat Data dan Informasi untuk perubahan tampilan dari laman JDIH lama.

5. Bantuan Hukum

- a. perkara Perdata di PN Clkarang Nomor 161/Pdt.G/2021/PN. Ckr
 - 1) koordinasi upaya hukum banding perkara Perdata di PN Clkarang Nomor 161/Pdt.G/2021/PN. Ckr;
 - 2) menyusun kontra memori banding PN Cikarang Nomor 161/Pdt.G/2021/PN. Ckr;
 - 3) Koordinasi hasil putusan banding perkara perdata no 161/pdt.g/pn.ckr pada tanggal 3 Mei.
- b. bantuan hukum kasus KOP ANRI dengan koordinasi kepada Kemenkop dan UKM RI;

- c. bantuan hukum Penggunaan Sebagian Tanah dan Bangunan pada Arsip Nasional Republik Indonesia Jl. Gajah Mada No. 111;
- d. pendampingan bukti arsip statis di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 14 Maret 2023;
- e. menyusun telaah staf:
 - 1) tentang permohonan tanda tangan kepala ANRI atas piagam penghargaan kepada OPD/perangkat daerah kabupaten Natuna;
 - 2) Telaah Kewenangan Plh./Plt. Kepala ANRI;
 - 3) Telaah Berita Acara Serah Terima Aplikasi SRIKANDI Antara Kominfo dan ANRI;
 - 4) Telaah Perjanjian Kerja Sama antara ANRI dan Google LLC / Telaah Naskah Content Hosting and Services Agreement Kerja Sama antara Google Arts and Culture dan ANRI;
 - 5) Telaah Penerapan Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2005 tentang Tunjangan Pengelolaan Arsip Statis bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan ANRI pada Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan;
 - 6) Telaah Pendelegasian Kewenangan Kewenangan Kepala ANRI;
 - 7) Telaah pemusnahan arsip bank-bank yang dilikuidasi;
 - 8) Telaah Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Arsiparis dan Uji Kompetensi;
 - 9) Telaah Staf tentang Pelaksanaan Diklat Fungsional Arsiparis & Uji Kompetensi;
 - 10)Telaah Staf tentang Pemusnahan Arsip-Arsip Bank yang di Likuidasi;11)Telaah Staf Pendelegasian Kewenangan Kepala ANRI.
- f. menyampaikan kontra memori banding terhadap memori banding
- pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Cikarang;
- g. Bantuan hukum ke semarang dalam rangka Workshop Urgensi Keamanan Dokumen Negara Dalam Pencetakan Naskah/ Dokumen Kerjasama;
- h. Koordinasi Putusan perkara nomor 274/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim dimana ANRI sebagai Turut Tergugat-II. Hasil putusan gugatan Penggugat (PT Djakarta Lloyd) ditolak;

- i. Pendampingan bantuan hukum pemeriksaan Penyidikan atas dugaan terjadinya Tindak Pidana surat palsu dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1459/VII/2022/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA;
- j. Rapat Pembahasan Pendampingan Layanan Bantuan Hukum;
- k. Mengikuti Wawancara BAP Dugaan Tindak Pidana Kearsipan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau pada tanggal 21 s.d. 23 Agustus 2023;
- Mengikuti Rapat Penyelarasan Urusan Kearsipan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali dan Sekretariat Daerah Provinsi Bali pada tanggal 30 Agustus s.d. 1 September 2023;
- m. Perjalanan Dinas Bantuan Hukum Penyelarasan Urusan Kearsipan di Kanwil. Kemenkumham Prov. Bali & Sekda Prov. Bali;
- n. Memberikan pertimbangan hukum berupa advokasi/pendapat dan Saran di Bidang Hukum Perdata terhadap Alat Bukti Hukum yang Berasal dari Khasanah Arsip Statis yang Tersimpan di ANRI kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten;

Bantuan Hukum Surat Jawaban Bareskrim Polri, permintaan keterangan & data;

B. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

051. Monitoring dan Evaluasi SOP AP Unit Kerja di Lingkungan ANRISelama tahun 2023 capaian kinerja Monitoring dan Evaluasi SOP di lingkungan Arsip Nasional RI sebagai berikut:

Bulan Januari

a. Menginventarisasi SOP Unit Kerja yang akan dilakukan penyusunan dan revisi dari SOP yang lama

Penetapan target penyusunan SOP ditetapkan 5 kelompok yaitu:

- 1. SOP di lingkungan Sekretariat Utama
- 2. SOP di lingkungan Kedeputian Konservasi Arsip
- 3. SOP di lingkungan Kedeputian Pembinaan Kearsipan
- 4. SOP di lingkungan Kedeputian IPSK
- 5. SOP di lingkungan Eselon II Mandiri
- b. Menyusun rencana penyusunan persiapan Probis

Bulan Februari

Penyusunan SOP

NO	NOMOR SOP	NAMA SOP
1	01/2023	SOP Rekonsiliasi Data UAKPB dan UAKPA
2	02/2023	SOP Inventarisasi BMN
3	03/2023	SOP Penerimaan BMN dan Barang Persediaan
4	04/2023	SOP Pendistribusian Barang Milik Negara
5	05/2023	SOP Pendistribusian Barang Milik Negara
6	06/2023	SOP Penyusunan Daftar Barang Ruangan (DBR)
7	07/2023	SOP Pemindahan Mutasi Barang Inventaris
8	08/2023	SOP Peminjaman dan Pengembalian BMN
9	09/2023	SOP Pengalihan Status Penggunaan BMN
10	10/2023	SOP Penyusunan Draf Usulan Penetapan Status BMN
11	11/2023	SOP Penyusunan Laporan Persediaan
12	12/2023	SOP Stok Opname Fisik Barang Persediaan
13	13/2023	SOP Transfer Keluar BMN
14	14/2023	SOP Seleksi Peserta Diklat Kearsipan Mekanisme Kerja Sama Instansi
15	15/2023	SOP Seleksi Peserta Diklat Kearsipan Mekanisme Kerja Sama Instansi Mitra
16	16/2023	SOP Penyusunan Jadwal Diklat Kearsipan
17	17/2023	SOP Publikasi Kalender Diklat Kearsipan
18	18/2023	SOP Pemakaian Sewa Gedung ANRI Jl. Gajah Mada Nomor 111

Bulan Maret 2023

NO	NOMOR SOP	NAMA SOP
1	19/2023	SOP Penyusunan Daftar Arsip Statis
2	20/2023	SOP Penyusunan Inventaris Arsip Statis
3	21/2023	SOP Penyusunan Guide Khazanah Arsip Statis
4	22/2023	SOP Penyusunan Guide Tematis Arsip Statis
5	23/2023	SOP Transliterasi Arsip Statis
6	24/2023	SOP Penerjemahan Arsip Statis
7	25/2023	SOP Internalisasi, Sosialisasi, Workshop
8	26/2023	SOP Persiapan Pengolahan Arsip Statis
9	27/2023	SOP Identifikasi Arsip Statis
10	28/2023	SOP Rencana Teknis
11	29/2023	SOP Identifikasi Khazanah Arsip Statis
12	30/2023	SOP Identifikasi Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis
13	31/2023	SOP Identifikasi Materi Arsip Statis Yang Akan Ditransliterasi dan Diterjemahkan
14	32/2023	SOP Penelusuran Sumber Data dan Referensi
15	33/2023	SOP Skema Pengaturan Arsip Sementara
16	34/2023	SOP Penelusuran Sumber Data dan Referensi
17	35/2023	SOP Rekonstruksi Arsip
18	36/2023	SOP Deskripsi Arsip Statis
19	37/2023	SOP Pengolahan Data
20	38/2023	SOP Skema Pengaturan Arsip dan Penomoran Definitif
21	39/2023	SOP Manuver Fisik Arsip Statis
22	40/2023	SOP Penulisan Daftar Arsip Statis
23	41/2023	SOP Penilaian
24	42/2023	SOP Penulisan Guide Arsip Statis
25	43/2023	SOP Verifikasi dan Validasi Arsip Statis

26	44/2023	SOP Verifikasi Fisik dan Informasi untuk Guide Arsip Statis Tematis
27	45/2023	SOP Penataan Fisik dan Pelabelan Arsip Statis
28	46/2023	SOP Alih Aksara untuk Transliterasi Arsip
29	48/2023	SOP Penulisan Inventaris Arsip Statis
30	49/2023	SOP Registrasi RFID pada Arsip Statis
31	51/2023	SOP Monitoring dan Pendataan AkuisisiArsip Statis

Bulan April

NO	NOMOR SOP	NAMA SOP
1	51/2023	SOP Monitoring dan Pendataan Akuisisi Arsip Statis
2	52/2023	SOP Penilaian dan Verifikasi Arsip Statis
3	53/2023	SOP Penyerahan Arsip Statis
4	54/2023	SOP Wawancara Sejarah Lisan
5	55/2023	SOP Persetujuan/Pertimbangan Pemusnahan Arsip

Bulan Mei 2023

<u>NO</u>	NOMOR SOP	NAMA SOP
1	56/2023	SOP Penyusunan Kurikulum dan Silabus Diklat Teknis Kearsipan Bagi Masyarakat
2	57/2023	SOP Sosialisasi Pengelola Arsip Bagi Masyarakat

3	58/2023	SOP Pelaksanaan Diklat Teknis Kearsipan Bagi Masyarakat
4	59/2023	SOP Inventarisasi BMN
5	60/2023	SOP Peminjaman BMN
6	61/2023	SOP Pendistribusian Barang Milik Negara
7	62/2023	SOP Pendistribusian Barang Persediaan
8	63/2023	SOP Penerimaan BMN dan Barang Persediaan
9	64/2023	SOP Penyusunan Daftar Barang Ruang (DBR)
10	65/2023	SOP Stok Opname Fisik Barang Persediaan
11	66/2023	SOP Penyusunan Laporan BMN
12	67/2023	SOP Pembayaran Tagihan melalui Mekanisme Uang Persediaan (UP)
13	68/2023	SOP Mekanisme Ganti Uang Persediaan (GUP)
14	69/2023	SOP Pembayaran Tagihan melalui Mekanisme Langsung (LS)
15	70/2023	SOP Transfer Keluar BMN
16	71/2023	SOP Transfer Masuk BMN
17	72/2023	SOP Pengajuan Usul Penilaian BMN
18	74/2023	SOP Pengadaan Langsung Barang Kontraktual dan Jasa Konsultasi
19	75/2023	SOP Pengadaan melalui E-Katalog LKPP kurang dari 200 juta
20	76/2023	SOP Pengadaan melalui E-Katalog LKPP lebih dari 200 juta
21	77/2023	SOP Penerimaan Naskah Dinas Masuk
22	78/2023	SOP Registrasi Naskah Masuk ke Dalam Aplikasi SRIKANDI
23	79/2023	SOP Pemberkasan Arsip Aktif pada aplikasi SRIKANDI

24	80/2023	SOP Layanan Arsip Statis Secara Online
25	81/2023	SOP Penataan Arsip di Lingkungan Pengguna Jasa Kearsipan
26	82/2023	SOP Layanan Jasa Pembuatan Pedoman Kearsipan
27	83/2023	SOP Pembuatan Aplikasi Sistem Kearsipan di Lingkungan Pengguna Jasa
28	84/2023	SOP Perekrutan Tenaga Pelaksana Penataan Arsip (PPA) di Lingkungan Pusat Jasa Kearsipan
29	85/2023	SOP Penataan Awal Penyimpanan Arsip
30	86/2023	SOP Pelayanan Peminjaman Arsip
31	87/2023	SOP Pelayanan Pengembalian Arsip
32	88/2023	SOP Pemantauan Peminjaman Boks Arsip
33	89/2023	SOP Mutasi Arsip atas Permohonan Eksternal
34	90/2023	SOP Mutasi Arsip atas Permohonan Internal
35	91/2023	SOP Laminasi Arsip Kartografi dan Kearsitekturan
36	92/2023	SOP Alih Media Arsip Kartografi ke Digital
37	93/2023	SOP Alih Media Arsip Tekstual ke Digital
38	94/2023	SOP Laminasi Arsip Tekstual
39	95/2023	SOP Promosi Jasa Kearsipan
40	96/2023	SOP Penjajajakan Layanan Jasa Kearsipan
41	97/2023	SOP Survei Kondisi Arsip Calon Pengguna Jasa
42	98/2023	SOP Pengurusan MoU/PKS Layanan Jasa Kearsipan
43	99/2023	SOP Monitoring dan Evaluasi Layanan Kearsipan
45	100/2023	SOP Survey Kepuasan Pengguna Jasa di Iingkungan Pusat Jasa Kearsipan

<u>Bulan Juni</u>

NO	NOMOR SOP	NAMA SOP
1	101/2023	SOP Penataan Arsip Kementerian/ Lembaga Yang Akan Pindah ke Ibu Kota Negara
2	103/2023	SOP Kick Off Meting dengan Perusahaan Jasa Penataan Arsip
3	104/2023	SOP Tinjauan Lapangan/ Survei Arsip
4	105/2023	SOP Bimbingan Teknis Kepada Pendamping Kementerina/ Lembaga
5	106/203	SOP Pembekalan Kepada Pelaksana Penata Arsip Perusahaan Jasa Penataan Arsip
6	107/2023	SOP Penyediaan Sarana dan Prasarana Penataan Arsip
7	108/2023	SOP Pemindahan Arsip Yang Akan Ditata ke Ruang Penataan Arsip
8	109/2023	SOP Pemilahan Arsip dan Pengelompokkan Arsip
9	110/2023	SOP Penyusunan Skema Pengaturan Arsip
10	111/2023	SOP Penginputan Deskripsi Arsip
11	112/2023	SOP Manuver Data dan Fisik Arsip
12	113/2023	SOP Penyimpanan Arsip di Ruang Penyimpanan Arsip
13	114/2023	SOP Penyeleksian dan Penyusunan Daftar Arsip
14	115/2023	SOP Input Daftar Arsip Hasil Penataan Arsip ke Aplikasi Srikandi
15	116/2023	SOP Verifikasi Hasil Penataan Arsip dan Uji Coba Penemuan Kembali
16	117/2023	SOP Pemantauan Kegiatan Penataan Arsip Kementerian/Lembaga Yang Akan Pindah ke IKN
17	118/2023	SOP Alih Pengetahuan Kepada Arsip Nasional RI dan Kementerian/ Lembaga dan Penyusunan Laporan Akhir Hasil Penataan

		Arsip
18	119/2023	SOP Serah Terima Pekerjaan
19	120/2023	SOP Penyusunan Buletin
20	121/2023	SOP Pengelolaan Website Pusdiklat
21	122/2023	SOP Penggunaan Studio Pembelajaran

Bulan JuliSOP PENYEDERHANAAN LAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN ANRI

NO	NOMOR SOP	NAMA SOP
1	53/2023	SOP Penyerahan Arsip Statis
2	55/2023	SOP Pemusnahan Arsip
3	183/2023	SOP Persetujuan atau Perimbangan JRA Pusat
4	184/2023	SOP Pemeriksaan Berkas JRA Wilayah Pusat
5	185/2023	SOP Persetujuan atau Pertimbangan JRA Pemerintah Daerah Wilayah II
6	186/2023	SOP Pemeriksaan Berkas JRA Wilayah I
7	209/2023	SOP Persetujuan atau Pertimbangan JRA Pemerintah Daerah Wilayah I
8	210/2023	SOP Pemeriksaan Berkas JRA Wilayah I
9	171/2023	SOP Layanan Restorasi Arsip Keluarga
10	172/2023	SOP Restorasi Arsip Keluarga (Ringan)
11	173/2023	SOP Restorasi Arsip Keluarga (Sedang)
12	174/2023	SOP Restorasi Arsip Keluarga (Berat)
13	187/2023	SOP Akreditasi Kearsipan
14	211/2023	SOP Pengawasan Kearsipan
15	170/2023	SOP Penataan Arsip Pusat Jasa
16	177/2023	SOP Layanan Jasa Pembuatan Pedoman

		Kearsipan
17	178/2023	SOP Layanan Jasa Pembuatan Program Aplikasi Sistem Kearsipan
18	179/2023	SOP Layanan Penyimpanan Arsip
19	180/2023	SOP Layanan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Arsip
20	181/2023	SOP Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Melalui Laminasi
21	182/2023	SOP Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Melalui Alih Media
22	203/2023	SOP Penyeleggaraan Diklat Kearsipan
23	204/2023	SOP Registrasi Peserta Diklat
24	205/2023	SOP Diklat Kerjasama
25	206/2023	SOP Registrasi Peserta Diklat Kerjasama
26	207/2023	SOP Sosialisasi Pengelolaan Arsip bagi Masyarakat
27	208/2023	SOP Pelaksanaan Diklat Teknis Kearsipan Bagi Masyarakat
28	167/2023	SOP Layanan Sertifikasi
29	168/2023	SOP Pelaksanaan Teknis
30	169/2023	SOP Penerapan Srikandi KP
31	175/2023	SOP Penerapan Srikandi KD II
32	176/2023	SOP Penerapan Srikandi KD I
33	80/2023	SOP Layanan Arsip Statis
34	188/2023	SOP Layanan Informasi Kearsipan Nasional- Registrasi Jaringan

Bulan Agustus

NO	NOMOR SOP	NAMA SOP
1	124/2023	SOP Revitalisasi Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa

2	125/2023	SOP Layanan Arsip Statis Korupsi Secara Daring
3	126/2023	SOP Pameran Arsip Statis Tema Korupsi
4	127/2023	SOP Layanan Arsip Statis Korupsi Secara Daring
5	128/2023	SOP Layanan Pemustaka
6	129/2023	SOP Pengendalian Mutu Pelaksanaan Pengawasan
7	130/2023	SOP Penyusunan Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter)
8	131/2023	SOP Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko di Lingkungan Inspektorat Berbasis Resiko di Inspektorat Arsip Nasional Republik Indonesia
9	132/2023	SOP Penelitian Ilmiah Tema Korupsi
10	133/2023	SOP Pengadaan Bahan Pustaka
11	134/2023	SOP Penguatan dan Perluasan Jejaring Pusat Studdi Arsip Pemberantasan Korupsi (Eksternal Arsip Nasional RI)
12	135/2023	SOP Penguatan dan Perluasan Jejaring Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi (Internal Arsip Nasional RI)
13	136/2023	SOP Penyiangan Bahan Pustaka
14	137/2023	SOP Sosialisasi Pusat Studi Pemberantasan Korups

Bulan September

NO	NOMOR SOP	NAMA SOP
1	138/2023	SOP Pengelolaan Kinerja UKPBJ
2	139/2023	SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa
3	140/2023	SOP Perencanaan Pengadaan

4 141/2023 SOP Persiapan Pengadaan 5 142/2023 SOP Persiapan Pemiihan Penyedia 6 143/2023 SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi 7 144/2023 SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi 8 145/2023 SOP Pengolahan Kontrak 9 146/2023 SOP Analisis Ketersediaan Pelaku Usaha dan Pembinaan Pelaku Usaha 10 147/2023 SOP Pengelolaan Resiko 11 148/2023 SOP Pengelolaan Resiko 12 149/2023 SOP Pengumpulan Dokumen Kinerja ANRI 13 150/2023 SOP Pengumpulan Dokumen Kinerja Unit Kerja 14 151/2023 SOP Pengumpulan Dokumen Kinerja Unit Kerja 14 151/2023 SOP Pengumpulan Dokumen Kinerja Unit Kerja 15 SOP Digitalisasi Arsip Terselektif pada Arsip Kementerian/Lembaga Yang Akan Pindah ke IKN (Makro) 15 152/2023 SOP Persiapan Digitalisasi Arsip Terselektif 16 153/2023 SOP Kick Off Meting Dengan Perusahaan Jasa Penataan Arsip 17 154/2023 SOP Tinjauan Lapangan/Survei dalam Rangka Digitasi Arsip 18 155/2023 SOP Bimbingan Teknis kepada Pendamping Kementerian/Lembaga 19 156/2023 SOP Bimbingan Teknis kepada Pendamping Kementerian/Lembaga yang akan pindah ke IKN 20 157/2023 SOP Digitasi Arsip Kementerian/ Lembaga yang akan pindah ke IKN 21 158/2023 SOP Digitasi Arsip Hasil Digitasi pada Aplikasi SRIKANDI 22 159/2023 SOP Pemantauan Kegiatan Digitasi Arsip Kementerian /Lembaga yang akan pindah ke IKN 23 160/2023 SOP Penghapusan File Hasil Digitasi 24 161/2023 SOP Alih Pengetahuan Kepada Arsip			
6 143/2023 SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi 7 144/2023 SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi 8 145/2023 SOP Pengolahan Kontrak 9 146/2023 SOP Analisis Ketersediaan Pelaku Usaha dan Pembinaan Pelaku Usaha 10 147/2023 SOP Pengelolaan Resiko 11 148/2023 SOP Registrasi dan Verifikasi 12 149/2023 SOP Pengumpulan Dokumen Kinerja ANRI 13 150/2023 SOP Pengumpulan Dokumen Kinerja Unit Kerja 14 151/2023 SOP Pengumpulan Dokumen Kinerja Unit Kerja 14 151/2023 SOP Pengumpulan Dokumen Kinerja Unit Kerja 15 SOP Digitalisasi Arsip Terselektif pada Arsip Kementerian/Lembaga Yang Akan Pindah ke IKN (Makro) 15 152/2023 SOP Persiapan Digitalisasi Arsip Terselektif 16 153/2023 SOP Persiapan Digitalisasi Arsip Terselektif 17 154/2023 SOP Fenjauan Lapangan/Survei dalam Rangka Digitasi Arsip 18 155/2023 SOP Tinjauan Lapangan/Survei dalam Rangka Digitasi Arsip 19 156/2023 SOP Bimbingan Teknis kepada Pendamping Kementerian/Lembaga 19 156/2023 SOP Penyiapan Prasarana dan Sarana Digitasi Arsip 20 157/2023 SOP Digitasi Arsip Kementerian/ Lembaga yang akan pindah ke IKN 21 158/2023 SOP Digitasi Arsip Kementerian/ Sop Penyangan Prasarana Digitasi Arsip Kementerian /Lembaga yang akan pindah ke IKN 22 159/2023 SOP Penghapusan File Hasil Digitasi Arsip Kementerian /Lembaga yang akan pindah ke IKN	4	141/2023	SOP Persiapan Pengadaan
7 144/2023 SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi 8 145/2023 SOP Pengolahan Kontrak 9 146/2023 SOP Analisis Ketersediaan Pelaku Usaha 10 147/2023 SOP Pengelolaan Resiko 11 148/2023 SOP Pengelolaan Resiko 11 148/2023 SOP Pengumpulan Dokumen Kinerja ANRI 12 149/2023 SOP Pengumpulan Dokumen Kinerja ANRI 13 150/2023 SOP Pengumpulan Dokumen Kinerja Unit Kerja 14 151/2023 SOP Digitalisasi Arsip Terselektif pada Arsip Kementerian/Lembaga Yang Akan Pindah ke IKN (Makro) 15 152/2023 SOP Persiapan Digitalisasi Arsip Terselektif 16 153/2023 SOP Persiapan Digitalisasi Arsip Terselektif 17 154/2023 SOP Kick Off Meting Dengan Perusahaan Jasa Penataan Arsip 18 155/2023 SOP Tinjauan Lapangan/Survei dalam Rangka Digitasi Arsip 19 156/2023 SOP Bimbingan Teknis kepada Pendamping Kementerian/Lembaga 19 156/2023 SOP Penyiapan Prasarana dan Sarana Digitasi Arsip 20 157/2023 SOP Digitasi Arsip Kementerian/ Lembaga yang akan pindah ke IKN 21 158/2023 SOP Input Arsip Hasil Digitasi pada Aplikasi SRIKANDI 22 159/2023 SOP Pemantauan Kegiatan Digitasi Arsip Kementerian /Lembaga yang akan pindah ke IKN 23 160/2023 SOP Penghapusan File Hasil Digitasi	5	142/2023	SOP Persiapan Pemiihan Penyedia
SOP Pengolahan Kontrak 9 146/2023 SOP Analisis Ketersediaan Pelaku Usaha 10 147/2023 SOP Pengelolaan Resiko 11 148/2023 SOP Pengelolaan Resiko 11 148/2023 SOP Pengumpulan Dokumen Kinerja ANRI 12 149/2023 SOP Pengumpulan Dokumen Kinerja ANRI 13 150/2023 SOP Pengumpulan Dokumen Kinerja Unit Kerja 14 151/2023 SOP Digitalisasi Arsip Terselektif pada Arsip Kementerian/Lembaga Yang Akan Pindah ke IKN (Makro) 15 152/2023 SOP Persiapan Digitalisasi Arsip Terselektif 16 153/2023 SOP Persiapan Digitalisasi Arsip Terselektif 17 154/2023 SOP Kick Off Meting Dengan Perusahaan Jasa Penataan Arsip 18 155/2023 SOP Tinjauan Lapangan/Survei dalam Rangka Digitasi Arsip 18 155/2023 SOP Bimbingan Teknis kepada Pendamping Kementerian/Lembaga 19 156/2023 SOP Penyiapan Prasarana dan Sarana Digitasi Arsip 20 157/2023 SOP Digitasi Arsip Kementerian/ Lembaga yang akan pindah ke IKN 21 158/2023 SOP Input Arsip Hasil Digitasi pada Aplikasi SRIKANDI 22 159/2023 SOP Pemantauan Kegiatan Digitasi Arsip Kementerian /Lembaga yang akan pindah ke IKN 23 160/2023 SOP Penghapusan File Hasil Digitasi	6	143/2023	SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi
9 146/2023 SOP Analisis Ketersediaan Pelaku Usaha 10 147/2023 SOP Pengelolaan Resiko 11 148/2023 SOP Registrasi dan Verifikasi 12 149/2023 SOP Pengumpulan Dokumen Kinerja ANRI 13 150/2023 SOP Pengumpulan Dokumen Kinerja Unit Kerja 14 151/2023 SOP Digitalisasi Arsip Terselektif pada Arsip Kementerian/Lembaga Yang Akan Pindah ke IKN (Makro) 15 152/2023 SOP Persiapan Digitalisasi Arsip Terselektif 16 153/2023 SOP Persiapan Digitalisasi Arsip Terselektif 17 154/2023 SOP Kick Off Meting Dengan Perusahaan Jasa Penataan Arsip 18 155/2023 SOP Tinjauan Lapangan/Survei dalam Rangka Digitasi Arsip 18 155/2023 SOP Bimbingan Teknis kepada Pendamping Kementerian/Lembaga 19 156/2023 SOP Penyiapan Prasarana dan Sarana Digitasi Arsip 20 157/2023 SOP Digitasi Arsip Kementerian/ Lembaga yang akan pindah ke IKN 21 158/2023 SOP Input Arsip Hasil Digitasi pada Aplikasi SRIKANDI 22 159/2023 SOP Pemantauan Kegiatan Digitasi Arsip Kementerian /Lembaga yang akan pindah ke IKN 23 160/2023 SOP Penghapusan File Hasil Digitasi	7	144/2023	SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi
dan Pembinaan Pelaku Usaha 10 147/2023 SOP Pengelolaan Resiko 11 148/2023 SOP Registrasi dan Verifikasi 12 149/2023 SOP Pengumpulan Dokumen Kinerja ANRI 13 150/2023 SOP Pengumpulan Dokumen Kinerja Unit Kerja 14 151/2023 SOP Digitalisasi Arsip Terselektif pada Arsip Kementerian/Lembaga Yang Akan Pindah ke IKN (Makro) 15 152/2023 SOP Persiapan Digitalisasi Arsip Terselektif 16 153/2023 SOP Persiapan Digitalisasi Arsip Terselektif 17 154/2023 SOP Kick Off Meting Dengan Perusahaan Jasa Penataan Arsip 18 155/2023 SOP Tinjauan Lapangan/Survei dalam Rangka Digitasi Arsip 18 155/2023 SOP Bimbingan Teknis kepada Pendamping Kementerian/Lembaga 19 156/2023 SOP Penyiapan Prasarana dan Sarana Digitasi Arsip 20 157/2023 SOP Digitasi Arsip Kementerian/ Lembaga yang akan pindah ke IKN 21 158/2023 SOP Input Arsip Hasil Digitasi pada Aplikasi SRIKANDI 22 159/2023 SOP Pemantauan Kegiatan Digitasi Arsip Kementerian /Lembaga yang akan pindah ke IKN 23 160/2023 SOP Penghapusan File Hasil Digitasi	8	145/2023	SOP Pengolahan Kontrak
11 148/2023 SOP Registrasi dan Verifikasi 12 149/2023 SOP Pengumpulan Dokumen Kinerja ANRI 13 150/2023 SOP Pengumpulan Dokumen Kinerja Unit Kerja 14 151/2023 SOP Digitalisasi Arsip Terselektif pada Arsip Kementerian/Lembaga Yang Akan Pindah ke IKN (Makro) 15 152/2023 SOP Persiapan Digitalisasi Arsip Terselektif 16 153/2023 SOP Kick Off Meting Dengan Perusahaan Jasa Penataan Arsip 17 154/2023 SOP Tinjauan Lapangan/Survei dalam Rangka Digitasi Arsip 18 155/2023 SOP Bimbingan Teknis kepada Pendamping Kementerian/Lembaga 19 156/2023 SOP Penyiapan Prasarana dan Sarana Digitasi Arsip 20 157/2023 SOP Digitasi Arsip Kementerian/ Lembaga yang akan pindah ke IKN 21 158/2023 SOP Input Arsip Hasil Digitasi pada Aplikasi SRIKANDI 22 159/2023 SOP Pemantauan Kegiatan Digitasi Arsip Kementerian /Lembaga yang akan pindah ke IKN 23 160/2023 SOP Penghapusan File Hasil Digitasi	9	146/2023	
12 149/2023 SOP Pengumpulan Dokumen Kinerja ANRI 13 150/2023 SOP Pengumpulan Dokumen Kinerja Unit Kerja 14 151/2023 SOP Digitalisasi Arsip Terselektif pada Arsip Kementerian/Lembaga Yang Akan Pindah ke IKN (Makro) 15 152/2023 SOP Persiapan Digitalisasi Arsip Terselektif 16 153/2023 SOP Kick Off Meting Dengan Perusahaan Jasa Penataan Arsip 17 154/2023 SOP Tinjauan Lapangan/Survei dalam Rangka Digitasi Arsip 18 155/2023 SOP Bimbingan Teknis kepada Pendamping Kementerian/Lembaga 19 156/2023 SOP Penyiapan Prasarana dan Sarana Digitasi Arsip 20 157/2023 SOP Digitasi Arsip Kementerian/ Lembaga yang akan pindah ke IKN 21 158/2023 SOP Input Arsip Hasil Digitasi pada Aplikasi SRIKANDI 22 159/2023 SOP Pemantauan Kegiatan Digitasi Arsip Kementerian /Lembaga yang akan pindah ke IKN 23 160/2023 SOP Penghapusan File Hasil Digitasi	10	147/2023	SOP Pengelolaan Resiko
SOP Pengumpulan Dokumen Kinerja Unit Kerja 14 151/2023 SOP Digitalisasi Arsip Terselektif pada Arsip Kementerian/Lembaga Yang Akan Pindah ke IKN (Makro) 15 152/2023 SOP Persiapan Digitalisasi Arsip Terselektif 16 153/2023 SOP Kick Off Meting Dengan Perusahaan Jasa Penataan Arsip 17 154/2023 SOP Tinjauan Lapangan/Survei dalam Rangka Digitasi Arsip 18 155/2023 SOP Bimbingan Teknis kepada Pendamping Kementerian/Lembaga 19 156/2023 SOP Penyiapan Prasarana dan Sarana Digitasi Arsip 20 157/2023 SOP Digitasi Arsip Kementerian/ Lembaga yang akan pindah ke IKN 21 158/2023 SOP Input Arsip Hasil Digitasi pada Aplikasi SRIKANDI 22 159/2023 SOP Pemantauan Kegiatan Digitasi Arsip Kementerian /Lembaga yang akan pindah ke IKN 23 160/2023 SOP Penghapusan File Hasil Digitasi	11	148/2023	SOP Registrasi dan Verifikasi
Kerja SOP Digitalisasi Arsip Terselektif pada Arsip Kementerian/Lembaga Yang Akan Pindah ke IKN (Makro) 15 152/2023 SOP Persiapan Digitalisasi Arsip Terselektif 16 153/2023 SOP Kick Off Meting Dengan Perusahaan Jasa Penataan Arsip 17 154/2023 SOP Tinjauan Lapangan/Survei dalam Rangka Digitasi Arsip 18 155/2023 SOP Bimbingan Teknis kepada Pendamping Kementerian/Lembaga 19 156/2023 SOP Penyiapan Prasarana dan Sarana Digitasi Arsip 20 157/2023 SOP Digitasi Arsip Kementerian/ Lembaga yang akan pindah ke IKN 21 158/2023 SOP Input Arsip Hasil Digitasi pada Aplikasi SRIKANDI 22 159/2023 SOP Pemantauan Kegiatan Digitasi Arsip Kementerian /Lembaga yang akan pindah ke IKN 23 160/2023 SOP Penghapusan File Hasil Digitasi	12	149/2023	SOP Pengumpulan Dokumen Kinerja ANRI
Kementerian/Lembaga Yang Akan Pindah ke IKN (Makro) 15 152/2023 SOP Persiapan Digitalisasi Arsip Terselektif 16 153/2023 SOP Kick Off Meting Dengan Perusahaan Jasa Penataan Arsip 17 154/2023 SOP Tinjauan Lapangan/Survei dalam Rangka Digitasi Arsip 18 155/2023 SOP Bimbingan Teknis kepada Pendamping Kementerian/Lembaga 19 156/2023 SOP Penyiapan Prasarana dan Sarana Digitasi Arsip 20 157/2023 SOP Digitasi Arsip Kementerian/ Lembaga yang akan pindah ke IKN 21 158/2023 SOP Input Arsip Hasil Digitasi pada Aplikasi SRIKANDI 22 159/2023 SOP Pemantauan Kegiatan Digitasi Arsip Kementerian /Lembaga yang akan pindah ke IKN 23 160/2023 SOP Penghapusan File Hasil Digitasi	13	150/2023	, ,
SOP Kick Off Meting Dengan Perusahaan Jasa Penataan Arsip 17 154/2023 SOP Tinjauan Lapangan/Survei dalam Rangka Digitasi Arsip 18 155/2023 SOP Bimbingan Teknis kepada Pendamping Kementerian/Lembaga 19 156/2023 SOP Penyiapan Prasarana dan Sarana Digitasi Arsip 20 157/2023 SOP Digitasi Arsip Kementerian/ Lembaga yang akan pindah ke IKN 21 158/2023 SOP Input Arsip Hasil Digitasi pada Aplikasi SRIKANDI 22 159/2023 SOP Pemantauan Kegiatan Digitasi Arsip Kementerian /Lembaga yang akan pindah ke IKN 23 160/2023 SOP Penghapusan File Hasil Digitasi	14	151/2023	Kementerian/Lembaga Yang Akan Pindah
Jasa Penataan Arsip 17 154/2023 SOP Tinjauan Lapangan/Survei dalam Rangka Digitasi Arsip 18 155/2023 SOP Bimbingan Teknis kepada Pendamping Kementerian/Lembaga 19 156/2023 SOP Penyiapan Prasarana dan Sarana Digitasi Arsip 20 157/2023 SOP Digitasi Arsip Kementerian/ Lembaga yang akan pindah ke IKN 21 158/2023 SOP Input Arsip Hasil Digitasi pada Aplikasi SRIKANDI 22 159/2023 SOP Pemantauan Kegiatan Digitasi Arsip Kementerian /Lembaga yang akan pindah ke IKN 23 160/2023 SOP Penghapusan File Hasil Digitasi	15	152/2023	SOP Persiapan Digitalisasi Arsip Terselektif
Rangka Digitasi Arsip 18 155/2023 SOP Bimbingan Teknis kepada Pendamping Kementerian/Lembaga 19 156/2023 SOP Penyiapan Prasarana dan Sarana Digitasi Arsip 20 157/2023 SOP Digitasi Arsip Kementerian/ Lembaga yang akan pindah ke IKN 21 158/2023 SOP Input Arsip Hasil Digitasi pada Aplikasi SRIKANDI 22 159/2023 SOP Pemantauan Kegiatan Digitasi Arsip Kementerian /Lembaga yang akan pindah ke IKN 23 160/2023 SOP Penghapusan File Hasil Digitasi	16	153/2023	
Pendamping Kementerian/Lembaga 19 156/2023 SOP Penyiapan Prasarana dan Sarana Digitasi Arsip 20 157/2023 SOP Digitasi Arsip Kementerian/ Lembaga yang akan pindah ke IKN 21 158/2023 SOP Input Arsip Hasil Digitasi pada Aplikasi SRIKANDI 22 159/2023 SOP Pemantauan Kegiatan Digitasi Arsip Kementerian /Lembaga yang akan pindah ke IKN 23 160/2023 SOP Penghapusan File Hasil Digitasi	17	154/2023	, , ,
Digitasi Arsip 20 157/2023 SOP Digitasi Arsip Kementerian/ Lembaga yang akan pindah ke IKN 21 158/2023 SOP Input Arsip Hasil Digitasi pada Aplikasi SRIKANDI 22 159/2023 SOP Pemantauan Kegiatan Digitasi Arsip Kementerian /Lembaga yang akan pindah ke IKN 23 160/2023 SOP Penghapusan File Hasil Digitasi	18	155/2023	
yang akan pindah ke IKN 21 158/2023 SOP Input Arsip Hasil Digitasi pada Aplikasi SRIKANDI 22 159/2023 SOP Pemantauan Kegiatan Digitasi Arsip Kementerian /Lembaga yang akan pindah ke IKN 23 160/2023 SOP Penghapusan File Hasil Digitasi	19	156/2023	· ·
SRIKANDI 22 159/2023 SOP Pemantauan Kegiatan Digitasi Arsip Kementerian /Lembaga yang akan pindah ke IKN 23 160/2023 SOP Penghapusan File Hasil Digitasi	20	157/2023	,
Kementerian /Lembaga yang akan pindah ke IKN 23 160/2023 SOP Penghapusan File Hasil Digitasi	21	158/2023	
	22	159/2023	Kementerian /Lembaga yang akan pindah
24 161/2023 SOP Alih Pengetahuan Kepada Arsip	23	160/2023	SOP Penghapusan File Hasil Digitasi
<u> </u>	24	161/2023	SOP Alih Pengetahuan Kepada Arsip

		Nasional RI dan Kementerian/ Lembaga dan Penyusunan Laporan Akhir Hasil Digitasi Arsip
25	162/2023	SOP Serah Terima Pekerjaan Digitasi Arsip
26	164/2023	SOP Layanan Penggunaan Pusat Data Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika
27	165/2023	SOP Layanan Helpdesk Penggunaan Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika
28	166/2023	SOP Penilaian Penerapan Pengendalian Intern Atas Laporan Keuangan (PIPK)
29	167/2023	SOP Layanan Sertifikasi SDM Kearsipan
30	168/2023	SOP Pelaksanaan Sertifikasi SDM Kearsipan
31	169/2023	SOP Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)
32	170/2023	SOP Penataan Arsip di Lingkungan Pusat Jasa Kearsipan
33	171/2023	SOP Layanan Restorasi Arsip Keluarga
34	172/2023	SOP Restorasi Arsip Keluarga (Ringan)
35	173/2023	SOP Restorasi Arsip Keluarga (Sedang)
36	174/2023	SOP Restorasi Arsip Keluarga (Berat)

Bulan Oktober

NO	NOMOR SOP	NAMA SOP
1	176/2023	SOP Penerapan Sistem Informasi Keasipan Dinamis Terintegrasi (SRIANDI)
2	177/2023	SOP Layanan Jasa Pembuatan Pedoman Kearsipan
<u>3</u>	178/2023	SOP Layanan Jasa Pembuatan Program Aplikasi Sistem Kearsipan
<u>4</u>	179/2023	SOP Layanan Penyimpanan Arsip

<u>5</u>	180/2023	SOP Layanan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Arsip
<u>6</u>	181/2023	SOP Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Melalui Laminasi
7	182/2023	SOP Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Melalui Alih Media

Bulan Nopember

1	183/2023	SOP Persetujuan atau Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip pada Lembaga Negara, Perusahaan, Orpol, Ormas dan PTN
2	184/2023	SOP Pemeriksaan Berkas Jadwal Retensi Arsip pada Lembaga Negara, Perusahaan, Orpol, Ormas dan PTN
3	185/2023	SOP Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah Propinsi Kabupaten/Kota, dan BUMD pada Wilayah Daerah II
4	186/2023	SOP Pemerikssaan Berkas Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah Propinsi Kabupaten/Kota, dan BUMD pada Wilayah II
5	187/2203	SOP Pelaksanaan Akreditasi Kearsipan
6	188/2023	SOP Layanan Jaringan Infromasi Kearsipan Nasional: Registrasi Simpul Jaringan
7	189/2023	SOP Peningkatan Infrastruktur
8	190/2023	SOP Migrasi Data ke JIKN
9	191/2023	SOP Backup Data
10	192/2023	SOP Nominasi Arsip sebagai Memory of the World (MoW) Penominasian Bersama
11	193/2023	SOP Nominasi Arsip sebagai Memory of the World (MoW) Penominasian Tunggal

12	194/2023	SOP Telaah Signifikansi Arsip
13	195/2023	SOP Pengunggahan Daftar Arsip Yang Akan Dinominasikan
14	196/2023	SOP Pembuatan Agreement Granting Non-Exclusive Right
15	197/2023	SOP Pembuatan Visualisasi
16	198/2023	SOP Konsultasi Pakar dan Stakeholder
17	199/2023	SOP Konsultasi Komite MoW Indonesia
18	200/2023	SOP Publikasi Penominasian Arsip
19	201/2023	SOP Penandatanganan Formulir dan Penggalangan Dukungan Bersama
20	202/2023	SOP Pengiriman (Submit) Berkas Nominasi dan Berkas Pendukung
21	203/2023	SOP Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan
22	204/2023	SOP Registrasi Peserta Diklat
23	205/2023	SOP Diklat Kerjasama (PNBP)
24	206/2023	SOP Registrasi Peserta Diklat Kerjasama (PNBP)
25	207/2023	SOP Sosialisasi Pengelolaan Arsip Bagi Masyarakat
26	208/2023	SOP Diklat Teknis Kearsipan Bagi Masyarakat
27	209/2023	SOP Persetujuan atau Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota dan BUMD pada wilayah daerah I
28	210/2023	SOP Pemeriksaan Berkas Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah Propinsi Kabupaten/Kota, dan BUMD pada Wilayah Daerah I
29	211/2023	SOP Pengawasan Kearsipan
30	212/2023	SOP Pengurusan Telepon Masuk dan Keluar

31	213/2023	SOP Perawatan Kendaraan Dinas Eselon I II dan Kendaraan Operasional Unit
32	214/2023	SOP Pelayanan Penggunaan Ruang Rapat dan Konsumsi
33	215/2023	SOP Pengurusan STNK Roda Empat dan Roda Dua
34	216/2023	SOP Pelayanan Permintaan Pengemudi dan Peminjaman Kendaraan Dinas Operasiona
35	217/2023	SOP Pengadaan Bahan Bakar Khusus (BBK)
36	218/2023	SOP Finalisasi Keputusan Kepala
37	219/2023	SOP Pengelolaan Alat dan Bahan Kimia Laboratorium
38	220/2023	SOP Pengujian Prasarana Penyimpanan Arsip
39	221/2023	SOP Penilaian Kerusakan Arsip di Arsip Nasional Republik Indonesia
40	222/2023	SOP Penilaian Resiko Kerusakan Arsip Kertas di Lembaga Kearsipan (Propinsi/Kabupaten/Kota/Perguruan Tinggi)
41	223/2023	SOP Pengujian Sarana Kearsipan
42	224/2023	SOP Pengujian Autensitas Arsip Statis

Bulan Desember

NO	NOMOR SOP	NAMA SOP
1	225/2023	SOP Pelaksanaan Orientasi CPNS
2	226/2023	SOP Pelaksanaan Orientasi PPPK
3	227/2023	SOP Magang CPNS di Unit Kerja
4	228/2023	SOP Penguslan Pelatihan Dasar CPNS
5	229/2023	SOP Penugasan Pelatihan Dasar CPNS

6	230/2023	SOP Pengusulan Pelatihan Teknis
7	231/2023	SOP Penugasan Pelatihan Teknis
8	232/2023	SOP Pengusulan Pelatihan Fungsional
9	233/2023	SOP Penugasan Pelatihan Fungsional
10	234/2023	SOP Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan
11	235/2023	SOP Pengajuan Seminar/ Bimbingan Teknis/Workshop
12	236/2023	SOP Evaluasi Pelatihan
13	237/2023	SOP Pemberian Tugas Belajar Biaya Mandiri
14	238/2023	SOP Pemberian Tugas Belajar Biaya Mandiri Yang Diberhentikan Dari Jabatan
15	239/2023	SOP Pemberian Tugas Belajar Beasiswa
16	240/2023	SOP Penilaian Potensi dan Kompetensi oleh Penyedia Jasa
17	241/2023	SOP Penilaian Potensi dan Kompetensi oleh Penyedia Jasa
18	242/2023	SOP Penilaian Potensi dan Kompetensi Dengan Metode Lainnya
19	243/2023	SOP Penilaian Potensi dan Kompetensi Degan Metode Assesment Center
20	244/2023	SOP Penginputan Data Pada Aplikasi Talent Pool
21	245/2023	SOP Pemberian Feedback Penilaian Kompetensi
22	246/2023	SOP Pelayanan Klinik
23	247/2023	SOP Persiapan Pemeriksaan Kesehatan Berkala
24	248/2023	SOP Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Berkala
25	249/2023	SOP Pengujian Kesehatan
26	250/2023	SOP Pemeriksaan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Menteri (Jamkesmen)

27	251/2023	SOP Bantuan Tenaga Kesehatan
28	252/2023	SOP Pemeriksaan Narkoba
29	253/2023	SOP Pelayanan Konseling Psikologi

052. Penyusunan Analisis Jabatan di Lingkungan ANRI

Selama tahun 2023 capaian kinerja organisasi untuk penyusunan analisis jabatan di lingkungan ANRI sebagai berikut :

Bulan Januari

- a. Penyusunan Konsep Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Peta Jabatan Arsip Nasional Republik Indonesia tahun 2023;
- b. Telah disusun Analisis Jabatan sebanyak 174 Jabatan;
- c. Penyampaian permohonan role / kewenangan Perencanaan SIASN kepada Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN Badan Kepegawaian Negara melalui surat Sekretaris Utama nomor : B-OT.04/203/2023.

Bulan Februari

- a. Tindak lanjut atas pemberian role / kewenangan Perencanaan Kebutuhan ASN BKN melalui surat Sekretaris Utama nomor : B-OT.04/203/2023, dengan mengundang Narasumber BKN dan mengadakan Bimbingan Teknis Aplikasi Perencanaan SIASN;
- b. Telah disusun Analisis Jabatan sebanyak 172 jabatan dan yang terverifikasi sebanyak 108 jabatan.

Bulan Maret

- a. Telah dilakukan Rapat Pembahasan Nomenklatur Jabatan Pelaksana di lingkungan ANRI sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri PANRB Nomor 1103 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS di lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Telah dilakukan Sosialisasi Nomenklatur Jabatan Pelaksana di lingkungan ANRI oleh Kementerian PANRB;
- c. Telah disusun Analisis Jabatan sebanyak 174 jabatan dan yang terverifikasi sebanyak 116 jabatan.

Bulan April

Tidak ada kegiatan untuk penyusunan analisis jabatan.

<u>Bulan Mei</u>

a. Telah dilakukan pembahasan perubahan Keputusan Kepala ANRI tentang peta jabatan untuk memuat nomenklatur Jabatan Pelaksana yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri PANRB Nomor 1103 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS di lingkungan Instansi Pemerintah.

Bulan Juni

a. Mengikuti kegiatan fasilitasi dan pembinaan perencanaan kebutuhan pegawai ASN khususnya materi layanan perencanaan SIASN terkait tata cara input analisis jabatan.

Bulan Juli

Tidak ada kegiatan untuk penyusunan analisis jabatan.

Bulan Agustus

a. Telah dilakukan input data pada aplikasi Perencanaan SIASN sebanyak
 100 analisis jabatan sampai dengan bulan Agustus 2023.

Bulan September

a. Telah disusun analisis jabatan sebanyak 225 jabatan, diverifikasi sebanyak 144 jabatan, dan diinput ke dalam aplikasi Perencanaan SIASN sebanyak 111 jabatan.

Bulan Oktober

a. Telah disusun analisis jabatan sebanyak 255 jabatan, diverifikasi sebanyak 192 jabatan, dan diinput ke dalam aplikasi Perencanaan SIASN sebanyak 180 jabatan.

Bulan November

a. Telah disusun analisis jabatan sebanyak 276 jabatan, diverifikasi sebanyak 254 jabatan, dan diinput ke dalam aplikasi Perencanaan SIASN sebanyak 246 jabatan.

Bulan Desember

a. Telah disusun analisis jabatan sebanyak 285 jabatan, diverifikasi sebanyak 282 jabatan, dan diinput ke dalam aplikasi Perencanaan SIASN sebanyak 279 jabatan.

053. Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja ANRI

Selama tahun 2023 capaian kinerja organisasi untuk penyusunan organisasi dan tata kerja ANRI sebagai berikut:

Bulan Januari

- a. Telah dilakukan paraf persetujuan naskah rancangan Peraturan Presiden tentang ANRI oleh Kepala ANRI dan disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara. Namun terdapat hambatan berupa adanya ketidakcermatan dalam proses penyusunan Rancangan Perpres ANRI yang berpengaruh pada peraturan ANRI tentang OTK ANRI sebagai peraturan turunanannya. Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan Rapat Pimpinan yang disepakati untuk menyusun 2 alternatif PerANRI tentang OTK, dimana Alternatif 1 akan dilakukan tukar/reposisi antara Direktorat Layanan dan Pemanfaatan dengan Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan, sedangkan Alternatif 2 adalah posisi yang tetap dimana untuk fungsi yang belum terakomodir secara eksplisit pada Raperpres dapat diakomodir oleh fungsi "pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala".
- b. Telah dilakukan 3 kali Rapat Penyusunan Konsep OTK ANRI sebagai turunan Perpres tentang ANRI.
- c. Mengikuti kegiatan Koordinasi Validasi Hasil Evaluasi Kelembagaan Mandiri ANRI yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB.

Bulan Februari

Telah dilakukan 1 kali Rapat Penyusunan Konsep OTK ANRI sebagai turunan Perpres tentang ANRI untuk merumuskan Eselon II ke bawah ANRI, pada bulan Februari 2023 dan saat itu sudah mulai proses penyusunan rancangan PerANRI tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI.

Bulan Maret

- a. Telah dilakukan Rapat Pembahasan Terjemahan PerANRI. No. 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI ke dalam Bahasa Inggris untuk keperluan kerja sama / kemitraan ANRI dengan pihak luar negeri.
- b. Telah dilakukan 2 kali Rapat Pimpinan Pembahasan Penyusunan Konsep OTK ANRI pada bulan Maret 2023 sebagai turunan Perpres tentang ANRI untuk merumuskan Eselon II ke bawah ANRI, dan saat bulan Maret sedang dalam proses merekapitulasi masukan setiap unit kerja terhadap rancangan PerANRI tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI.

Bulan April

- a. Telah dilakukan Rapat Lanjutan Pembahasan Terjemahan PerANRI. No. 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI ke dalam Bahasa Inggris untuk keperluan kerja sama / kemitraan ANRI dengan pihak luar negeri. Namun terdapat hambatan berupa adanya perbedaan penggunaan kata Indonesia-Inggris dalam proses terjemahan antara unit Kerja Sama dengan Penerjemah. Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah Penerjemah meminta masukan dari para peserta rapat secara tertulis sebagai bahan revisi bagi penerjemah, dan akan dilakukan rapat lanjutan.
- b. Telah dilakukan Rapat Pimpinan ke-3 Pembahasan Penyusunan Konsep OTK ANRI atas masukan setiap unit kerja dalam rangka merumuskan Eselon II ke bawah ANRI. Namun saat itu terdapat hambatan yakni Bapak Kepala ANRI belum menyetujui fungsi pada konsep Deputi Bidang Tata Kelola Kearsipan Nasional dan Deputi Bidang Sistem dan Informasi Kearsipan Nasional. Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah Tim Sekretariat Perumus merumuskan kembali bersama unit kerja terkait.

Bulan Mei

- Rapat Pembahasan rumusan OTK 4 Direktorat pada Deputi Bidang Tata Kelola Kearsipan Nasional.
- b. Rapat Pembahasan mengenai penempatan tugas dan fungsi Sertifikasi pada OTK ANRI dengan ketiga alternatif yakni apabila ditempatkan pada Direktorat SDMKS, Pusdiklat Kearsipan, serta Pusat Akreditasi Kearsipan.
- c. Rapat Finalisasi Pembahasan Terjemahan PerANRI tentang OTK ke dalam Bahasa Inggris.
- d. Rapat Koordinasi terkait penyusunan tugas dan fungsi Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan pada OTK ANRI.

Bulan Juni

- a. Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Tugas dan Fungsi Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan.
- b. Rapat Pimpinan ke-4 Pembahasan Organisasi ANRI pada tanggal 7 Juni 2023 yang telah membahas tugas dan fungsi pada keempat Direktorat

- di lingkungan Deputi Bidang Tata Kelola Kearsipan Nasional serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
- c. Rapat Pembahasan Tugas dan Fungsi Direktorat di lingkungan Deputi Bidang Sistem dan Informasi Kearsipan Nasional.
- d. Rapat Internal Tim Sekretariat Perumus OTK ANRI pada tanggal 16 Juni 2023 yang merumuskan tugas dan fungsi pada ketiga Direktorat di lingkungan Deputi Bidang Sistem dan Informasi Kearsipan Nasional serta memberi penguatan pada tugas Subbagian Perlengkapan, Rumah Tangga, dan Pengamanan sesuai masukan dari LKPP guna meningkatkan indeks RB ANRI pada komponen nilai RB General.
- e. Rapat Pimpinan ke-5 Pembahasan Organisasi ANRI.

Bulan Juli

- a. Rapat Pimpinan ke-6 Pembahasan Organisasi ANRI pada tanggal 6 Juli 2023 yang telah mereview kembali keseluruhan rancangan PerANRI tentang OTK ANRI. Namun saat itu terdapat hambatan yakni terkait template penulisan Bab Tata Kerja yang masih dikritisi oleh Pimpinan. Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mendiskusikan hal tersebut pada saat rapat dengan Kementerian PANRB.
- b. Rapat Terbatas Rancangan OTK ANRI pada tanggal 25 Juli 2023 yang mereview kembali rancangan PerANRI tentang OTK ANRI.
- c. Merumuskan Naskah Urgensi/Policy Paper Penyusunan Rancangan Peraturan ANRI tentang OTK ANRI yang digunakan sebagai lampiran Surat Penyampaian Rancangan PerANRI kepada Menteri PANRB.
- d. Penyampaian Rancangan PerANRI tentang OTK ANRI (Perubahan).

Bulan Agustus

- a. Melakukan Rapat Pembahasan SE Menpan No. 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyesuaian Sistem Kerja dalam rangka Evaluasi RB Tahun 2023 pada tanggal 14 Agustus 2023.
- b. Menindaklanjuti SE Menpan No. 15 Tahun 2023 dengan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kelembagaan Tahun 2023 yakni dengan membentuk Tim, menyusun Timeline Kegiatan Evaluasi Kelembagaan 2023, serta mempersiapkan kegiatan Sosialiasi

Evaluasi Kelembagaan. Namun saat itu terdapat hambatan yakni lamanya proses mendapatkan informasi tentang Narasumber Kementerian PANRB. Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan terus berkoordinasi dengan Kementerian PANRB.

c. Penyampaian Surat Plh. Kepala ANRI kepada Menteri PANRB Nomor: B-OT.00/3210/2023 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan ANRI tentang Perubahan OTK ANRI pada tanggal 28 Juli 2023. Namun saat itu terdapat hambatan yakni pihak Kementerian PANRB belum menindaklanjutinya. Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah pihak ANRI meningkatkan koordinasi dengan pihak Kementerian PANRB.

Bulan September

- a. Menindaklanjuti SE Menpan No. 15 Tahun 2023 dengan melaksanakan kegiatan Evaluasi Kelembagaan Tahun 2023 yakni sejak tanggal 29 Agustus 29 September yang terdiri dari kegiatan Sosialisasi, Pengisian 5 kuesioner untuk 1 Tim Organization Wide Level (ANRI) dan 4 Tim Suborganization Wide Level (Debin, Dekon, Dep. IPSK, serta Sestama), pengolahan data, serta penyusunan laporan. Namun saat itu terdapat hambatan yakni sempitnya waktu yang tersedia dalam melakukan proses Evaluasi Kelembagaan serta kurangnya pemahaman Tim Pelaksana Evaluasi Kelembagaan dalam melakukan pengisian kuesioner. Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah Tim Organisasi dan Stankom melakukan pengisian kuesioner terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan FGD dengan Tim Pelaksana Evaluasi Kelembagaan masing-masing (5 Tim) untuk mendapatkan kesepakatan dalam pengisian kuesioner.
- b. Melakukan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Usul Perubahan OTK ANRI dengan Kementerian PANRB sebanyak 2 kali yakni pada tanggal 20 September 2023 dan 22 September 2023. Namun saat itu terdapat hambatan yakni masih adanya ketidaksepakatan konsep organisasi yang ANRI ajukan dengan tanggapan dari Kementerian PANRB. Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah ANRI

melakukan rapat internal untuk memberi penjelasan kembali kepada Kementerian PANRB.

Bulan Oktober

- a. Penyusunan pemetaan tugas dan fungsi yang terkait dengan 'data dan informasi' sebagai bahan masukan pembahasan dengan Kementerian PANRB. Namun saat itu terdapat hambatan berupa belum ada jawaban kejelasan dari Kementerian PANRB terkait konsep penempatan tugas dan fungsi 'data dan informasi' di ANRI. Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan rapat pembahasan kembali antara ANRI dengan Kementerian PANRB.
- b. Menyampaikan Hasil Evaluasi Kelembagaan ANRI Tahun 2023 kepada Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB melalui Surat Sekretaris Utama Nomor B-OT.00/4406/2023 tanggal 3 Oktober 2023.

Bulan November

- a. Melakukan Rapat ke-3 Pembahasan OTK bersama Kementerian PANRB. Namun masih terdapat beberapa hal yang belum sepakat antara ANRI dengan Kementerian PANRB. Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah ANRI melakukan rapat internal untuk menjawab ketidaksepakatan dari Kementerian PANRB.
- b. Melakukan rapat penuangan pola rancangan PerANRI tentang OTK ANRI sebagai tindak lanjut hasil Rapat ke-3 Pembahasan OTK bersama Kementerian PANRB. Dan disepakati untuk memilih pola yang rinci namun tetap menggunakan template dari Kementerian PANRB.

Bulan Desember

- a. Melakukan Rapat Pembahasan OTK ANRI bersama Sestama dan Plt.
 Kepala ANRI pada tanggal 15 Desember 2023.
- b. Melakukan Rapat ke-4 Pembahasan OTK bersama Kementerian PANRB pada tanggal 20 Desember 2023.
- c. Telah disampaikan hasil rancangan Rapat ke-4 Pembahasan OTK bersama Kementerian PANRB pada tanggal 22 Desember 2023, dan memperoleh Surat Menteri PANRB Nomor B/1387/M.KT.01/2023 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja ANRI yang pada prinsipnya

Kementerian PANRB telah menyetujui penataan organisasi dan tata kerja ANRI.

054. Penerapan Analisis Beban Kerja di Lingkungan ANRI

Selama tahun 2023 capaian kinerja organisasi untuk penerapan analisis beban kerja di lingkungan ANRI sebagai berikut :

Bulan Januari

a. Tindak lanjut nota dinas Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan terkait penyampaian telaahan staf kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah dengan mengadakan sosialisasi terkait Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah dan Pedoman Penghitungan Kebutuhan dari BRIN.

Bulan Februari

a. Tindak lanjut Surat LKPP No. 3736/D.3/02/2023 tanggal 8 Februari 2023 perihal Penyampaian dan Permohonan Tanggapan terhadap Hasil Perhitungan Kebutuhan JF PPBJ mengacu pada Peraturan Menteri PANRB 29/2020 dengan melakukan kegiatan Sosialisasi JF PPBJ dan Pedoman Penghitungan Kebutuhan.

Bulan Maret

a. Telah dilakukan Rapat Penyusunan Surat Tanggapan Formasi JF PPBJ sebagai tindak lanjut dari sosialisasi JF PPBJ dan pedoman penghitungan kebutuhan.

Bulan April

- a. Telah dilakukan Sosialisasi Pengisian Usul Kebutuhan ASN ANRI tahun 2023 melalui e-formasi;
- Telah dilakukan rapat tindak lanjut revisi penghitungan kebutuhan JF PPBJ; serta
- c. Telah dilakukan sosialisasi JF Analis Pengembangan Kompetensi ASN dan pedoman penghitungan kebutuhan.

Bulan Mei

Tidak ada kegiatan untuk penerapan analisis beban kerja.

Bulan Juni

a. Telah dilakukan Sosialisasi JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN serta pedoman penghitungan kebutuhannya;

- b. Telah dilakukan rapat koordinasi penghitungan ABK JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa bersama instansi pembina LKPP; serta
- c. Telah dilakukan rapat penghitungan ABK JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN di lingkungan Satker ANRI Pusat, Pusat Jasa Kearsipan, dan Pusdiklat Kearsipan.

Bulan Juli

- a. Telah dilakukan penghitungan ABK JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN Satker ANRI Pusat, Pusatklat Kearsipan, Pusat Jasa Kearsipan, dan BAST; serta
- b. Telah dilakukan sosialisasi dan simulasi penghitungan kebutuhan JF Perencana dengan Pusbindiklatren Bappenas.

Bulan Agustus

Tidak ada kegiatan untuk penerapan analisis beban kerja.

Bulan September

Tidak ada kegiatan untuk penerapan analisis beban kerja.

Bulan Oktober

Tidak ada kegiatan untuk penerapan analisis beban kerja.

Bulan November

Tidak ada kegiatan untuk penerapan analisis beban kerja.

Bulan Desember

Tidak ada kegiatan untuk penerapan analisis beban kerja.

055. Monitoring dan Evaluasi Proses Bisnis

Selama tahun 2023, capaian kinerja kegiatan Monitoring dan Evaluasi Proses Bisnis

Bulan Januari

Menyusun agenda kegiatan penyusunan proses bisnis tahun 2023 Bulan Februari

Bulan Februari

-

Bulan Maret

Rapat Persiapan Penyusunan Probis

Bulan April

Rapat Penyusunan Probis

Bulan Mei

- 1. Rapat Penyusunan Proses Bisnis Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan
- 2. Rapat Penyusunan Proses Bisnis Deputi Bidang Konservasi Arsip
- Rapat Penyusunan Proses Bisnis Deputi Biang Informasi dann Pengembangan Sistem Kearsipan

Bulan Juni

_

Bulan Juli

Monitoring dan Evaluasi Proses Bisnis

Bulan Agustus

-

Bulan September

_

Bulan Oktober

-

Bulan Nopember

_

<u>Bulan Desember</u>

_

056. Penyempurnaan Evaluasi Jabatan di Lingkungan ANRI

Selamat tahun 2023 capaian kinerja organisasi untuk penyempurnaan evaluasi jabatan di lingkungan ANRI sebagai berikut :

Bulan Januari

Tidak ada kegiatan untuk penyempurnaan evaluasi jabatan.

<u>Bulan Februari</u>

Tidak ada kegiatan untuk penyempurnaan evaluasi jabatan.

Bulan Maret

Tidak ada kegiatan untuk penyempurnaan evaluasi jabatan.

Bulan April

Tidak ada kegiatan untuk penyempurnaan evaluasi jabatan.

Bulan Mei

a. Telah dilakukan penyesuian evaluasi jabatan untuk nomenklatur jabatan pelaksana yang baru sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri

- PANRB Nomor 1103 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS di lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Penyampaian hasil evaluasi jabatan dan peta jabatan yang disesuaikan untuk nomenklatur Jabatan Pelaksana di ANRI kepada Kementerian PANRB untuk divalidasi.

<u>Bulan Juni</u>

 a. Penyampaian revisi lampiran usulan validasi penyesuaian peta jabatan dan hasil evaluasi jabatan bagi Jabatan Pelaksana di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Bulan Juli

Tidak ada kegiatan untuk penyempurnaan evaluasi jabatan.

Bulan Agustus

a. Penyampaian usulan validasi evaluasi jabatan untuk Jabatan Struktural Kepala Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan, Kepala Subbagian Umum Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan, serta Jabatan Fungsional Auditor Utama, Analis Kebijakan Ahli Madya dan Utama, Penerjemah Ahli Madya, Pranata Komputer Ahli Utama, Pustakawan Ahli Madya, Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya, serta Perawat Ahli Pertama dan Ahli Muda.

Bulan September

a. Pengajuan usulan validasi kelas jabatan untuk JF Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya ke Kementerian PANRB.

Bulan Oktober

Tidak ada kegiatan untuk penyempurnaan evaluasi jabatan.

Bulan November

Tidak ada kegiatan untuk penyempurnaan evaluasi jabatan.

Bulan Desember

a. Telah diusulkan permohonan validasi evaluasi jabatan untuk Tenaga Kesehatan di lingkungan ANRI kepada Menteri PANRB seperti Jabatan Fungsional Dokter Ahli Pertama, Apoteker Ahli Pertama, dan Asisten Apoteker Terampil.

057. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan ANRI

Selama tahun 2023 capaian kinerja organisasi untuk penyusunan standar kompetensi jabatan di lingkungan ANRI sebagai berikut:

Bulan Januari

Melakukan pengumpulan data terkait nomenklatur terbaru Jabatan Pelaksana yang akan disusun Standar Kompetensi Jabatannya.

Bulan Februari

Melakukan identifikasi kompetensi Jabatan Pelaksana dengan nomenklatur baru.

Bulan Maret

Melakukan Rapat Penyusunan Persyaratan Jabatan.

Bulan April

Mengumpulkan data tambahan terkait nomenklatur terbaru Jabatan Pelaksana yang akan disusun Standar Kompetensi Jabatannnya.

Bulan Mei

Mengumpulkan data tambahan terkait nomenklatur terbaru Jabatan Pelaksana yang akan disusun Standar Kompetensi Jabatannnya.

Bulan Juni

Mengidentifikasi data kompetensi Jabatan Struktural ANRI yang akan disusun kembali Standar Kompetensi Jabatannnya.

Bulan Juli

Mengidentifikasi data kompetensi Jabatan Struktural ANRI yang akan disusun kembali Standar Kompetensi Jabatannnya.

Bulan Agustus

Mengidentifikasi kompetensi untuk dilakukan penyusunan kamus kompetensi.

Bulan September

Melakukan identifikasi kompetensi JPT/Struktural dari Perpres No. 23 Tahun 2023 tentang ANRI.

Bulan Oktober

a. Melakukan 2 kali rapat pembahasan Standar Kompetensi Jabatan Struktural ANRI pada tanggal 10 dan 16 Oktober 2023. Namun saat itu terdapat hambatan berupa adanya beberapa perbedaan pemahaman terkait pengisian form Stankomjab. Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mendiskusikan bersama

- Kementerian PANRB agar mendapatkan kepastian dalam pengisian Stankomjab.
- b. Mengadakan Rapat Koordinasi Penyusunan Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan ANRI bersama dengan Kementerian PANRB pada tanggal 26 – 27 Oktober 2023 dengan tujuan untuk menyusun Stankomjab Struktural ANRI. Namun terdapat hambatan berupa belum ditetapkannya SOTK baru ANRI, sehingga stankomjab yang disusun pun belum bisa ditetapkan. Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan rapat pembahasan kembali bersama Kementerian PANRB terkait SOTK ANRI.

Bulan November

a. Melakukan verifikasi terhadap 3 file Standar Kompetensi Jabatan Struktural. Namun terdapat hambatan berupa masih adanya perubahan-perubahan terhadap konsep SOTK dari Kementerian PANRB, dimana SOTK tersebut merupakan bahan dalam pengisian Stankomjab. Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan meningkatkan koordinasi bersama Kementerian PANRB.

Bulan Desember

Melakukan verifikasi terhadap 14 file Standar Kompetensi Jabatan Struktural.

C. Layanan Umum

Pada bulan Januari s.d. Desember pada Tahun 2023, Layanan Umum telah dilaksanakan sesuai dengan realisasi capaian kinerja pada matrik capaian realisasi fisik dan keuangan yaitu sebagai berikut:

Tabel 15 Capaian Kinerja Layanan Umum

No	Bulan	Capaian Realisasi Keuangan (%)	Capaian Realisasi Fisik (jumlah bulan layanan)	Capaian Realisasi Fisik (%)
1	Januari	3,45	1	4,00

2	Februari	4,34	1	22,49
3	Maret	20,46	1	9,70
4	April	7,60	1	4,47
5	Mei	17,43	1	6,50
6	Juni	13,40	1	4,50
7	Juli	4,51	1	9,00
8	Agustus	4,36	1	7,24
9	September	3,81	1	3,80
10	Oktober	7,12	1	14,50
11	November	9,31	1	4,80
12	Desember	3,52	1	9,00
To	otal Triwulan IV	99,31	12	100

Dengan rincian sebagai berikut:

- Pengelolaan layanan kesehatan dan kefarmasian di Klinik Pratama ANRI berdasarkan kunjungan pegawai berobat dan layanan konsultasi medis yaitu:
 - a. Data Kunjungan pegawai berobat

No.	Bulan	Jumlah Pegawai Berobat
1	Januari	127
2	Februari	166
3	Maret	184
4	April	141
5	Mei	219
6	Juni	146
7	Juli	213
8	Agustus	229
9	September	198
10	Oktober	254
11	November	281
12	Desember	247
	Total	2404

b. Data kunjungan pegawai berobat berdasarkan unit kerja

No	Unit Kerja	Jumlah
4	Dina Danan and an Hukumaan Masusandad	Pertahun
1	Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat	172
2	Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum	248
3	Biro Umum	538
4	Direktorat Kearsipan Pusat	73
5	Direktorat Kearsipan Daerah I	65
6	Direktorat Kearsipan Daerah II	31
7	Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi	44
8	Direktorat Akuisisi	128
9	Direktorat Pengolahan	220
10	Direktorat Preservasi	161
11	Direktorat Layanan dan Pemanfaatan	141
12	Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	39
13	Pusat Data dan Informasi	71
14	Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan	29
15	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	115
16	Pusat Jasa Kearsipan	92
17	Pusat Akreditasi Kearsipan	68
18	Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan	78
19	Inspektorat	74
20	Kedeputian Bidang Konservasi Arsip	13
21	Kedeputian Bidang Pembinaan Kearsipan	12
22	Sekretariat Utama	9
23	Balai Arsip statis dan Dinamis (BAST)	20
24	Pensiunan ANRI	3
	TOTAL	2404

Total Pegawai berobat ke Klinik Pratama ANRI Oktober s.d Desember yaitu: 782 pegawai dan 3 unit kerja terbanyak yaitu : (1) Biro Umum (538 pegawai), (2) Biro OKH (248 pegawai), dan (3) Direktorat Pengolahan (220 pegawai).

c. Data Penyakit berdasarkan kunjungan pegawai berobat

No.	l:- Dl-4						Jı	ımlah	Penyakit	t				T-4-1
NO.	Jenis Penyakit	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agutus	September	Oktober	November	Desember	Total Jenis Penyakit
	Abdominal Pain	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4
2	Abses	0	4	1	3	0	0	1	0	3	2	6	5	25
3	Albunemia	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	Аспе	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
5	Alergi	0	0	0	0	5	11	3	7	6	6	8	4	50
6	Amenore Sekunder	0	0	0	0	0	1	0	0		0	0	0	1
7	Anemia	4	5	2	0	8	4	13	2	5	0	2	9	54
8	Angina Pectoris	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	1
9	Artritis	2	4	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	10

	1 . 8 . 10	Jumlah Penyakit								T. 11 . B. 19				
No.	Jenis Penyakit	Januari	Februari	Maret	April	Mei				September	Oktober	November	Desember	Total Jenis Penyakit
10	Asma Bronkhiale	0	0	1	2	0	0	1	1		3	0	0	8
11	Atralgia	0	0	0	2	3	0	6	6	3	5	6	0	31
12	Atypical Chest Pain	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
13	Autoimun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
14	Batu Asam Urat	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
15	Batu Ginjal	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
16	Batu Kandung Kemih	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
17	Bradikardi	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
18	Cardiomegali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
19	Caries Dentis	2	0	0	0	6	2	3	2	1	2	3	4	25
20	Carpal Tunnel Syndrome	0	0	0	1	0	0	1	2		3	0	1	8
21	Cedera ACL	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		2
22	Cephalgia	23	5	16	8	21	11	21	31	16	34	37	32	255
23	Combutio	0	0	1	1	0	0	0	2	0	3	2	0	9
24	Command Cold	12	13	13	10	8	7	11	23	14	19	28	30	188
25	Corpus Alienum	0	0	0	0	0	0	1	0	0	13	1	0	3
26	Cough	0	10	14	18	14	10	18	16	21	37	23	34	215
27	Covid 19	0	3	5	10	8	0	0	0	0	0	0	7	24
28	Dermatitis	1	3	0	1	1		6	3	1	5	2	2	29
29	Dermatitis Seboroik	0	0	0	0		4 0	0		1	0			1
30	Deviasi Lidah	0	0	0	0	0	0	1	0		0	0	0	1
31	Diabetes Melitus	5	5	11	6	12	7	8	3	3	7	9		80
32	Diare Akut	0	1	- 11	0	2						0	4 0	7
33	Dislipidemia	0	9	3			2	0	0	0	0	0	0	14
34	Disminorrhea	1	0	1		2		2			3	1		
35	Dispepsia	3	15	17	14	24	0	48	2	14			2 27	15 281
36	Dry Eyes	0	1	- 1/			17	48	23 3	2	49	30	2	
37	Dry Hands	0	0		0	П	0	0	<u> </u>		2	8		24
38	Edema	0	0	0	0	<u> </u>	0	3	2	0	0	0	0	5
חח	<u> </u>	п	п		0	<u> </u>	0	<u> </u>		0	0	0	0	1
	Elevated Liver Enzyme Ektima	0	0	0	0	0	-		0	0	0	0	0	
41	Faringitis	8	15	3	0	0	0	0	70	0	(00	07	0	3
42	Fatigue	0	1	14	14	19	20	59	73	74	100	97	131	624
43	Febris	6	2		0	7	П	2	1	0	[]	0	[] 4P	13
44				3	10	4	3	11	9	3	18	14	46	129
	Fraktur Gigi	0	0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	1
	Frozen Shoulder	0	0	0	0		1	0	0	0	2	0	3	6
	Furunkel	0	0	0	0		0	4	1	1	0	0	0	6
	Gastritis	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	GIPOAO+CC+Vomitus+Nausea		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
49	G1POAO+Cephalgia	0	0	0				1	0	0	0	0	0	1

		Jumlah Penyakit									T. II B. II.			
No.	Jenis Penyakit	Januari	Februari	Maret	April	Mei			Agutus		Oktober	November	Desember	Total Jenis Penyakit
50	GIPIAO + Edema	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	G2P1AD + Nausea	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	G2P1AO+Malaise+Myalgia	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	G2PIAO+ISPA+FA+Myalgia	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	G2P1AO+Nausea	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	GEA	2	3	4	0	3	6	15	6	3	9	1	10	62
56	GERD	0	0	0	0	1	2	3	1	0	2	4	3	16
57	Gingivitis	0	0	- 1	1	5	1	5	3	3	2	7	6	34
58	Hematom	0	0	П	П		-	1		1		2	2	
		п	п	0	0	0	I		4		6			17
	Hematuria	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	4
60 61	Hemiparese Sinistra	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	1
62	Hemorrhoid Herpes Zooster	0	1	0	0	2	0	2	1	0	0	0	0	5
	·	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	4
64	Hidrokel	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1	5
	Hifema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
66	111161116	U	u	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
67	Hiperemesis Gravidarum	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
68	Hiperlipidemia Hiperkolesterolemia	0 25	0 24	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	·			21	29	29	19	13	3	1	2	8	9	183
69	Hipertensi	14	5	7	8	13	11	11	23	10	23	24	14	163
	Hiperurisemia	6	10	11	13	23	15	18	6	9	6	3	2	122
71	Hipoglikemi	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
72	Hipotensi	0	0	0	6	1	1	7	10	11	22	14	3	75
	Hordeolum	0	0	1	1	1	3	2	0	1	0	3	0	12
74	Нусирѕ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
75	Impaksi Gigi	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
76	Infeksi Kelopak Mata	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
77	Infeksi Saluran Kemih	1	1	2	0	0	0	2	0	2	0	1	1	10
78	Infeksi Sekunder	0	0	0	1	2	3	3	0	3	1	0	0	13
	Insicte Bite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4
	Insomnia	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	2	0	7
	ISPA	15	20	21	21	23	20	35	47	36	50	52	77	417
82	Kalazion	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3
83	KIPI Post Vaksin Covid-19	0	2	0	0	0		0	0	0		0		2
84	Konjungtivitis	5	3	0	8	2	0	2	4	1	6	4	4	39
85	Konstipasi	0	0	0	0		0	1	0	1	1	0	0	3
86	Kontak Erat Covid-19 Keluarga	0	0	0	0	2		0						
87	Kontak Erat Covid-19 Rekan Kerja	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	2
	Low Back Pain	0	1		_	9	0		0	0	0	0	0	9
	Malaise	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4
-50		נ	J	0	0	1	0	5	2	0	8	22	14	52

		Jumlah Penyakit												
No.	Jenis Penyakit	Januari	Februari	Maret	April	Mei			Agutus		Oktober	November	Desember	Total Jenis Penyakit
90	Mastitis	0	0	0		0	0	1	0		0	0	0	1
91	Migrain	0	0	0	0	1	1	2	3	1	1	3	1	13
92	Milea	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0	0	1
93	Miliaria	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1	0	1
94	Myalgia	2	5	2	20	19	10	22	23	21	36	35	19	214
95	Nausea	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	0	4	11
96	Neck spasm	0	2	0	0	1	0	0	0		0	0	0	3
97	Nefrolithiasis	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
98	Neurodermatitis	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
99	Obesitas	0	0	0	0	0	0	0	0		0	2	0	2
100	Obstruktif Sleep Apnea	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
101	Desophagitis	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
102	OsteoArthritis	0	0	0	0	0		0	1	1	2	0	0	4
103	Otitis Eksterna	0	0	0	1	0	0	1	0		0	0	0	2
104	Overweight	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
105		0	2	0	0	0	1	2	0		2	2	2	11
106	Pelvic Inflammatory Disease	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Pembesaran KGB	0	0	0	0	0		0	0		0	0	1	1
	Peningkatan LED	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	5
109	Plantar Fasciitis	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	1	5	11
110	Pneumonia	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1	1
111	Polip gigi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
112	Post Covid-19	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
113	Post Jatuh	0	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	7
114	Post KLL	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
115	Pre Eklamsi	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
116	Pre Hipertensi	0	0	0	0	1	1	2	0		0	0	0	4
117	Pre Menopouse	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
118	Psikosomatis	0	0	0	0	0	1	0	0		0	0	0	1
119	Rhinitis Alergi	0	0	0	4	0	0	1	0		2	0	0	7
120	Sehat	0	0	0	0	7	1	2	10	4	8	25	6	63
121	Selulitis	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4
122	Serumen	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	Sindrom lupus erimatous	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
124	Sinusitis	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Sistemik Lupus Eritematous	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
126	Skabies	0	0	2	1	0	1	0	0		0	0	0	4
127	Spasme Otot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
128	Sprain Genu	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	6
129	Sprain Pedis	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	5

		Jumlah Penyakit .												
No.	Jenis Penyakit	Januari	Februari	Maret	April	Mei				September	Oktober	November	Desember	Total Jenis Penyakit
130	Spondilosis cervikal	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
131	ST Depresi	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
132	Stomatitis	3	0	3	3	4	0	0	7	4	3	8	2	37
133	Stroke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
134	Suspek Demam Dengue	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
135	Suspek DM Tipe II	0	0	0	1	1	3	0	0	3	1	0	0	9
136	Suspek Frozen Shoulder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
137	Suspek Gangguan Fungsi Ginjal	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
138	Suspek GEA	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	4
139	Suspek GERD	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
140	Suspek Hernia Nukleus Pulposus	0	0	0	0	2	0	0	1	0	3	0	0	6
141	Suspek Hiperkolesterolemia	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
142	Suspek Hipertensi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1
143	Suspek Hordeolum	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
144	Suspek Infeksi Saluran Kemih	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
145	Suspek ITP	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
146	Suspek KET	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
147	Suspek Low Back Pain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
148	Suspek OsteoArtritis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
149	Suspek Presbiopi	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
150	Suspek Ruptur ACL	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
151	Suspek Selulitis	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
152	Suspek Sinusitis	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	3
153	Suspek Thyfoid	0	0	0	2	2	0	0	2	0	1	2	1	10
154	Thyfoid Fever	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	6
156	TIC disorder	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Tinea Tonsilitis Akut	0	0	0	0	1	4	0	1	3	0	4	1	14
	Trigger Finger	0	0	U	U	0	0	0	2	4	5	4	1	16
	Trigliserida Meningkat	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
	TBC Paru	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Ulkus	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
			п	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3
	Ulkus Diabetikum Urtikaria	<u> </u>	0 5	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2
164	O LINGI ID				<u>'</u>	0	1	0	2	0	0	0	1	14
	Varicella Varises	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3
165	Verucca Verucca		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
166	Vertigo Vertigo	0				0	0	1	1	0	0	0	0	2
167	Vomitus	1	0	3	1	2	0	0	3	4	4	5	4	26
168	Vulnus Excoriatum		1	0	0	3	0	0	2	0	0	5	2	13
169	Tunida Excuriatuili	u		u u	u	1	1	0	10	3	7	1	5	29

No.	leete Describe						Jı	ımlah	Penyakit	ì				T-4-1
NU.	Jenis Penyakit	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agutus	September	Oktober	November	Desember	Total Jenis Penyakit
170	Vulnus Laceratum	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4
171	Vulnus Morsum	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
172	Vulnus Punctum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1



2. Pengadaan persediaan obat-obatan dan alkes;

a. Data persediaan obat-obatan dan alkes Tahun 2023

a. Bata personiaan spat obatan aan amee minin 2020										
Nama Obat	Persediaan Tahun 2022	Pengadaan Obat dan Alkes Jan- Des	Pengeluaran Obat dan Alkes Jan- Des	Sisa Persediaan Desember 2023	Satuan					
Acyclovir Zalf	16	3	6	13	Tube					
Acethylcystein 200mg	0	3600	3460	140	Kapsul					
Alkohol Swab	7	0	3	4	Box					
Allupurinol 300mg	160	1200	654	706	Tablet					
Amlodipine 5mg	390	1600	1420	570	Tablet					
Amlodipine 10mg	1196	400	822	774	Tablet					
Asam Traneksamat Injeksi 250 mg/5 ml	0	10	0	10	Ampul					
Atorvastatin 10mg	120	940	356	704	Tablet					
Atorvastatin 20mg	170	1030	362	838	Tablet					
Azythromicin 500mg	99	1000	1099	0	Tablet					
Benoson G	0	6	6	0	Tube					
Betason N	0	18	10	8	Tube					
Betamethasone 0.1%	5	40	25	20	Tube					
Bethadine cair 5 ml	14	18	29	3	Botol					
Bethadine cair 60 ml	5	0	2	3	Botol					
Bisturi/Mata pisau bisturi no.21	6	0	4	2	Buah					
Bufacomb	3	30	23	10	Tube					
Burnazin zalf	2	3	1	4	Tube					

Nama Obat	Persediaan Tahun 2022	Pengadaan Obat dan Alkes Jan- Des	Pengeluaran Obat dan Alkes Jan- Des	Sisa Persediaan Desember 2023	Satuan
Buscopan	218	0	218	0	Tablet
Captopril 25mg	30	100	35	95	Tablet
Cataflam 25mg	414	350	602	162	Tablet
Cataflam 50mg	110	500	521	89	Tablet
Catgut Chromic Brown 3/0 (3 metric) 75cm	12	0	0	12	Buah
Caviplex	404	2200	2446	158	Tablet
Cefadroxil 500 mg	26	400	288	138	Tablet
Cefixime 200mg	464	800	1178	86	Tablet
Cendo Xitrol tetes mata	25	1	26	0	Botol
Cendo Fenicol Salf Mata	22	1	17	6	Tube
Cendo Fenicol tetes mata	21	0	21	0	Botol
Cendo Minidos Cenfres MD	15	31	41	5	Strip
Cetirizine	282	350	387	245	Tablet
Ciprofloxacin 500mg	94	0	94	0	Tablet
Cotrimoxazole Forte 960 mg	74	0	74	0	Tablet
Counterpain 15 gr	1	70	68	3	Tube
Desolex Ointment	1	0	1	0	Tube
Dexamethasone inj (Cortidex inj)	18	0	0	18	Ampul
Dexamethasone 0,5mg	456	1500	1956	0	Tablet
Dexteem Plus	0	0	0	0	Tablet
Digenta 10gr	8	0	8	0	Tube
Domperidone	0	1500	1196	304	Tablet
Erlamycetin Ear Drop	1	10	6	5	Botol
Eperisone 50mg	0	1900	1566	334	Tablet
Extrace Injeksi 500mg/5ml	2	20	14	8	Ampul
Ester C Holisticare	0	912	912	0	Tablet
Genoint 15gr	16	0	16	0	Tube
Gentamycin Salep	20	0	9	11	Tube
Glucophage 500mg	570	0	280	290	Tablet
Handscoon Disposable	10	20	12	18	Box
Handscoon Steril	13	0	0	13	Buah
Handsrub Antiseptic 500ml	3	0	0	3	Botol
Hansaplast Jumbo	0	2	0	2	Box
Hansaplast Strip	1	1	1	1	Box
Hidrocortison Zalf 2.5 %	10	24	10	24	Tube
HI-D D3 1000 iu	0	600	600	0	Tablet
Hot in Cream 60gr	9	79	76	12	Tube
Hydrogen Peroxide (H2O2)	7	0	0	7	Botol
Hypafix 15cmx5m	1	3	1	3	Box
Imboost Force	0	390	306	84	Tablet

Nama Obat	Persediaan Tahun 2022	Pengadaan Obat dan Alkes Jan- Des	Pengeluaran Obat dan Alkes Jan- Des	Sisa Persediaan Desember 2023	Satuan
Intunal Forte	0	1000	668	332	Tablet
Infus set	13	29	22	20	Buah
Jarum Lancet	0	10	4	6	Вох
Kaflam 50mg	22	0	22	0	Tablet
Kassa Hidrofil Steril Box	15	100	74	41	Вох
Kertas Kasir Struk 58x40nm	0	20	12	8	Roll
Kertas Kasir EKG Fukuda 50x30mm	8	0	3	5	Roll
Keterolac injeksi	5	10	4	11	Ampul
Ketoconazole Cream	0	10	10	0	Tube
Ketomed 15gr	0	0	0	0	Tube
Lansoperazole	210	1000	474	736	Tablet
Lidi Kapas	1	0	1	0	Pak
Lidocain 2 % inj	9	0	9	0	Ampul
Lopamid	12	900	682	230	Tablet
Loratadine	600	600	698	502	Tablet
Maltover	146	600	716	30	Tablet
Masker Nebulizer	6	0	1	5	Buah
Masker Wajah Disposable	25	0	4	21	Box
Masker 3M 9501V	42	0	0	42	Pcs
Mefinal 500 mg	0	1000	754	246	Tablet
Meloxicam 15mg	270	300	527	43	Tablet
Mertigo	219	200	291	128	Tablet
Metformin 500mg	162	2000	1285	877	Tablet
Methylprednisolon 4mg	472	4100	4572	0	Tablet
Metofazin Cream	0	1	1	0	Tube
Micropore 3M	3	0	2	1	Gulung
Minosep Gargle	18	21	39	0	Botol
Minyak Kayu Putih 15 ml	0	59	29	30	Botol
Minyak Kayu Putih 30 ml	0	10	10	0	Botol
Molexflu	0	2000	1858	142	Tablet
Mometasone Furoat 0,1 %	5	25	16	14	Tube
Mucohexin/Bromhexin	394	1100	1494	0	Tablet
Mylanta tablet	4	500	504	0	Tablet
NaCl 0,9 % 100 ml	7	27	28	6	Plabot
NaCl 0,9 % 500 ml	14	11	20	5	Plabot
Nalgestan	20	1100	1118	2	Tablet
Nasal Canule Disposable	42	0	24	18	Buah
Nebacetin Ointment 5g	2	5	2	5	Tube
Needle No. 25	85	0	38	47	Pcs
Neuralgin	353	900	1135	118	Tablet
Neurobion 5000	0	1250	1138	112	Tablet

Nama Obat	Persediaan Tahun 2022	Pengadaan Obat dan Alkes Jan- Des	Pengeluaran Obat dan Alkes Jan- Des	Sisa Persediaan Desember 2023	Satuan
Neurobion 5000 inj	2	20	20	2	Ampul
Omeprazole Tablet	0	400	362	38	Tablet
Ondancentron 4mg	25	50	50	25	Ampul
Oralit Sachet (Pharolit 5,8gr)	83	120	106	97	Sachet
Paracetamol	219	4500	2992	1727	Tablet
Perban Elastis 7,5cm x 4,5m	0	6	1	5	Buah
Perban Elastis 10cm x 4,5m	0	5	0	5	Buah
Perban Gulung 10 cm	20	0	11	9	Gulung
Plastik Klip	6	0	0	6	Pak
Plastik Klip Obat 15 x 10 @10pack	7	0	3	4	Ball
Plastik Klip Obat 13 x 8 @10pack	7	0	3	4	Ball
Plesterin	1	1	1	1	Box
Polysilane	236	2440	1492	1184	Tablet
Primadex F 960mg	8	300	139	169	Tablet
Prontosan Gel	0	1	1	0	Buah
Ranitidine Injeksi	7	60	52	15	Ampul
Rhinos	164	600	671	93	Tablet
Ringer Lactat Infuse	0	15	6	9	Plabot
Salbutamol 4 mg	0	100	50	50	Tablet
Salysil talk	14	50	29	35	Buah
Scopma Plus	564	200	619	145	Tablet
Sinvastatin 10 mg	556	900	761	695	Tablet
Sofratulle/Daryantulle	5	0	2	3	Lembar
Spuit 10 cc	1	30	8	23	Buah
Spuit 3 cc	0	50	50	0	Buah
Spuit 5 cc	15	50	35	30	Buah
Spuit 20 cc	3	10	5	8	Buah
Strip Asam Urat	2	2	4	0	Box
Strip Cholesterol	4	31	22	13	Box
Strip Gula Darah Accu-Cek	1	5	5	1	Box
Strip Haemoglobin Family Dr	0	9	6	3	Box
Strip Asam Urat Family Dr	3	7	6	4	Box
Strip Pemeriksaan Urine Narkoba	1	1	2	0	Box
Sucralfat Syr	32	80	86	26	Botol
Surbex Z	14	150	164	0	Tablet
Thrombophob	2	6	6	2	Tube
Transofix Spike B Braun (Alat tusuk cairan infus)	6	36	18	24	Buah
Ultrasonic Gel USG 250 ml	0	1	1	0	
Vasofix no 22	9	15	12	12	Buah
Vasofix no 24	0	25	10	15	Buah

Nama Obat	Persediaan Tahun 2022	Pengadaan Obat dan Alkes Jan- Des	Pengeluaran Obat dan Alkes Jan- Des	Sisa Persediaan Desember 2023	Satuan
Vasofix no 25 Braun	1	0	1	0	Pcs
Ventolin Nebulizer	4	0	1	3	Buah
Vital Ear Oil	5	0	1	4	Botol
Zinc 20mg	60	900	764	196	Teblet
Wing Needle No. 25	31	50	61	20	Buah
Alat Swab Antigen SD Biosensor	20	0	20	0	
Headcap	4	0	1	3	Box
Handscoon Nitrile	1	0	0	1	Box
Kantong Plastik Putih	0	1000	0	1000	Buah
Kantong Plastik Logo	800	0	800	0	Buah
Elektroda ECG	2	0	1	1	Pak
Pot Salep 15gram	0	30	30	0	Buah
Pot Salep 10cc	0	30	5	25	Buah
Pot Salep 20cc	0	30	0	30	Buah
Pot Salep 30cc	0	30	8	22	Buah
Pot Urine 200 cc	25	0	25	0	Pcs
Sarung tangan karet	3	0	0	3	Pasang
Hazmat	20	0	0	20	Buah
Buku Resep	0	1	0	1	Pak
Kartu Stok Persediaan Obat	0	200	0	200	Buah
Surat Rujukan	0	1	0	1	Pak
Formulir Kartu Berobat	200	0	35	165	Lembar
Formulir Asuhan Keperawatan	650	0	0	650	Buah
Surat Keterangan Dokter	0	1	1	0	Buku
Kartu Stok Persediaan Obat	30	0	30	0	Buah
Kacamata Antifog 3M Safety	3	0	0	3	Pcs
Hazmat Suit Reusable	4	0	0	4	Pcs
Cetak buku resep	13	0	2	11	Buku
Cetak buku surat keterangan dokter	9	0	9	0	Buku
Obh Ika 100ml	24	0	24	0	Botol
Spuitt 5cc	70	0	0	70	Buah
Alcohol Swab @100	2	0	2	0	Box
Hazmat Disposible	26	0	2	24	Buah

b. Data pengeluaran biaya layanan kefarmasian

No	Bulan	Jumlah Pasien	Biaya Pemakaian Obat/alkes
1	Januari	127	7,015,820
2	Februari	166	6,335,422
3	Maret	190	7,678,835

No	Bulan	Jumlah Pasien	Biaya Pemakaian Obat/alkes
4	April	129	6,521,609
5	Mei	220	11,816,800
6	Juni	142	7,513,519
7	Juli	213	11,150,227
8	Agustus	202	11,193,141
9	September	224	10,539,758
10	October	228	9,477,427
11	November	331	12,181,328
12	Desember	268	10,031,875
TOTAL		2440	111,455,761

3. Pemeriksaan Kesehatan

No	Bulan	Jumlah Layanan
		(pegawai)
1	Layanan MCU Pegawai	62
2	Layanan MCU BAST	19
3	Layanan Konseling Psikologi	6
4	Layanan Pengujian Kesehatan (MPK)	1
5	Layanan Pemeriksaan Kelaikan Kerja (Spesialis Kedokteran	1
	Okupasi)	
6	Layanan Skrining Diabetes Melitus onsite ANRI Jakarta	95
7	Layanan Skrining Papsmear onsite ANRI Jakarta	68
8	Layanan Skrining Diabetes Melitus onsite Pusdiklat Kearsipan Bogor	43
9	Layanan Skrining Papsmear onsite Pusdiklat Kearsipan Bogor	6
10	Fasilitasi Vaksin COVID-19-Booster2 di Fasyankes Jaringan	65
	Kerjasama	
11	Pemeriksaan Urin Narkoba ASN	32
12	Pemeriksaan Urin Narkoba Non ASN	25

4. Seminar Kesehatan

No	Bulan								
1	Seminar Hybrid: Mengenal Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Return To Work bagi seluruh pegawai ANRI								
2	Seminar Hybrid: BPJS Kesehatan, Taspen, dan Peningkatan Kesejahteraan ASN Melalui Program Taspen Life bagi seluruh pegawai ANRI								
3	Sosialisasi Aktivitas Peregangan di Jam Kerja bagi 55 pegawai perwakilan unit kerja per eselon 2, dilanjutkan dengan supervisi pelaksanaan aktivitas peregangan mandiri di unit kerja ANRI								
4	Edukasi kesehatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan								

No	Bulan
	Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bagi 57 peserta pemeriksaan urin narkoba
5	Sosialisasi MCS Kepesertaan BPJS Keliling (pendaftaran, perubahan data, aktivasi mobile JKN, dan inforasi/pengaduan) dilanjutkan pelayanan kepesertaan onsite bagi 150 pegawai

D. Layanan Manajemen SDM

- a. Perencanaan dan Mutasi Pegawai [051]
 - 1) Pengadaan Pegawai

Kegiatan Pada Triwulan ke-I yang telah dilaksanakan antara lain:

- Kegiatan hasil seleksi administrasi pada tanggal 13 Januari 2023.
- Kegiatan masa sanggah hasil seleksi administrasi pada tanggal 16 -18 Januari 2023.
- Kegiatan jawab sanggah hasil seleksi administrasi pada tanggal 19
 25 Januari 2023.
- Pengumuman hasil sanggah pada tanggal 27 Januari 2023, formasi jabatan arsiparis ahli pertama 150 peserta, perencana ahli pertama 67 peserta, pranata komputer ahli pertama 14 peserta, pranata komputer terampil 6 peserta, arsiparis terampil 36 peserta, pranata sumber daya manusia aparatur terampil 3 peserta, dan pustakawan terampil 1 peserta.
- Pengumuman penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi PPPK pada tanggal 6 Maret 2023.
- Pengumuman pelaksanaan seleksi kompetensi dengan metode Computer Assisted Test (CAT) dan seleksi kompetensi tambahan pada tanggal 8 Maret 2023.
- Seleksi kompetensi dengan Metode CAT di 21 titik lokasi pada tanggal 18 - 31 Maret 2023.
- Pengumuman pelaksanaan seleksi kompetensi tambahan PPPK pada tanggal 28 Maret 2023.
- Pengumuman penyampaian materi seleksi kompetensi tambahan pada tanggal 30 Maret 2023.

Kegiatan Pada Triwulan ke-II yang telah dilaksanakan antara lain:

- Validasi usul formasi ASN Tahun 2024 dengan BKN pada tanggal 25
 Mei 2023;
- Pengumuman akhir pasca sanggah seleksi PPPK, Pengisian DRH dan Penetapan Calon PPPK pada tanggal 11 Mei 2023;
- Penetapan NI PPPK TA. 2022 pada tanggal 15 Juni 2023;
- Pengangkatan PPPK ANRI TA. 2022 pada tanggal 26 Juni 2023;
- Pengarahan PPPK ANRI pada tanggal 27 Juni 2023.

Kegiatan Pada Triwulan ke-III yang telah dilaksanakan antara lain:

- Optimalisasi PPPK ANRI pada tanggal 26 September 2023;
- Pengumuman Pengadaan PPPK Tahun Anggaran pada tanggal 18
 September 2023;
- Verifikasi berkas Administrasi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 20 September 2023.

Kegiatan Pada Triwulan ke-IV yang telah dilaksanakan antara lain:

- Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan PPPK di Lingkungan ANRI TA 2023 (tanggal 17 Oktober 2023);
- Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pasca Sanggah PPPK TA 2023 (tanggal 25 Oktober 2023);
- Fasilitasi Seleksi Kompetensi CAT PPPK di Lingkungan ANRI TA 2023 yang dilaksanakan selama Bulan November 2023 di 10 (sepuluh) titik lokasi yaitu Bandung (tanggal 13 November 2023), Semarang (tanggal 13 November 2023), Karawang (tanggal 14 November 2023), Tasikmalaya (tanggal 15 November 2023), Yogyakarta (tanggal 18 November 2023), Serang (tanggal 19 November 2023), Kantor Regional BKN V Ciracas (tanggal 22 November 2023), BKN Kantor Pusat (tanggal 25-26 November 2023), Poltekkes Kemenkes DKI Jakarta 1 (tanggal 27 November 2023), Poltekkes Kebayoran DKI Jakarta 2 Baru (tanggal 28 November 2023).
- Rapat Koordinasi Perencanaan ASN Tahun 2024 (tanggal 6 November 2023);
- Rapat Koordinasi Persiapan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Pengadaan PPPK di Lingkungan ANRI TA 2023 (tanggal 7 November 2023);

 Pengumuman Hasil Akhir Pengadaan PPPK di Lingkungan ANRI TA 2023 (tanggal 16 Desember 2023).

2) Uji Kompetensi Pegawai

Kegiatan Pada Triwulan ke-I yang telah dilaksanakan antara lain:

- Terlaksananya seleksi uji kompetensi pejabat administrator pada tanggal 10 Februari 2023.
- Terlaksananya seleksi uji kompetensi pejabat pengawas pada tanggal 16 Februari 2023.

Tidak ada kegiatan Uji Kompetensi Pegawai Pada Triwulan ke-II. Kegiatan Pada Triwulan ke-III digunakan untuk Sosialisasi Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Arsip Nasional Republik Indonesia tanggal 13 Juli 2023. Kegiatan Pada Triwulan ke-IV digunakan untuk kegiatan Pelantikan (karena keterbatasan anggaran kegiatan pelantikan pegawai)

3) Pelantikan Pegawai

Kegiatan Pada Triwulan ke-I yang telah dilaksanakan antara lain:

- Pelantikan CPNS menjadi PNS sejumlah 8 peserta dan Pejabat
 Fungsional sejumlah 2 peserta pada tanggal 20 Januari 2023.
- Pelantikan Pejabat Administrasi sejumlah 2 peserta, Pejabat Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur sejumlah 20 peserta, dan Pejabat Fungsional Arsiparis sejumlah 3 peserta pada tanggal 20 Februari 2023.

Tidak ada Kegiatan Pelantikan Pegawai Pada Triwulan ke-II.

Kegiatan Pada Triwulan ke-III yang telah dilaksanakan antara lain:

- Pelantikan Pejabat Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN pada tanggal 29 Agustus 2023;
- Pelantikan Analis Kebijakan Ahli Utama pada tanggal 3 Juli 2023;
- Pelantikan Pejabat Fungsional dan Penandatanganan Kinerja PPPK pada tanggal 27 Juli 2023.

Kegiatan Pada Triwulan ke-IV yang telah dilaksanakan antara lain:

Pelantikan Bulan Desember 2023 (tanggal 22 Desember 2023)
 terhadap Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

sebanyak 1 (satu) orang, Analis SDM Aparatur sebanyak 1 (satu) orang, Pranata SDM Aparatur sebanyak 1 (satu) orang, dan Asesor SDM Aparatur sebanyak 4 (empat) orang

4) Mutasi Pegawai

Kegiatan Pada Triwulan ke-I yang telah dilaksanakan antara lain:

- Terlaksananya kegiatan kenaikan gaji berkala pada bulan januari sejumlah 23 pegawai, bulan februari sejumlah 22 pegawai dan bulan maret sejumlah 89 pegawai.
- Terlaksananya usul kenaikan pangkat periode april 2023 sejumlah 53 pegawai.
- Terlaksananya usul tunjangan pengelolaan arsip statis sejumlah 109 pegawai.
- Terlaksananya usul kenaikan jenjang jabatan Widyaiswara sejumlah
 1 pegawai, Pranata Komputer Madya sejumlah 1 pegawai, dan
 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda sejumlah 1 pegawai.
- Terlaksananya kegiatan usul pensiun satu pegawai a.n Isro Aliudin pada tanggal 1 Februari 2023.

Kegiatan Pada Triwulan ke-II yang telah dilaksanakan antara lain:

- Terlaksananya kegiatan kenaikan gaji berkala pada bulan April dan Mei 2023 sejumlah 3 (tiga) pegawai tanggal 7 April 2023;
- Terlaksananya kegiatan usul pensiun (KPP BUP) sebanyak 4 (empat) orang tanggal 10 April 2023;
- Terlaksananya kegiatan usul Perpindahan Jabatan dari Jabatan Struktural ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Utama sejumlah 1 Pegawai tanggal 12 April 2023;
- Sosialisasi JKK, JKM Taspen, BPJS Kesehatan dan peningkatan kesejahteraan melalui Taspen Life pada tanggal 15 Mei 2023;
- Usul Pemberhentian dengan hak Pensiun Pegawai ANRI yang mencapai BUP sampai bulan Agustus 2023;
- Kenaikan jabatan dan Alih jabatan Arsiparis (54 orang) pada tanggal
 20 Juni 2023;
- Kenaikan Jabatan Auditor (2 orang) pada tanggal 20 Juni 2023;
- Kenaikan Jabatan WI (1 orang) pada tanggal 20 Juni 2023;

 Penetapan Pensiun a.n Sumadi, Rojali, dan Nur Mas Intan Berliana Marpaung.

Kegiatan Pada Triwulan ke-III yang telah dilaksanakan antara lain:

- Pencantuman Gelar Okta Handi Surya pada tanggal 7 September 2023;
- Kenaikan Jenjang Jabatan Analis Kebijakan sejumlah 2 orang pada Agustus 2023;
- Perpindahan jabatan dari pelaksana ke JF PPBJ pada bulan Agustus 2023;
- Perpindahan jabatan dari pengawas ke JF Arsiparis pada bulan Agustus 2023;
- Pembayaran JKM dan THT Pegawai yang meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2023;
- Penetapan Persetujuan Teknis (Pertek) BKN Kenaikan Pangkat
 Pegawai Periode Oktober 2023 melalui SIASN BKN (178 orang);
- Penetapan Pemberhentian Pegawai yang Memasuki Batas Usia Pensiun (2 orang);
- Penetapan SK Mutasi Tunjangan Pengelolaan Arsip Statis karena perubahan masa kerja (40 orang);
- Penetapan SK Pemberhentian Tunjangan Pengelolaan Arsip Statis karena melaksanakan tugas belajar (2 orang);
- Rekonsialisasi Data Kepesertaan BPJS Kesehatan PPNPN dan PPPK ANRI pada 12 -14 September 2023;
- Pensiun a.n Asep Muchtar dan Rahmat Irianto pada 1 September 2023;
- SK Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2023.

Kegiatan Pada Triwulan ke-IV yang telah dilaksanakan antara lain:

- Pengajuan BPJS Kesehatan a.n Alfathan Wira S dan Arisny Karlina
 (4 Oktober 2023);
- Kenaikan Gaji Berkala Bulan Oktober sejumlah 1 (satu) Pegawai,
 November sejumlah 1 (satu) Pegawai dan Desember Tahun 2023
 sejumlah 99 (sembilan puluh sembilan) Pegawai;
- Kepengurusan Jaminan Kematian Ibu Sri Martini (1 November 2023);

- Pengajuan BPJS Kesehatan a.n Istianti Andiah (2 November 2023);
- Pencantuman Gelar a.n Dimas Pratama Yudha dan Achmad Dedi
 Faozi (3 November 2023) ;
- Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Pelaksana ke Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran sebanyak 1 (satu) orang;
- Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Fungsional lain ke
 Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur 1 sebanyak (satu) orang;
- Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Fungsional lain ke
 Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur sebanyak 1 (satu) orang;
- Pengangkatan Dalam Jabatan Asesor SDM Aparatur (karena Perubahan Nomenklatur) sebanyak 4 (empat) orang;
- Kenaikan Jabatan Dalam Jabatan Analis SDM Aparatur sebanyak 1 (satu) orang.

5) Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

Kegiatan Pada Triwulan ke-I digunakan untuk Kegiatan Seleksi Pejabat Pengawas dan Pelantikan Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional

Kegiatan Pada Triwulan ke-II yang telah dilaksanakan antara lain:

Pengusulan Pencantuman Gelar a.n Shita Rouli dan Laily
 Dzatinnuha pada tanggal 15 Juni 2023.

Kegiatan Pada Triwulan ke-III yang telah dilaksanakan antara lain:

Pengusulan Pencantuman Gelar a.n Shita Rouli dan Laily
 Dzatinnuha pada periode sebelumnya tanggal 15 Juni 2023.

Kegiatan Pada Triwulan ke-IV yang telah dilaksanakan antara lain:

- Pengajuan Pencantuman Gelar a.n Dedi Febri Martono, A.Md,
 Dimas Pratama Yuda, S.Sos, Nisa Setya Dini, S.Kom dan
 Muhammad Tama Bara Sakti, S.Hum (tanggal 30 Oktober 2023)
- Rapat Koordinasi Pencantuman Gelar dan Tugas Belajar dengan Badan Kepegawaian Negara (Tanggal 13 Desember 2023);
- Pencantuman Gelar sebanyak 3 (tiga) orang a.n Risma Anggiyani (S-1), Muhammad Tama Bara Sakti (S-2), dan Ghesa Ririan Mitalia (S-2).

b. Pelayanan Administrasi dan Kedisiplinan Pegawai [052]

a) Pengelolaan Administrasi Pegawai

Data administrasi pegawai direkap setiap bulannya sebagai bentuk laporan bulanan. Data administrasi pegawai yang dikelola terdiri dari beberapa kategori yaitu:

- 1. Data presensi pegawai setiap bulan;
- 2. Data izin, cuti, dan dinas luar pegawai;
- 3. Data mutasi pegawai, kenaikan pangkat, dan golongan;
- 4. Pegawai yang pensiun, berhenti, atau pindah.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1. Pembuatan Surat Keterangan Pegawai
- 2. Pembuatan Kartu Suami/Kartu Isteri
- 3. Pembuatan Kartu Pegawai
- 4. Updating Data Pegawai meliputi:
 - Mutasi pegawai (36 pegawai)
 - Penyesuaian kelas jabatan (22 pegawai)
 - Pengangkatan pejabat administrator sebanyak 1 pegawai
 - Pengangkatan pejabat pengawas sebanyak 1 pegawai
 - Pengangkatan pejabat fungsional sebanyak 25 pegawai
 - Pemberhentian dari jabatan JPT Utama sebanyak 1 pegawai
 - Pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional (1 pegawai)
 - Alih jabatan sebanyak 12 pegawai
 - Penunjukan Pelaksana Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Utama (Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia)
 - Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengann Perjanjian Kerja
 (PPPK) sebanyak 45 pegawai.
 - Kenaikan jabatan dalam jabatan fungsional sebanyak 52 pegawai.
 - Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional sebanyak 3 (tiga) orang.
 - Pencantuman gelar akademik sebanyak 5 pegawai.
 - Pegawai memasuki masa pensiun sebanyak 7 pegawai.
 - Kenaikan pangkat sebanyak 178 pegawai

- 5. Pengelolaan Personal File Pegawai
- 6. Pengajuan, Pembuatan, dan Pendistribusian ID Card Pegawai
- 7. Proses Input Cuti dan Surat Perintah
- 8. Penyampaian Konfirmasi Capaian Presensi dan SKB setiap bulan
- Pengajuan rekapitulasi tunjangan kinerja dan uang makan setiap bulan
- 10. Penghitungan kekurangan tunjangan kinerja dan uang makan

b) Pembinaan, Koordinasi, dan Monitoring Administrasi Pegawai pada UPT ANRI

Kegiatan ini meliputi: koordinasi ke Instansi Pembina, Monitoring ke UPT ANRI di Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan di Bogor, kantor Pusat Jasa Kearsipan di Warung Buncit, dan kantor Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan di Gajah Mada. Terkait kegiatan pembinaan dan monitoring ke UPT ANRI dilakukan secara daring dan luring.

Koordinasi juga dilakukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai lembaga pembina kepegawaian. Adapun hasil yang diperoleh dari koordinasi dengan BKN adalah sebagai berikut:

- Pembuatan 4 (empat) Kartu Istri/Suami
- Pembentukan Tim Pengelolaan Data Pegawai melalui aplikasi SIASN
- Pemutakhiran Data Melalui Aplikasi SIASN
- Integrasi Web Service SIASN
- Persetujuan Penetapan Kenaikan Pangkat pada Aplikasi SIASN
 Periode Oktober 2023.

c) Pengembangan Sistem Administrasi Pegawai

Adapun kegiatan dalam rangka pengembangan sistem administrasi pegawai yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Pembahasan progres report perbaikan hasil uji coba pertama aplikasi semakinjago untuk penilaian kinerja
- Penyesuaian aplikasi semakinjago untuk penilaian angka kredit
 Jabatan Fungsional Perencana
- Terlaksananya bimbingan teknis aplikasi semakinjago kepada 6
 jabatan fungsional yang dinilai secara mandiri yaitu arsiparis,
 pranata komputer, analis kepegawaian, perencana, pranata humas,
 dan perancang perundang-undangan
- Terlaksananya uji coba hasil pembangunan aplikasi talent pool pegawai
- Terlaksananya pengembangan aplikasi SIAP terkait input nilai assesment pegawai
- Terlaksananya penyesuaian keamanan pada aplikasi kepegawaian berdasarkan surat dari BSSN berupa pemasangan sertifikat keamanan
- Terlaksananya uji coba aplikasi pelayanan kepegawaian
- Terlaksananya proses input data pada aplikasi talent pool pegawai (penyesuaian modul penghitungan masuk kotak talenta)
- Terlaksananya pembahasan modul penilaian kandidat talenta pada aplikasi tanlent pool
- Terlaksananya penambahan modul input hasil assesment dan modul pengembangan kompetensi pegawai pada aplikasi talent pool
- Terlaksananya penyesuaian aplikasi talent pool berdasarkan hasil masukan dari Assesor SDM Aparatur
- Terlaksananya penyesuaian aplikasi presensi sesuai dengan 6 area/wilayah kantor ANRI dan tidak ada pilihan WFH
- Terlaksananya bimbingan teknis aplikasi SAPK dan SIASN oleh BKN
- Terlaksananya pembahasan progres verifikator dan approval PDM pada aplikasi SIASN
- Terlaksananya pembahasan kebutuhan data (API) dan pembuatan API pada aplikasi kepegawaian untuk kebutuhan integrasi dengan aplikasi superapps

- Terlaksananya audit aplikasi aslicakep dengan BRIN
- Terlaksananya integrasi jabatan dan kelas jabatan serta user pengguna dari aplikasi presensi ke aplikasi aslicakep
- d) Kedisiplinan Pegawai
 Kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan kedisiplinan pegawai
 berupa:
 - Aktivitas bulanan untuk melakukan rekap data kehadiran pegawai dan realisasi SKB sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan pegawai

REKAP PERSENTASE PRESENSI PEGAWAI TAHUN 2023

NO	UNIT KERJA		PRESENSI									
INO	ONIT KERJA	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	ОКТ	NOV
1	Pejabat Struktural Eselon I	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Pejabat Fungsional Utama	99,32%	99,86%	100,00%	100,00%	99,57%	99,13%	99,94%	99,94%	100,00%	99,96%	99,96%
3	Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat	99,94%	99,72%	99,88%	99,93%	99,64%	99,66%	99,89%	99,84%	99,74%	99,93%	99,86%
4	Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum	99,91%	99,76%	99,64%	99,76%	99,74%	99,40%	99,89%	99,89%	99,67%	99,71%	99,67%
5	Biro Umum	99,61%	99,82%	99,86%	99,47%	99,74%	99,59%	99,82%	99,75%	99,67%	99,83%	99,76%
6	Direktorat Kearsipan Pusat	100,00%	99,98%	100,00%	100,00%	99,97%	99,99%	99,96%	99,83%	99,96%	99,75%	99,93%
7	Direktorat Kearsipan Daerah I	99,57%	99,96%	99,97%	99,89%	99,81%	99,86%	99,95%	99,73%	99,86%	99,55%	99,77%
8	Direktorat Kearsipan Daerah II	100,00%	99,92%	99,99%	100,00%	99,65%	99,95%	99,93%	99,89%	99,78%	99,84%	99,87%
9	Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi	99,08%	99,91%	98,97%	99,67%	99,54%	99,92%	99,84%	99,92%	99,80%	99,83%	99,86%
10	Direktorat Akuisisi	99,99%	100,00%	99,75%	99,74%	99,91%	99,83%	99,91%	99,59%	99,84%	99,90%	99,78%
11	Direktorat Pengolahan	99,80%	99,90%	99,87%	99,97%	99,84%	99,78%	99,73%	99,72%	99,74%	99,57%	99,59%
12	Direktorat Preservasi	99,82%	98,42%	99,87%	99,75%	99,54%	99,50%	99,77%	99,30%	99,41%	99,73%	99,79%
13	Direktorat Layanan dan Pemanfaatan	99,58%	99,81%	99,90%	99,69%	99,62%	99,52%	99,79%	99,66%	99,78%	99,95%	99,94%
14	Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan	99,59%	99,74%	99,26%	99,52%	99,70%	99,26%	99,73%	99,68%	99,77%	99,58%	99,89%
15	Pusat Data dan Informasi	100,00%	99,96%	100,00%	99,97%	99,95%	99,92%	99,90%	99,81%	99,90%	99,67%	99,89%
16	Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan	99,39%	99,94%	99,96%	99,97%	98,84%	99,76%	99,40%	99,43%	99,78%	99,27%	99,83%
17	Pusat Diklat Kearsipan	99,79%	99,98%	99,95%	99,95%	99,94%	99,92%	99,92%	99,91%	98,38%	99,95%	99,94%
18	Pusat Jasa Kearsipan	99,76%	99,30%	99,82%	99,55%	98,30%	99,45%	99,00%	99,22%	99,25%	99,96%	99,63%
19	Pusat Akreditasi Kearsipan	99,93%	99,90%	99,94%	99,94%	99,93%	99,93%	99,90%	99,36%	99,70%	99,91%	99,91%
20	Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan	99,78%	99,93%	99,09%	99,48%	99,89%	99,91%	99,54%	99,39%	99,71%	99,84%	99,83%
21	Inspektorat	99,97%	99,95%	99,95%	99,97%	99,95%	99,87%	99,98%	99,94%	99,91%	99,89%	99,89%
22	Balai Arsip Statis dan Tsunami	99,82%	100,00%	99,99%	99,80%	99,98%	99,95%	99,96%	99,92%	99,91%	99,94%	99,90%

REKAP SKB PRESENSI PEGAWAI TAHUN 2023

NO	UNIT KERJA	SKB										
NU	UNII KERJA	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	ОКТ	NOV
1	Pejabat Struktural Eselon I	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Pejabat Fungsional Utama	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	97,62%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,46%
3	Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat	100,00%	100,00%	100,00%	99,56%	100,00%	100,00%	100,00%	99,89%	99,90%	100,00%	100,00%
4	Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum	99,89%	100,00%	99,76%	100,00%	100,00%	99,89%	100,00%	100,00%	99,51%	100,00%	100,00%
5	Biro Umum	99,96%	99,84%	100,00%	99,95%	100,00%	100,00%	99,95%	99,96%	100,00%	100,00%	99,92%
6	Direktorat Kearsipan Pusat	100,00%	99,81%	100,00%	100,00%	100,00%	99,60%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7	Direktorat Kearsipan Daerah I	100,00%	99,73%	100,00%	99,65%	100,00%	100,00%	100,00%	99,72%	100,00%	100,00%	100,00%
8	Direktorat Kearsipan Daerah II	100,00%	100,00%	99,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,49%	100,00%	100,00%
9	Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi	100,00%	100,00%	99,65%	100,00%	100,00%	100,00%	99,63%	100,00%	99,73%	100,00%	100,00%
10	Direktorat Akuisisi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,79%	100,00%	100,00%
11	Direktorat Pengolahan	99,90%	100,00%	100,00%	99,88%	99,88%	100,00%	100,00%	99,92%	100,00%	100,00%	100,00%
12	Direktorat Preservasi	100,00%	98,70%	99,43%	99,79%	100,00%	99,83%	100,00%	100,00%	99,93%	99,74%	99,86%
13	Direktorat Layanan dan Pemanfaatan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,80%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,89%
14	Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan	99,70%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
15	Pusat Data dan Informasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,79%	99,81%	99,77%	100,00%
16	Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,47%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,52%
17	Pusat Diklat Kearsipan	100,00%	99,84%	100,00%	100,00%	99,39%	100,00%	100,00%	100,00%	99,85%	100,00%	100,00%
18	Pusat Jasa Kearsipan	99,10%	99,39%	99,00%	99,21%	98,09%	99,74%	99,86%	98,84%	99,78%	99,87%	99,89%
19	Pusat Akreditasi Kearsipan	100,00%	100,00%	100,00%	99,47%	100,00%	100,00%	100,00%	99,15%	99,84%	100,00%	100,00%
20	Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,02%	99,21%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
21	Inspektorat	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
22	Balai Arsip Statis dan Tsunami	100,00%	100,00%	100,00%	99,79%	99,79%	100,00%	100,00%	100,00%	99,53%	99,81%	100,00%

Penyampaian rekapitulasi akumulasi kekurangan jam kerja pegawai yang sudah dikonversi menjadi hari dan selanjutnya dilakukan tindak lanjut atas penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan

REKAP HUKUMAN DISIPLIN DAN KODE ETIK TAHUN 2023

		JUMLAH			
NO	UNIT KERJA	HUKUMAN DISIPLIN	PELANGGARAN KODE ETIK		
1	Pejabat Struktural Eselon I	0	0		
2	Pejabat Fungsional Utama	0	0		
3	Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat	0	0		
4	Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum	0	0		
5	Biro Umum	2	0		
6	Direktorat Kearsipan Pusat	0	0		
7	Direktorat Kearsipan Daerah I	0	0		
8	Direktorat Kearsipan Daerah II	0	0		
9	Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi	0	0		
10	Direktorat Akuisisi	0	0		
11	Direktorat Pengolahan	2	0		
12	Direktorat Preservasi	0	0		
13	Direktorat Layanan dan Pemanfaatan	0	0		
14	Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan	0	0		
15	Pusat Data dan Informasi	0	0		
16	Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan	0	0		
17	Pusat Diklat Kearsipan	0	0		
18	Pusat Jasa Kearsipan	2	0		
19	Pusat Akreditasi Kearsipan	0	0		
20	Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan	0	0		
21	Inspektorat	0	0		
22	Balai Arsip Statis dan Tsunami	0	0		

- Penindakan atas dugaan pelanggaran kode etik terhadap 1 orang pegawai
- Penyampaian rekapitulasi akumulasi kekurangan jam kerja pegawai yang sudah dikonversi menjadi hari dan selanjutnya dilakukan tindak lanjut atas penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan
- e) Administrasi Pengurusan Satyalancana Karya Satya

 Dalam rangka pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan

 Satyalancana Karya Satya (SLKS), dilaksanakan konsultasi dan
 koordinasi ke instansi pembina yaitu Sekretariat Negara.

Adapun hasil yang telah dicapai dalam pengurusan SLKS adalah:

- Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya XXX (30
 Tahun) kepada 23 orang pegawai
- Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya XX (20 Tahun)
 kepada 11 orang pegawai

c. Layanan Pembinaan dan Penilaian Kinerja Pegawai [053]

a) Tahap Persiapan Layanan Pembinaan dan Penilaian Jabatan

Fungsional

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada subkomponen ini adalah:

- Tersedianya pemutakhiran database angka kredit jabatan fungsional yang akan digunakan dalam kegiatan penilaian angka kredit periode Juli s.d. Desember 2022, Januari-Juni 2023/ Januari-Desember 2023 yang terdiri dari database Jabatan Fungsional Perancang Perundang-Undangan, Analis dan Pranata SDMA, Pranata Komputer, Arsiparis, Pranata Humas, Perencana, Analis Anggaran, Analis Kebijakan, Analis Pengelola Keuangan APBN, Asesor SDM aparatur, Auditor, Penata Laksana Barang, Penerjemah, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, Pengembang Teknologi Pembelajaran, Perawat, Pranata Keuangan APBN, Pustakawan, Widyaiswara dan Analis Bangkom;
- Persiapan penilaian angka kredit Periode Juli s.d. Desember 2022,
 Januari-Juni 2023/ Januari-Desember 2023;
- Persiapan pengembangan aplikasi untuk penilaian angka kredit (Aplikasi Semakinjago dan Semakin Cakep).

b). Layanan Penyusunan SKP

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada subkomponen ini adalah:

- Fasilitasi Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi E-Kinerja untuk seluruh JPT di Hotel Le Meridien Jakarta;
- Fasilitasi Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi E-Kinerja untuk seluruh pegawai ANRI;
- Pendampingan Aplikasi E-Kinerja untuk seluruh Unit Kerja ANRI;
- Fasilitasi FGD Pembagian Peran dan Hasil JF Utama di Lingkungan ANRI.

c). Layanan Penilaian Jabatan Fungsional

Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan layanan penilaian jabatan fungsional adalah sebagai berikut:

- Fasilitasi penilaian angka kredit secara mandiri periode Juli s.d Desember 2022 untuk jabatan fungsional:
 - a. Analis dan Pranata SDMA;
 - b. Pranata Komputer;
 - c. Arsiparis;
 - d. Perancang Perundang-Undangan;
 - e. Pranata Humas;
 - f. Perencana.
- Fasilitasi penilaian angka kredit secara ke instansi pembina periode
 Juli s.d Desember 2022 untuk jabatan fungsional:
 - a. Analis Kebijakan;
 - b. Auditor;
 - c. Penerjemah;
 - d. Pustakawan;
 - e. Widyaiswara;
 - f. Asessor SDMA;
 - g. Analis Anggaran;
 - h. Analis dan Pranata Keuangan APBN.
- Fasilitasi penilaian periodik Januari-Juni 2023 di Aplikasi Semakin Cakep bagi 126 pejabat fungsional yang diprediksi mendapat kenaikan pangkat pada periode Oktober 2023 dan 22 pejabat fungsional yang diprediksi dapat naik jabatan;
- Fasilitasi usul kenaikan pangkat pada dengan melengkapi data dan berkas yang di butuhkan pada Aplikasi SIASN:
 - a. Periode April 2023 sebanyak 46 pejabat fungsional;
 - b. Periode Oktober sebanyak 177 pejabat fungsional (dengan penilaian butir kegiatan dan penilaian periodik SKP);
 - c. JF Pranata SDMA 1 orang.
- Fasilitasi konversi angka kredit konvensional ke integrasi.
- d). Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

- Fasilitasi uji kompetensi untuk kenaikan jenjang, alih kategori dan perpindahan jabatan bagi jabatan fungsional:

- a. Analis Pengembangan Kompetensi;
- b. Analis Kebijakan;
- c. Analis dan Pranata SDMA;
- d. Pranata Komputer;
- e. Arsiparis;
- f. Auditor:
- g. Penerjemah;
- h. Perancang Perundang-Undangan;
- Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa;
- j. Pranata Humas;
- k. Pustakawan;
- Widyaiswara;
- m. Asessor SDMA;
- n. Analis dan Pranata Keuangan APBN.
- Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kenaikan jabatan/alih kategori secara mandiri bagi Pejabat Fungsional Arsiparis di Lingkungan ANRI sebanyak 67 orang;
- Fasilitasi Bimbingan dan Konsultasi Uji Kompetensi JF Pranata Komputer Fasilitasi penyelenggaraan Bimbingan Teknis Tim Penilai Analis dan Pranata SDM.

E. Layanan Pendidikan dan Pelatihan

Pada bulan Januari s.d. Desember pada Tahun 2023, Layanan Pendidikan dan Pelatihan telah dilaksanakan sesuai dengan realisasi capaian kinerja pada matrik capaian realisasi fisik dan keuangan yaitu sebagai berikut:

Tabel 16 Capaian Kinerja Layanan Pendidikan dan Pelatihan

No	Bulan	Capaian Realisasi Keuangan (%)	Capaian Realisasi (jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya)	Capaian Realisasi Fisik (%)
1	Januari	0,16	0	5
2	Februari	0,76	0	15
3	Maret	23,48	357	20

4	April	19,13	15	2
5	Mei	1,59	150	18
6	Juni	12,2	77	10
7	Juli	8,09	85	5
8	Agustus	17,82	3	5
9	September	13,26	1	10
10	Oktober	0,98	2	5
11	November	0,38	8	5
12	Desember	2,11	2	5
	Total	99,96	700	100

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Tanggal
1	Leadership Training oleh Jamil Azzaini	Biro OKH dan Akademi Trainer	04 January 2023
2	Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Keuangan	Biro OKH dan Biro Umum	25-27 Januari 2023
3	Pelatihan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) Pertama Angkatan XVI Tahun 2023	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia	24 Januari s.d. 19 Mei 2023
4	Sharing Session Ilmu Intelijen dari Badan Intelijen Negara	ANRI dan BIN	02 February 2023
5	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan I Tahun 2023	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia	7 Februari s.d. 15 Juni 2023
6	Pelatihan Hiperkes dan KK (K3) Bagi Paramedis Sertifikasi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia secara online	Bina Okupasi Indonesia	20 s.d. 24 Februari 2023
7	Diklat Fungsional Jabatan Fungsional Penerjemah Ahli Pertama secara daring	Pusat Pembinaan Penerjemah Sekretariat Kabinet Republik Indonesia	20 Februari s.d. 3 Maret 2023

0	Deletiben Intensive TOFFI	ODD Language	20 Fab a d 2
8	Pelatihan Intensive TOEFL	QBB Language	20 Feb s.d. 3
	dan Test TOEFL ITP	Service	Maret 2023
	(Institutional Testing		
	Program)/Paper based	ANID!	00 5
9	Arahan Menteri	ANRI	28 Februari
	Pendayagunaan Aparatur		2023
	Negara dan Reformasi		
	Birokrasi		
10	Studi banding dalam rangka	ANRI dan BPOM	2 Maret 2023
	implementasi sistem		
	merit pada Badan Pengawas		
	Obat dan Makanan		
11	Pelatihan Red Hat	Sciencom Training	6 s.d. 9 Maret
	Entreprise Virtualization		2023
12	Pelatihan Manajemen	Lembaga	10 s.d. 17
	Talenta Angkatan I	Administrasi	Maret 2023
		Negara Republik	
		Indonesia	
13	Pelatihan ECSCS Threshold	Lembaga	14 s.d. 16
	Level For National	Administrasi	Maret 2023
	Leadership Training Level 1	Negara Republik	
	Tahun 2023	Indonesia	
14	Pelatihan Kepemimpinan	Lembaga	14 Maret s.d.
	Nasional Tingkat II Angkatan	Administrasi	3 Agustus
	VIII yang dilaksanakan	Negara Republik	2023
	dengan metode blended	Indonesia	
	learning		
15	Seminar Penulisan Surat	ANRI dan	20 Maret 2023
	dan Penggunaan Bahasa	Kemendikbud	
	Indonesia yang baik dan		
	benar yang diselenggarakan		
	secara online		
16	Pelatihan Tata Cara	Lembaga	20 s.d. 21
	Penyelenggaraan e-	Penyelenggara	Maret 2023
	Purchasing melalui e-	Pelatihan Pusat	
	Catalogue dalam	Pengkajian	
	Pengadaan Barang/Jasa	Informasi Nasional	
17	Pelatihan Fungsional Auditor	Pusdiklatwas	27 Maret s.d
	Terampil yang dilaksanakan	BPKP	30 Mei
	dengan metode blended		2023 di
	learning		
18	Penilaian Kompetensi	BKN	3 s.d. 6 April
	Manajerial dan Sosial		2023
	Kultural dalam Seleksi Calon		
	Peserta Diklat Penjenjangan		
	Auditor Ahli Utama		
19	Feedback Hasil Assessment	ANRI	05 April 2023
	Center dengan Pendekatan		
	Coaching		
L	Joaching	<u> </u>	<u> </u>

20	Professional Communication in English (PCE) Programme di UBD-FPT Global Centre in	Pemerintah Brunei Darussalam	8 Mei s.d. 23 Juni 2023
21	Da Nang, Vietnam Bimbingan Teknis Pengelolaan Museum	Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bersinergi dengan Asosiasi Museum Indonesia (AMI) DKI Jakarta Paramita Jaya	9 s.d. 11 Mei 2023
22	Kursus Bahasa Belanda Sumber Sejarah	LBI UI	16 Mei s.d 31 Juli 2023
23	Pelatihan Fungsional Auditor Terampil	Pusdiklatwas BPKP	19 s.d 30 Mei 2023
24	Diklat Fungsional Penjenjangan Arsiparis	Pusdiklat ANRI	6 Juni s.d. 5 Juli 2023
25	Diklat Fungsional Penjenjangan Auditor Madya	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	12 Juni s.d.11 Juli 2023
26	Pelatihan Pengujian Bahan Baku Serat dan Pulp	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa (BBSPJIS)	13 s.d. 15 Juni 2023
27	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	LAN	13 dan 15 Juni 2023
28	Orientasi PPPK ANRI Formasi TA 2022	LAN dan ANRI	3 s.d. 21 Juli 2023
29	Diklat Dasar-Dasar Kearsipan bagi PPPK ANRI Formasi TA 2022 secara luring	ANRI	13 s.d. 16 Juli 2023
30	Pelatihan Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan APIP dengan metode pembelajaran jarak jauh	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	20 s.d. 26 Juli 2023

0.1	01 ' 1/ 1 ' '	DDOM : AND:	04 1 11 0000
31	Sharing Knowledge bagi seluruh pegawai ANRI terkait Penerapan Sistem Merit di Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara daring Pelatihan Peningkatan	BPOM dan ANRI PT. QBB	24 Juli 2023 9 s.d. 11
32	Kompetensi SDM atau Training Manajemen dengan tema "Negotiation Skill for HR" pada tanggal 9 s.d. 11 Agustus 2023 di Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah sebanyak 27 pegawai;	FI. QDD	Agustus 2023
33	Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Angkatan 10 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 5 s.d. 19 September 2023 secara daring	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN Badan Kepegawaian Negara	5 s.d. 19 September 2023
34	Pelatihan Certified Government Accounting Expert (CGAE) yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP tanggal 4 s.d. 7 September 2023 di Royal Padjajaran Hotel, Bogor, Jawa Barat dan Ujian Sertifikasi tanggal 13 September 2023 secara daring dari tempat kedudukan masing-masing	Pusdiklatwas BPKP	4 s.d. 7 September 2023
35	Diklat Teknis Audit Pengadaan Barang dan Jasa	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, BPKP	9 s.d. 13 Oktober 2023
36	Pelatihan Manajemen Talenta Angkatan V	Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosio Kultural LAN RI	12 s.d. 19 Oktober 2023
37	Pelatihan Analisa Beban Kerja	Inovasi Sigma Perkasa	14 November 2023
38	Kongres Bahasa Jawa ke VII	Pemerindah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I.	27 November s.d. 1 Desember 2023

		Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur	
39	Sosialisasi Prosedur Beracara di Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara dan Perdata	ANRI-Jamdatun Kejaksaan Agung	04 December 2023
40	Pelatihan Managing <i>Work Life Balance</i>	ANRI-PT.CSL	12 Desember 2023

F. Layanan Reformasi Kinerja

051. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Selama tahun 2023 capaian kinerja organisasi untuk penyusunan standar kompetensi jabatan di lingkungan ANRI sebagai berikut:

a. Januari

- Penyampaian permohonan penyusunan surat perintah Tim RB unit kerja
- Penyusunan draf Kepka Role Model 2023
- Penyusunan draf Kepka Tim RB ANRI 2023

b. Februari

- Sosialisasi Reformasi Birokrasi Berdampak dan Praktik Baik Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Pembinaan, Deputi Bidang Konservasi Arsip, Sekretariat Utama dan Deputi IPSK
- Asistensi Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Direktorat Akuisisi
- Sosialisasi Evaluasi Reformasi Birokrasi Berdampak oleh Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Penerapan Kebijakan RB KemenPANRB
- Pengusulan Praktik Baik Reformasi Birokrasi dari Sekretariat
 Utama dan Deputi Konservasi Arsip kepada Kepala ANRI
- Penyusunan uraian Praktik Baik di lingkungan Sekretariat
 Utama "Uber Arsip dan SI BMN AMAN"

c. Maret

- Sosialisasi Reformasi Birokrasi Berdampak dan Praktik Baik Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Pembinaan, Deputi Bidang Konservasi Arsip, Sekretariat Utama dan Deputi IPSK
- Pendampingan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Direktorat Akuisisi
- Sosialisasi Evaluasi Reformasi Birokrasi Berdampak oleh Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Penerapan Kebijakan RB KemenPANRB
- Pengusulan Praktik Baik Reformasi Birokrasi dari seluruh Unit Kerja Eselon I kepada Kepala ANRI
- Pendampingan Pengisian Form Praktik Baik RB di Direktorat Preservasi (LARASKA) dan Direktorat Layanan dan Pemanfaatan (Layanan Arsip Statis)
- Pendampingan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan
 Pusdiklat Kearsipan
- Submit Praktik Baik RB ANRI 2023 (LARASKA dan Layanan Arsip Statis)

d. April

- Pendampingan Pembangunan ZI di lingkungan Direktorat
 Pengolahan
- Persiapan Penilaian (Evaluasi) Pembangunan ZI Bersama
 Inspektorat
- Pencanangan ZI di lingkungan Biro Umum, Biro OKH dan Biro Renmas
- Pencanangan ZI di lingkungan Direktorat Preservasi
- Pencanangan ZI di lingkungan Direktorat Akuisisi

e. Mei

 Penilaian Pendahuluan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Sekretariat Utama:
 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan, Pusat Jasa Kearsipan, Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum, Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat, dan Biro Umum;

- Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Deputi Pembinaan Kearsipan
- Koordinasi evaluasi RB General

f. Juni

- Pembahasan identifikasi masalah dan strategi akselerasi peningkatan indeks RB general di lingkungan ANRI:
 Biro Umum (7 Juni 2023), Inspektorat (15 Juni 2023), Biro OKH (16 Juni 2023), Pusdatin, Pusjibang dan Pusat SJIKN (19 Juni 2023), dan Biro Renmas (20 Juni 2023)
- Pengumpulan data untuk perubahan roadmap RB ANRI 2020-2024

g. Juli

- Penyusunan kerangka roadmap RB ANRI 2020-2024
- Monitoring dan Evaluasi aplikasi Sistem Informasi Pelayanan
 Publik Nasional (SIPPN)
- Tindak lanjut pengajuan sanggah pembangunan ZI BAST
- Koordinasi monev SP4N-LAPOR

h. Agustus

- Penyampaian kerangka roadmap RB ANRI 2020-2024
- Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan
 Publik di Pusdiklat Kearsipan
- Evaluasi ZI tahap wawancara Direktorat SDMKS, Pusat Jasa Kearsipan dan BAST
- Penyusunan Rencana Aksi RB General ANRI

i. September

- Persiapan prapenilaian Indeks Kualitas Kebijakan
- Internalisasi RB General dan RB Tematik di lingkungan Dekon
- Persiapan Penilaian SAKIP
- Penilaian Mandiri Evaluasi Kelembagaan
- Entry meeting evaluasi RB general dan RB Tematik dengan Tim Evaluator Internal
- Penilaian Mandiri Penyelenggara Pelayanan Publik di Biro
 Perencanaan dan Humas dan Direktorat Preservasi
- Sosialisasi portal RB Nasional

Penyampaian surat penetapan operator portal RB Nasional
 ANRI dalam rangka Evaluasi RB ke Kementerian PANRB

i. Oktober

- Sosialisasi SKM kepada seluruh Unit Pelayanan Publik ANRI bersama Biro Renmas.
- Sosialisasi aplikasi portal RB Nasional kepada pengampu indeks RB General dan RB Tematik yang ada di ANRI
- Penginputan Rencana Aksi RB General Biro OKH, Biro Renmas, Biro Umum, Pusdatin, Pusjibang Inspektorat, ke dalam Portal RB Nasional
- Penginputan Rencana Aksi RB Tematik Direktorat Preservasi dan Direktorat Layanan dan Pemanfaatan ke dalam Portal RB Nasional
- QnA Portal RB Nasional Bersama Kementerian PANRB dan pengampu Indeks RB ANRI
- Sosialisasi Evaluasi Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan
 Publik ANRI kepada Unit Pelayanan Publik ANRI

k. November

Sosialisasi Indeks Profesionalitas ASN

I. Desember

- Menghadiri Penganugerahan Zona Integritas WBK Unit Kerja BAST dan SDMKS
- Menghadiri Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

052. Implementasi Revolusi Mental

Selama tahun 2023 capaian kinerja organisasi untuk penyusunan standar kompetensi jabatan di lingkungan ANRI sebagai berikut:

a. Januari

- Persiapan Penganugerahan Agen Perubahan Terbaik
- Penganugerahan Agen Perubahan Terbaik dan Terfavorit Tahun
 2022

- Penyampaian permohonan prioritas peningkatan kompetensi untuk pemenang Agen Perubahan Terbaik dan Terfavorit Tahun 2022
- Pemilihan Agen Perubahan Biro OKH 2023-2024
- Pemantauan dan rekapitulasi pemilihan Agen Perubahan seluruh unit kerja 2023
- Penyusunan draf Kepka Agen Perubahan 2023

b. Februari

- Pertemuan Agen Perubahan tahun 2023-2024 dengan Alumni
 Agen Perubahan, Pokja Manajemen Perubahan dan Sekretariat
 RB
- Persiapan Sharing Session Agen Perubahan ANRI dengan tema
 "Inovasi Berdampak dan Terukur"

c. Maret

- Sharing Session Agen Perubahan ANRI dengan tema "Inovasi Berdampak dan Terukur"
- Pemaparan Inovasi dan Rencana Tindak Agen Perubahan bersama PPT Pratama

d. April

 Identifikasi layanan publik ANRI untuk penetapan sebagai quick wins bersama Pokja Manajemen Perubahan

e. Mei

- Seminar core values ASN

f. Juni

- Monitoring Rencana Tindak Agen Perubahan ANRI

g. Juli

Pemberian materi implementasi Core Values ASN BERAKHLAK kepada PPPK

h. Agustus

tidak ada kegiatan revolusi mental

i. September

Pertemuan Pokja Manajemen Perubahan dengan Alumni Agen
 Perubahan terkait peran Agen Perubahan di tahun 2024

j. Oktober

- Monitoring Rencana Aksi Agen Perubahan ANRI 2023

k. November

Penilaian dan Evaluasi Rencana TIndak Inovasi Agen
 Perubahan ANRI 2023

I. Desember

Penetapan Agen Perubahan Terbaik dan Terfavorit

3.3 Analisis Akuntabilitas Kinerja

Tabel 17 Capaian Kinerja Biro OKH Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	KETERANGAN
Indeks Reformasi Birokrasi	80,05 (A)	-	Menunggu penilaian dari Kementerian PAN dan RB
Indeks Sistem Merit	325 (A)	355 (Sangat Baik)	
Indeks BerAKHLAK	65	53,2 (Cukup Sehat)	
Indeks Profesionalitas ASN	Tinggi (81)	78,29 (Sedang)	
Indeks Reformasi Hukum	85	86,68	

A. Layanan Hukum

No.	Jenis	2021			2022			2023		
Kode	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Akun										
3614.	Layanan	1	1	90%	1	1	98,72%	1	1	95,29%
EBA.957	Hukum	Layanan	Layanan		Layanan	Layanan		Layanan	Layanan	

B. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

051. Monitoring dan Evaluasi SOP AP Unit Kerja di Lingkungan ANRI

Monitoring dan Evaluasi SOP AP Unit Kerja tahun ini menetapkan target terselesaikannya (minimal 50%) dari seluruh SOP di lingkungan Arsip Nasional RI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perubahan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku yang memiliki dampak terhadap tata cara penyusunan SOP turut memberikan kontribusi terhadap perubahan penyusunan SOP. Penyesuaian tahapan kegiatan di mana saat ini sebagian besar sudah menggunakan teknologi yang mendorong terjadinya perubahan terkait tata cara atau mekanisme bekerja.

Tahun ini Tim SOP mencapai target lebih dari yang ditetapkan yaitu di mana kami menetapkan penyelesaian SOP sejumlah 55, dan berhasil menyelesaikan revisi dan penyusunan SOP baru sejumlah 253 buah SOP di lingkungan Arsip Nasional RI.

052. Penyusunan Analisis Jabatan di Lingkungan ANRI

Dari persebaran data Analisis Jabatan di lingkungan ANRI sampai dengan akhir tahun 2023 sudah 100% analisis jabatan yang disusun secara manual, namun untuk analisis jabatan yang sudah diverifikasi sudah 98,9% dan analisis jabatan yang diinput ke dalam aplikasi Perencanaan SIASN sudah 97,8%. Hal tersebut terkendala akibat banyaknya anggota tim analisis jabatan yang sudah dibagi tugasnya, tidak mengumpulkan tepat waktu dalam hal ini bisa sampai keterlambatan 1-2 bulan dari tanggal waktu yang ditetapkan. Maka dari itu, menyebabkan keterlambatan dalam hal verifikasi dan penginputan data ke dalam aplikasi Perencanaan SIASN. Koordinasi sudah dilakukan namun dengan adanya beban kerja yang tinggi sehingga anggota tim masih mengutamakan pekerjaan utamanya. Dari permasalahan tersebut, solusi yang akan dilakukan yaitu menyelesaikan verifikasi analisis jabatan dan input data ke dalam aplikasi Perencanaan SIASN untuk analisis jabatan yang tersisa di awal tahun 2024.

053. Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja ANRI

Pada tahun 2023, dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia, maka kegiatan Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja ANRI difokuskan kepada

penyusunan Peraturan ANRI (PerANRI) tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) ANRI sebagai turunan dari Peraturan Presiden tersebut. Dalam penyusunannya secara garis besar ditemui hambatan seperti ketidaksepahaman beberapa pihak terhadap tugas dan fungsi yang dirumuskan, maka diperlukan beberapa kali rapat di ranah Pimpinan maupun unit kerja yang bersangkutan. Tetapi hambatan tersebut dapat diatasi dengan cukup baik, sehingga rancangan PerANRI tentang OTK telah berhasil disusun dan sudah mendapatkan surat persetujuan dari Kementerian PANRB Nomor B/1387/M.KT.01/2023 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja ANRI. Sehingga saat ini sudah memasuki tahap/proses harmonisasi.

Selain itu, untuk memenuhi pelaksanaan SE Menpan No. 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyesuaian Sistem Kerja dalam rangka Evaluasi RB Tahun 2023, juga telah berhasil dilaksanakan kegiatan Evaluasi Kelembagaan ANRI pada tahun 2023 yang Laporan Hasil Evaluasi Kelembagaan tersebut telah disampaikan kepada Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB melalui Surat Sekretaris Utama Nomor B-OT.00/4406/2023 tanggal 3 Oktober 2023.

Kemudian pada tahun 2023 juga dilaksanakan kegiatan penerjemahan terhadap PerANRI No. 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI ke dalam Bahasa Inggris untuk keperluan kerja sama/ kemitraan ANRI dengan pihak luar negeri. Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan, namun karena adanya kurang koordinasi di dalam internal unit Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum, maka penyelesaian tahap akhir peraturan ini telah memakan waktu yang cukup lama. Namun hal tersebut juga sudah dapat diatasi dengan baik.

Sehingga secara umum, kegiatan Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja ANRI sudah berjalan dengan baik, namun memang diperlukan peningkatan koordinasi dari berbagai pihak yang bersangkutan kedepannya, agar hambatan-hambatan sebelumnya dapat lebih teratasi dengan baik.

054. Penerapan Analisis Beban Kerja di Lingkungan ANRI

Dari persebaran formasi jabatan fungsional di lingkungan ANRI, ditemukan beberapa permasalahan untuk dilakukan penghitungan ulang analisis beban kerjanya seperti Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN, Pranata Komputer, Auditor, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dikarenakan terdapat pegawai yang ingin perpindahan jabatan ataupun naik jenjang terkendala formasi. Oleh karena itu, perlu berkoordinasi kembali dengan instansi pembina dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam hal pemberian rekomendasi formasi dan penetapan formasi ulang.

Selain kelima jabatan fungsional tersebut, terdapat jabatan fungsional yang belum menyampaikan permohonan rekomendasi formasi dan penetapan Menteri seperti Jabatan Fungsional Perencana sehingga perlu dihitung dengan menggunakan instrumen baru dari instansi pembina. Kemudian terdapat Jabatan Fungsional baru yang dihitung analisis beban kerjanya untuk muncul di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan yaitu Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN. Kendala yang sering ditemui dalam hal penerapan analisis beban kerja yaitu koordinasi dengan instansi pembina yang agak sulit dikarenakan kesibukan masing-masing instansi pembina untuk membina pemangku jabatan fungsional secara nasional.

055. Monitoring dan Evaluasi Proses Bisnis

056. Penyempurnaan Evaluasi Jabatan di Lingkungan ANRI

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1103 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, dirasa perlu untuk menyesuaikan nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dan sudah dilakukan usul konversi validasi evaluasi jabatan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun seiring berjalan tahun 2023, telah terbit kembali untuk mencabut Keputusan Menteri sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 656 Tahun 2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dari yang sebelumnya sudah diajukan, perlu disesuaikan kembali dengan lampiran yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga perlu mengubah peta jabatan kembali.

057. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan ANRI Berkaitan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia, yang juga berdampak kepada kegiatan Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja ANRI difokuskan kepada penyusunan Peraturan ANRI (PerANRI) tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) ANRI sebagai turunan dari Peraturan Presiden tersebut, maka Standar Kompetensi Jabatan (Stankomjab) Struktural baik bagi Jabatan Pimpinan Tinggi maupun Jabatan Administrasi di lingkungan ANRI memerlukan penyesuaian kembali. Karena itulah kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan ANRI pada tahun 2023 difokuskan terlebih dahulu kepada perubahan Kepka ANRI No. 147 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia yang diproyeksikan akan dibutuhkan untuk open bidding atau pelantikan Pejabat Struktural dengan nomenklatur Jabatan baru kedepannya. Dari target 37 jabatan, namun baru 16 jabatan yang telah terverifikasi, dikarenakan rancangan PerANRI tentang OTK ANRI pun masih memerlukan proses harmonisasi.

Sehingga secara umum, kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan ANRI sudah berjalan dengan baik, namun memang diperlukan percepatan proses harmonisasi OTK ANRI yang sudah final, agar Stankomjab Struktural tersebut juga dapat cepat dilakukan penyesuaian tahap final.

C. Layanan Umum

Tabel 18 Capaian Kinerja Layanan Umum

No.	Jenis	2021	2022	2023	

Kode Akun	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
3614.	Layanan	1	1	99,61%	1	1	98,95%	1	1	99,31%
EBA.962	Umum	Layanan	Layanan		Layanan	Layanan		Layanan	Layanan	

D. Layanan Pendidikan dan Pelatihan

No.	Jenis Kegiatan	2	2021		2022			2023		
Kode Akun		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
3614.	Layanan	683	683	99,61%	783	783	99,57%	687	700	99,96%
EBC.996	Pendidikan	orang	orang		orang	orang		orang	orang	
	dan									
	Pelatihan									

E. Layanan Reformasi Kinerja

051. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau tahap akhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas, tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Reformasi Birokrasi juga mendorong ANRI agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak ANRI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture set harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan performa/kinerjanya.

Untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas kebijakan dan penerapan good governance dengan melaksanakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, efektif dan efisien di lingkungan Arsip Nasional RI dilakukan kegiatan untuk memperkuat Reformasi birokrasi dilingkungan ANRI dengan memulai menerapkan RB berdampak melalui tema-tema sesuai kekhasan yang dimili oleh ANRI, seperti tema layanan arsip statis, restorasi arsip keluarga dan kekhasan lainnya. Selain tema-tema substansi ANRI juga mulai menerapkan RB berdampak di lingkungan

fasilitatif seperti tema kehumasan, tema terkait aset, sistem informasi bidang kepegawaian dan tema-tema fasilitatif lainnya yang dapat mempercepat penyelesaian pekerjaan yang lebih efektif dan efesien. Selain itu ANRI mulai melakukan percepatan terhadap tata kelola pemerintahan melalui peningkatan indeks-indeks dan nilai antara yang termasuk dalam RB general. Nilai antara dan RB General dilingkungan ANRI dikelola dan dilaksanakan oleh unit yang ditunjuk sebagai leading sector sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai Peraturan ANRI nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI. Selain melalui reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas kebijakan dan penerapan good governance dengan melaksanakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, efektif dan efisien di lingkungan Arsip Nasional RI juga dilakukan melalui Pembangunan Zona Integritas pada unit pelayanan publik ANRI yang telah ditentukan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan Instruksi Kepala ANRI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan ANRI.

Secara umum, kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan ANRI sudah berjalan dengan baik, namun memang diperlukan percepatan proses peningkatan Indeks yang ada di RB ANRI, agar Pelayanan Publik yang ada di ANRI lebih baik lagi.

052. Implementasi Revolusi Mental

Revolusi mental merupakan gerakan bersama untuk mengubah cara pikir, cara kerja, cara hidup dan sikap serta perilaku bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong berdasarkan Pancasila yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi Mental memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan nasional. Karakter dan sikap mental harus diubah ke arah yang lebih baik dengan dorongan pemerintah dan gerakan masyarakat. Mentalitas disiplin, etos kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih serta gotong royong adalah karakter dan sikap mental yang diperlukan untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing, sehingga mampu berkompetisi dengan negara-negara lain. Revolusi mental dalam pelaksanaanya di ANRI memfokuskan pada pembangunan

Agen Perubahan. Dalam menggerakan birokrasi pemerintahan yang profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Instansi Pemerintah.

Secara umum, kegiatan Revolusi Mental di Lingkungan ANRI sudah berjalan dengan baik, namun memang diperlukan perubahan pola revolusi mental khususnya terhadap Agen Perubahan agar inovasi yang ada di ANRI semakin berkembang.

3.4 Capaian/Realisasi Anggaran

A. Layanan Hukum

Tabel 19 Realisasi Anggaran Layanan Hukum

Periode	Pagu Revisi	Realisasi Keuangan		Realisasi
	(tanpa			Fisik
	blokir)			%
		Rp.	%	
Oktober		58.646.000	24.53%	83.40%
November	239.100.000	9.438.012	3.95%	83.40%
Desember		61.650.000	25.78%	95.29 %

B. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

sebesar Rp69.505.000.

051. Monitoring dan Evaluasi SOP AP Unit Kerja di Lingkungan ANRI

052. Penyusunan Analisis Jabatan di Lingkungan ANRI
Pada tahun 2023 telah terealisasi anggaran Penyusunan Analisis Jabatan
di Lingkungan ANRI sebesar Rp117.300.000 atau sebesar 100% dari
PAGU revisi sebesar Rp117.300.000.

053. Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja ANRI Pada tahun 2023 telah terealisasi anggaran Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja ANRI sebesar Rp69.490.000 atau sebesar 99,98% dari PAGU

054. Penerapan Analisis Beban Kerja di Lingkungan ANRI

Pada tahun 2023 telah terealisasi anggaran Penerapan Analisis Beban Kerja di Lingkungan ANRI sebesar Rp57.724.500 atau sebesar 99,90% dari PAGU revisi sebesar Rp58.600.000.

055. Monitoring dan Evaluasi Proses Bisnis

056. Penyempurnaan Evaluasi Jabatan di Lingkungan ANRI Pada tahun 2023 telah terealisasi anggaran Penyempurnaan Evaluasi Jabatan di Lingkungan ANRI sebesar Rp13.125.000 atau sebesar 100% dari PAGU revisi sebesar Rp13.125.000.

057. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan ANRI Pada tahun 2023 telah terealisasi anggaran Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan ANRI sebesar Rp45.910.000 atau sebesar 100% dari PAGU sebesar Rp45.910.000 yang merupakan revisi dari PAGU sebelumnya Rp45.610.000.

C. Layanan Umum

Sampai dengan berakhirnya Tahun 2023, dari sisi evaluasi realisasi anggaran, penyerapan anggaran Layanan Umum mencapai 99,31% dari total pagu anggaran sebesar 407.653.000,- Sementara dari sisi evaluasi realisasi capaian kinerja telah mencapai 100%.

D. Layanan Manajemen SDM

- a. Perencanaan dan Mutasi Pegawai [051]
 - 1) Pengadaan Pegawai

Pagu Anggaran Kegiatan Pengadaan Pegawai Tahun 2022 sebesar Rp186.243.000,-. Pada Triwulan ke-I Anggaran yang terserap sebesar Rp25.835.699,- dengan persentase penyerapan 13,87%. Pada Triwulan ke-II Anggaran yang terserap sebesar Rp141.463.409,- dengan persentase penyerapan 75,96%. Pada Triwulan ke-III Anggaran yang terserap sebesar Rp147.496.989,- dengan persentase penyerapan 79,20%.

Pada Triwulan ke-IV terjadi penyesuaian Pagu Anggaran menjadi Rp320.688.000,-, karena adanya kegiatan Pengadaan Pegawai (PPPK Tahun 2023). Anggaran yang terserap s.d Triwulan ke-IV sebesar Rp317.886.542,- dengan persentase penyerapan 99,12%.

2) Uji Kompetensi

Pagu Anggaran Kegiatan Uji Kompetensi sebesar Rp148.825.000,-. Pada Triwulan ke-I dan ke-II Anggaran tidak terserap karena belum ada kegiatan, tetapi terdapat kegiatan yang dilaksanakan di bulan Februari 2023 yaitu terlaksananya Kegiatan Proses Uji Kompetensi Pejabat Administrator (tanggal 10 Februari 2023).

Pada Triwulan ke-III Anggaran yang terserap sebesar Rp11.850.000,- dengan persentase penyerapan 7,96%. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain digunakan untuk sosialisasi implementasi Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Arsip Nasional Republik Indonesia (13 Juli 2023).

Pada Triwulan ke-IV terdapat penyesuaian Anggaran karena kebutuhan untuk kegiatan Pengadaan Pegawai (PPPK) Tahun 2023, sehingga Pagu Anggaran menjadi Rp14.850.000,- dengan persentase penyerapan 100%. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Fungsional pada Tanggal 22 Desember 2023. Adapun realisasi dana yang terserap sebesar Rp3.000,000,-.

3) Pelantikan Pegawai

Pagu Anggaran Kegiatan Pelantikan Pegawai sebesar Rp32.000,000,-. Pada Triwulan ke-I Anggaran yang terserap sebesar Rp12.600.000,- dengan persentase penyerapan 39,37%. Pada Triwulan ke-II Anggaran tidak terserap karena tidak ada kegiatan. Pada Triwulan ke-III Anggaran yang terserap sebesar Rp26.800.000,- dengan persentase penyerapan 83,75%.

Pada Triwulan ke-IV terdapat penyesuaian Anggaran menjadi Rp32.580.000,-. Sampai dengan Triwulan ke-IV Anggaran yang terserap sebesar Rp32.480.000,- dengan persentase penyerapan 99,7%.

4) Mutasi Pegawai

Pagu Anggaran Kegiatan Mutasi Pegawai sebesar 17.532.000,-. Pada Triwulan ke-I Anggaran yang terserap sebesar Rp9.850.000,dengan persentase penyerapan 56,18%. Pada Triwulan ke-II Anggaran vang terserap sebesar Rp11.326.550,persentase penyerapan 64,61%. Pada Triwulan ke-III Anggaran yang terserap sebesar Rp16.581.550,- dengan persentase 94,58%. Pada Triwulan ke-IV Anggaran yang terserap sebesar Rp17.263.350,- dengan persentase penyerapan 98,47%.

5) Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

Pagu Anggaran Kegiatan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah sebesar Rp8.550.000,-. Pada Triwulan ke-I Anggaran yang terserap sebesar Rp1.200.000,- dengan persentase penyerapan 14,04%. Pada Triwulan ke-II Anggaran yang terserap sebesar Rp1.650.000,- dengan persentase penyerapan 19,3%. Pada Triwulan ke-III Anggaran yang terserap sebesar Rp2.850.000,- dengan persentase penyerapan 33,33%. Pada Triwulan ke-IV Anggaran yang terserap sebesar Rp8.250.000,- dengan persentase penyerapan 96,14%.

b. Pelayanan Administrasi dan Kedisiplinan Pegawai [052]

Pagu Anggaran Pelayanan Administrasi dan Kedisiplinan Pegawai sebesar Rp253.178.000,-. Pada Triwulan ke-I Anggaran yang terserap sebesar Rp47.472.739,- dengan persentase penyerapan 18,75%. Pada Triwulan ke-II Anggaran yang terserap sebesar Rp109.387.739,- dengan persentase penyerapan 43,21%. Pada Triwulan ke-III Anggaran yang terserap sebesar Rp160.412.234,- dengan persentase penyerapan 63,62%. Pada Triwulan ke-IV Anggaran yang terserap sebesar Rp 246.583.044,- dengan persentase penyerapan 97,80%.

c. Pembinaan dan Penilaian Kinerja Pegawai [053]

Pagu Anggaran Pembinaan dan Penilaian Kinerja Pegawai sebesar Rp189.930.000,-. Pada Triwulan ke-I Anggaran yang terserap sebesar Rp 12.459.200,- dengan persentase penyerapan 6,56%. Pada Triwulan ke-II Anggaran yang terserap sebesar Rp119.109.800,- dengan

persentase penyerapan 62,71%. Pada Triwulan ke-III Anggaran yang terserap sebesar Rp125.948.500,- dengan persentase penyerapan 66,31%. Pada Triwulan ke-IV Anggaran yang terserap sebesar Rp182.837.500,- dengan persentase penyerapan 96,27%.

E. Layanan Pendidikan dan Pelatihan

Sampai dengan berakhirnya Tahun 2023, dari sisi evaluasi realisasi anggaran, penyerapan anggaran Layanan Pendidikan dan Pelatihan mencapai 99,96% dari total pagu anggaran sebesar Rp1.003.643.000,-Sementara dari sisi evaluasi realisasi capaian kinerja telah mencapai 100%.

F. Layanan Reformasi Kinerja

051. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pada tahun 2023 telah terealisasi anggaran Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan ANRI sebesar Rp 105.225.500 atau sebesar 99,43% dari PAGU sebesar Rp 105.830.000.

052. Implementasi Revolusi Mental

Pada tahun 2023 telah terealisasi anggaran Implementasi Revolusi Mental di Lingkungan ANRI sebesar Rp 36.592.960 atau sebesar 99,19% dari PAGU sebesar Rp 36.893.000.

3.5 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Internal

3.6 Prestasi

Bahwa pada Tahun 2023, Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum memperoleh:

1. Predikat Penilaian dan Indeks Sistem Merit kategori IV (Sangat Baik) dengan nilai **355** dan Indeks **0,87**;



Gambar 2 Penilaian Indeks Sistem Merit 2023

- Perolehan Indeks Profesionalitas ASN sebesar 78,07 dengan kategori Sedang;
- 3. JDIH ANRI menerima penghargaan ke **3 (tiga)** sebagai Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Terbaik (JDIHN AWARDS) Tahun 2023.



Gambar 3 Penghargaan JDIHN Awards 2023

4. Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2023 pada Arsip Nasional Republik Indonesia. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, telah disimpulkan hasil Indeks Reformasi Hukum pada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tahun 2023 adalah 86.68 dengan kategori A (SANGAT BAIK).

Bab 4 Penutup

4.1 Kesimpulan

Bahwa pada dasarnya di Tahun 2023 ini, capaian kinerja Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum adalah sebagai berikut:

No. Kode	Akun	Pagu	Realisasi	%
3614	Pelayanan Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	3.283.613.000	3.244.807.127	98,82%
3614.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.300.989.000	1.272.619.758	97,82%
EBA.957	Layanan Hukum	538.886.000	513.502.421	95,29%
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	354.450.000	354.258.605	99,95%
EBA.962	Layanan Umum	407.653.000	404.858.732	99,31%
3614.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.839.901.000	1.834.910.909	99,73%
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	836.258.000	831.838.436	99,47%
EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	1.003.643.000	1.003.072.473	99,94%
3614.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	142.723.000	141.818.460	99,37%
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	142.723.000	141.818.460	99,37%

4.2 Saran

Dari evaluasi yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023 ini, adapun saransaran yang disampaikan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang adalah dengan meningkatkan pencapaian pelaksanaan kegiatan sehingga dapat selesai tepat waktu dan sesuai target.

Lampiran

Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Drs. Amieka Hasraf, MM.

Jabatan

: Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: Rini Agustiani, SH. MAP.

Jabatan

: Sekretaris Utama

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Rini Agustiani, SH. MAP.

Jakarta, 19 Desember 2022 Pihak Pertama,

Drs. Amieka Hasraf, MM.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BIRO ORGANISASI, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan Organisasi, Kepegawaian dan	1.	Indeks Reformasi Birokrasi	A (80,05)
	Hukum		Indeks Sistem Merit	A

Kegiatan	Anggaran (Rp):
	BB (F).

Pelayanan Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum 4.042.097.000

Jakarta, 19 Desember 2022 Kepala Biro Perencanaan dan Humas

(Drs. Amieka Hasraf, MM.)

(Rini Agustiani, SH. MAP.)

Sekretaris Utama

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Biro OKH Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Revisi ke-1



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 REVISI KE-1

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Amieka Hasraf, MM.

Jabatan : Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rini Agustiani, SH. MAP.

Jabatan : Sekretaris Utama

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Juni 2023

Pihak Pertama,

Rini Agustiani, SH. MAP.

Pihak Kedua,

Drs. Amieka Hasraf, MM.

Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Revisi-1 Biro OKH Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BIRO ORGANISASI, KEPEGAWAIAN, DAN HUKUM

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target		
(1)	(2)		(3)			
1.	Meningkatnya Layanan	1.	1. Indeks Reformasi Birokrasi			
	Organisasi, Kepegawaian,			(80,05)		
	dan Hukum	2.	Indeks Sistem Merit	A		
				(325)		
		3.	Indeks BerAkhlak	65		
		4.	Indeks Profesionalitas ASN	Tinggi		
				(81)		
		5.	Indeks Reformasi Hukum	85		

KegiatanAnggaran (Rp):Pelayanan Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum4.000.435.000

Jakarta, 26 Juni 2023

Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian, dan

Hukum,

(Rini Agustiani, SH. MAP.)

Sekretaris Utama

(Drs. Amieka Hasraf, MM)

Lampiran 4 Perjanjian Kinerja Revisi-1 Biro OKH Tahun 2023

Rencana Aksi

RENCANA AKSI INDEKS SISTEM MERIT, INDEKS REFORMASI HUKUM, DAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN DI BIRO OKH ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NO	INDEKS RB	KENDALA YANG DIHADAPI		RENCANA AKSI						
			RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	WAKTU	PENANGGUNGJAWAB			
		Proses koordinasi dengan instansi terkait	Mengumpulkan bukti ketersediaan Standar Kompetensi Jabatan	SKJ yang telah ditetapkan		Juli 2023				
		Ketersediaan anggaran yang terbatas	Pelaksanaan Assessment dengan Metode SJT untuk seluruh pegawai guna memenuhi ketersediaan profil pegawai	Profil seluruh pegawai berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi		Agustus 2023				
		Menunggu data hasil pelaksanaan assessment pegawai	3. Pembuatan laporan ketersediaan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja	Laporan ketersediaan Talent Pool ANRI 2023		September 2023				
1	Indeks Sistem Merit	Menunggu data hasil pelaksanaan assessment pegawai	4. Pembuatan laporan ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbang-kan pola karir instansi	Laporan ketersediaan rencana suksesi ANRI 2023	Kenaikan Indeks Sistem Merit	September 2023				
		Menunggu data hasil pelaksanaan assessment pegawai	5. Pembuatan laporan analisis kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai 2023	Laporan analisis kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai 2023		September 2023				
			3.6 diserahkan kepada Tim KDDI	,						

				_		
	Menunggu data hasil pelaksanaan assessment pegawai	7. Pembuatan laporan HCDP berdasarkan hasil talent pool	-Laporan HCDP berdasarkan hasil talent pool - Lampiran Kebutuhan Diklat		September 2023	
	Menunggu data hasil pelaksanaan assessment pegawai		Laporan hasil pelaksanaan diklat		September 2023	
	belum ada pedoman/aturan internal tentang magang	9. Menyusun rencana program pengembangan karier melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai	pedoman/aturan magang/pertukaran pegawai		Agustus 2023	
	belum ada pedoman/aturan internal tentang coaching/mentoring	program feedback/coaching bagi pegawai ANRI	pedoman/aturan coaching/mentoring pegawai		September 2023	
	memungkinkan pegawai menginput riwayat diklatnya secara mandiri	- Menunggu Apiikasi Mysapk dapat digunakan secara rutin untuk pemutakhiran data mandiri ASN (seperti riwayat diklat)	- Menu Pemutakhiran Data Mandiri pada Aplikasi MySAPK sudah di buka.	- Update Aplikasi MySAPK dr BKN	- Menunggu info dari BKN	
	Belum terintegrasinya Aplikasi SIAP-ANRI dengan Aplikasi SIASN-BKN Terdapat Bug pada Aplikasi SIASN untuk input riwayat diklat sehingga proses entry dilakukan menggunakan template excel	- Mengembangkan Aplikasi SIAP agar dapat terintegrasi dengan SIASN	- Tim entry data riwayat diklat menambahkan data diklat pada Aplikasi SIAP kemudian data tersebut otomatis masuk ke SIASN	- Riwayat diklat cukup 1x proses input	- Desember 2023	
		- Mengumpulkan bukti hasil keikutsertaan pengembangan kompetensi pegawai ANRI dan di input pada template diklat (excel)	- Rekapitulasi data pengembangan kompetensi pegawai terbaru	- import riwayat diklat menggunakan template (excel) target nilai baik	- sebelum 30 Juni 2023	

2	- Dilakukan sosiasliasi tentang IP ASN pada Tgl 9 Des 2022, namu masih kurangnya pemahaman pegawai tentang komponen pada penilaian IP ASN. - Pegawai tidak sadar bahwa kewajiban mengembangkan kompetensi bukan hanya dari kepegawaian, namun dia sendiri dan atasan langsung.	Sosialisasi IP ASN ke seluruh pegawai	Meningkatnya pemahaman pegawai tentang IP ASN	Pemahaman komponen penilaian pada IP ASN dan Pemenuhan target diklat pertahun	Triwulan 4 tahun 2023	
	Mekanisme penyampaian hasil pengembangan kompetensi: - Diklat struktural bagi pejabat struktural - Diklat Fungsional - Diklat Teknis - Seminar/Workshop Tiap tahunnya.	Pengiriman notdin ke unit kerja untuk mengumpulkan data-data diklat yang diikuti pegawai per triwulan	Bukti (Sertifikat) Hasil Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai	Data riwayat diklat terpenuhi setiap tahunnya	Triwulan 4 tahun 2023	
	Masih terdapat pegawai yang belum mengumpulkan SKP tahun 2022	Mengirim nodin untuk pendampingan pembuatan SKP tahun 2022	SKP Realisasi 2022 lengkap 631 pegawai	Data SKP 2022 lengkap terpenuhi	19-23 Juni 2023	
	Melakukan harmonisasi Produk Hukum ANRI dengan Ke- menterian Hukum dan HAM, dan intansi terkait (Sekretariat Kabinet dan Kementerian PAN RB)	Surat Permohonan Harmo- nisasi yang di tandatangani Pejabat yang berwenang Rancangan Per-ANRI yang sudah di paraf persetujuan Program Penyusunan	B (80 Kriteria Lengkap)	Salah satu indikator penilaian yang tidak dapat dipenuhi dalam penilaian tahun 2023 adalah penilaian terhadap		
	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi dalam rapat pleno penghar-monisasian yang memiliki ke-wenangan dalam pengambilan keputusan.	(Proleg) atau izin prakarsa	atatan: eluruh indikator output (1 s.d o) dalam penghar-monisasian Produk Hukum ANRI lengkap.	pengaharmonisasian RUU, RPP, dan RPERPRES yang tidak disusun oleh ANRI di tahun 2023. RPERPRES tentang ANRI sudah diajukan dalam penilaian IRH tahun 2022.	rmonisasian P, dan S yang tidak oleh ANRI di i23. RPERPRES ANRI sudah dalam	Ketua Tim Pro-gram Legislasi dan Deregulasi Peraturan Kearsipan

		3. Melakukan kegiatan pembinaan pengembangan kompetensi Perancangan Peraturan Per-undang- Undangan	1. Program dan anggaran peningkatan kompetensi Perancang Per-UU 2. Surat Penugasan mengikuti Pelatihan 3. Dokumen yang berisi jumlah partisipasi Perancang Per-UU dalam pengembangan kompetensi (diklat, bimtek, workshop baik klasikal maupun non klasikal.	A (100- Interval 91-100%) Catatan: Partisipasi Perancang ANRI dalam setahun untuk mengikuti pengembangan kompetensi	Penyesuaian dengan rencana (kebijakan dan anggaran) pengembangan kompetensi khusus untuk Perancang Per-UU. Ragam diklat terbatas yang terselenggara bagi Perancang yang diselenggarakan oleh Instansi Pembina	Januari 2022 s.d Agustus 2023	Kepegawaian*)
3	Indeks Reformasi Hukum	4. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap Peraturan Perundang-undangan 5. Proporsi Tahunan Jumlah Peraturan Per-UU yang dievaluasi 6. Tindak lanjut dari Rekomendasi hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap Peraturan Perundang-undangan 7. Tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Peraturan Per-UU	1. Kepka Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Per-UU. 2. Daftar Jumlah Peraturan Per- UU yang ditargetkan untuk dievaluasi. 3. Daftar Jumlah Peraturan Per- UU yang sudah dievaluasi. 4. Laporan dan Rekomendasi hasil dari evaluasi. 5. Surat Keterangan yang menyatakan belum memiliki Pejabat Fungsional Analis Hukum 6. Kepka Tim Analisis dan Evaluasi hukum terhadap Peraturan Per-UU		1. Peran serta pejabat fungsional dari seluruh unit kerja ANRI untuk dapat kembali melakukan evaluasi terhadap Peraturan Per-UU (Peranri) dan melaksanakan rekomendasi dari hasil analisis dan evaluasi Tim Kerja. 2. Meskipun tidak menjadi faktor pembagi, peran jafung analis hukum tetap dibutuhkan bagi pemantauan dan evaluasi terhadap Peraturan Per-UU	Januari 2022 s.d Agustus 2023	Ketua Tim Pro-gram Legislasi dan Deregulasi Peratu-ran Kearsipan

8. Pengelolaan Jaringan Dokumen-tasi dan Informasi Hukum sesuai dengan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum. 9. melakukan koordinasi denga Pusat Data dan Informasi untu ikut serta dalam kegiatan pengembangan Aplikasi JDIH ANRI terbaru, khususnya untul penambahan beberapa fitur antara lain: a. Capture laman JDIH yang terintergrasi ke laman JDIHN. b. Dasar Hukum Pengelolaan JDIH di Instansi. c. SK Tim Pengelola JDIH. d. Struktur Organisasi Pengelo- JDIH. e. SOP Pengelolaan JDIH. f. Abstrak Peraturan Perun-dar undangan. g. Capture Pelaporan melalui E Report. h. Capture Metadata Pengo- lahan Dokumen Hukum. i. Capture Update Data di tahu penilaian. j. Capture URL Integrasi. k. Capture log sinkronisasi Integrasi. l. Capture Media Sosial JDIH	1. Kelengkapan fitur dalam JDIH ANRI sesuai dengan indikator penilaian yang ditentukan oleh BPHN.	A (100- Indikator Penilaian terpenuhi.)	Pengembangan sistem JDIH penambahan fitur baru. Migrasi data portal lama ke dalam portal baru	Juni s.d Desem-ber 2023 (Agustus 2023 akan direview kembali mengi-ngat pengum-pulan bukti dukung penilaian IRH 2023 bera-khir di Agustus 2023)	Ketua Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
---	--	--	---	---	--

Jakarta, 2 Januari 2023 Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum,



RENCANA AKSI INDEKS REFORMASI BIROKRASI, INDEKS SISTEM MERIT, INDEKS REFORMASI HUKUM, INDEKS PROFESIONALITAS ASN, DAN INDEKS BERAKHLAK DI BIRO OKH ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		NCANA AKSI			
					TWI	TWII	TWIII	TW IV	
	Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Reformasi Birokrasi Refersi Indexiskan Anapolica Educational Dikas Indexiskan Anapolica Educational Dikas Indexiskan Anapolica Educational Dikas Indexiskan Anapolica Educational Dikasi Indexiskan Pacifica Educational Dikasi Indexiskan Pacifica Edu	Meningkatnya layanan n, organisasi, kepegawalan dan hukum	Indeks Reformasi Birokrasi	80,05 (A)		Membuat rencana aksi RB general dan RB Tematik Melakukan sosialisasi dan internalisasi RB kepada seluruh pegawai	Membuat roadmap RB penajaman	Monitoring dan evaluasi rencana aksi RB	
1			Indeks Sistem Merit	325 (A)	dan 2024 2. Melakukan Seleksi Kompetensi dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Pengadaan PPPK Tahun 2022 3. Koordinasi dengan unit kerja Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi terkait SKI JF Arsiparis 4. Studi Banding Penilaian Kompetensi Pegawai ke BPOM 5. Pelaksanaan Assesment Center JF Muda dan JF Madya 6. Pemeriksaan Kesehatan (MCU) bagi 62 pegawai 7. Edukasi mengenai Keselamatan dan	2. Usul Penetapan Kebutuhan ASN ANRI Tahun 2023 3. Melakukan Pengumuman Kelulusan Calon PPPK Tahun 2022 4. Melakukan Pengisian dan Usul Penetapan Ni PPPK Tahun 2022 3. Pelatihan Feedback/Coaching Hasil Assesment 4. Pemeriksaan Narkoba bagi 25 orang 5. Sosialisasi mengenal Program dan Layanan Bojis Kesehatan, Taspen Dan Peningkatan Kesejahteraan ASN Melalul Program Taspen Life 6. Sosialisasi dan Penerapan Aktifitas Peregangan	1. Menerima Penetapan Formasi ASN Tahun 2023 (aspek 1) 2. Telah dilaksanakan Orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 sejumlah 42 orang yang dilaksanakan secara luring di Gedung C lantai 3 tanggal 3 s.d. 21 Juli 2023 dengan kurikulum sebagai berikul: a. Pengenalan Fungsi dan Tugas ASN melalui Massive Open Online Course (MOCC) b. Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah 3. Melakukan Pelantikan PPPK Tahun 2022 4. Melakukan Persiapan Pengadaan PPPK Tahun 2023 6. Penilaian Kompetensi Pegawai dengan Metode STI dan Psikotest 7. Pemeriksaan narkoba bagi 32 orang peserta	Melakukan Seleksi Kompetensi dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Pengadaan PPPK Tahun 2023 Melakukan Persiapan Seleksi Terbuka JPT Pratama ANRI (Aspek 2) 3. Pengelolaan Data Hasil penilaian Kompetensi pada Aplikasi Talent Pool 4. Koordinasi dengan BPOM, BKN dan LAN mengenal rencana magang/praktek kerja JF Asesor SDMA/JF Analis SDMA 5. Penyusunan laporan ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi 6. Kerjasama Program Taspen Life Ansurance bagi seluruh pegawai ANRI	
			Indeks BerAKHLAK	65	Menyusun Tim Agen Perubahan melakukan apel setiap senin pagi melakukan olahraga bersama setiap	Memyusunan rencana aksi agen perubahan Membangun Sistem Manajemen Talenta dan Karir	mengukur indeks BerAKHLAK Melakukan pemantauan dan evaluasi rencana aksi agen perubahan	Penghargaan dan apresiasi pegawai terbaik Penghargaan dan apresiasi Agen Perubahan terbaik	
		Pengelolaan Data Diklat dalam rangka Penlilaian IP ASN Tahun 2022 Koordinasi dengan unit kerja mengenai Data Diklat Triwulan I-2023	Pengelolaan Data Diklat dalam rangka Penilalan IP ASN Tahun 2022 Koordinasi dengan unit kerja mengenai Data Diklat Triwulan 1-2023 Sosalikasi IP ASN bagi seluruh pegawai ANRI dalam rangka meningkatnya pemahaman pegawai	Pengelolaan Data Diklat dalam rangka Penilaian IP ASA Tahun 2022 Koordinasi dengan unit kerja mengenai Data Diklat Triwulan III-2023 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat Triwulan I-III Tahun 2023					
			Indeks Reformasi Hukum	85	Penilaian IRH dalam bentuk Keputusan Kepala 2. Membentuk Tim Analis dan Evaluasi Hukum (koordinasi dengan Pusjibang- Analis Kebijakan) 3. Melakukan evaluasi terhadap penilaian	Berkoordinasi dengan Kepegawaian terkait penilaian variabel Pengembangan Kompetensi	Melakukan unggah tahap akhir bukti dukung penilaian IRH 2023 Melakanskan rapat pleno penetapan nilai IRH 2023 bersama Asesor dan Tim Kerja Menetapkan BAP	Melakukan evaluasi dan persiapan untuk penilaian IRH Tahun 2024	

Jakarta, 25 Agustus 2023 Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum,



Lampiran 6 Renaksi Biro OKH Revisi-1 Tahun 2023

RENCANA AKSI INDEKS REFORMASI BIROKRASI, INDEKS SISTEM MERIT, INDEKS REFORMASI HUKUM, INDEKS PROFESIONALITAS ASN, DAN INDEKS BERAKHLAK DI BIRO OKH ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIAB TAHUN 2023

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			KEGIATAN	IARGET	TWI	TWII	TW III	TW IV
1			Indeks Reformasi Birokrasi	80,05 (A)	1. Menyusun tim RB	Membuat rencana aksi RB general dan RB Tematik Melakukan sosialisasi dan internalisasi RB kepada seluruh pegawai	1. Membuat roadmap RB penajaman	Monitoring dan evaluasi rencana aksi RB
	Pelayanan kegiatan organisasi, kepegawaian, dan hukum	Meningkatnya layanan organisasi, kepegawaian dan hukum	Indeks Sistem Merit		Melakukan Seleksi Kompetensi dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Pengadaan PPPK Tahun 2022 Neordinasi dengan unit kerja Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi terkait SKJ JF Arsiprais Studi Banding Penilaian Kompetensi Pegawai ke BPOM S, Pelaksanaan Assesment Center JF Muda dan JF Madya Pemerikasan Kesehatan (MCU) bagi 62 pegawai	hun 2024 Usul Penetapan Kebutuhan ASN ANRI Tahun 2023 123 Melakukan Pengumuman Kelulusan Calon PPPK Nasional Republik Indonesia Tahun Agaran 2022 Melakukan Pengisian dan Usul Penetapan Ni Melakukan Pengisian dan Usul Penetapan Ni PK Tahun 2022 Pelatihan Fedeback/Coaching Hasil Assesment Pemeriksaan Narkoba bagi 25 orang Sosialisasi mengenai Program dan Layanan Bpjs sepiahteraan ASN Melalui Program Taspen Life Sosialisasi dan Penerapan Aktifitas Peregangan waktu Kerja waktu Kerja (aspek 1) 2. Telah dilaksanakan Orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK) Araip Nasili Asserian Aspenalah Republik Indonesia Tahun Alegaran 2022 Jahun 2023 Jengenalah Tilangal As Tugas ASN melalui Massive Open Online Course (MOOC) Jengenalah Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah Jengenalah Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah Jengenalah Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah Jengenalah Nilai dan Etika pada Instansi Jengenalah Nilai dan Pengada PPPK Tahun 2022 Jengenalah Nilai dan Etika pada Instansi		Melakukan Persiapan Seleksi Terbuka JPT Pratama ANRI (Aspek 2) Pengelolaan Data Hasil penilaian Kompetensi pada Aplikasi Talent Pool Koordinasi dengan BPOM, BKN dan LAN mengenai rencana magang/praktek kerja JF Asesor SDMA/JF Analis SDMA Senyusunan laporan ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir
		Inde	Indeks BerAKHLAK	65	melakukan sosialisasi dan Internalisasi Menyusun Tim Agen Perubahan melakukan apel setiap senin pagi melakukan olahraga bersama setiap Jumat pagi	Memyusunan rencana aksi agen perubahan Membangun Sistem Manajemen Talenta dan Karir	menguluri indeks BerAKHLAK Melakukan pemantauan dan evaluasi rencana aksi agen perubahan	Penghargaan dan apresiasi pegawai terbaik Penghargaan dan apresiasi Agen Perubahan terbaik
			Indeks Profesionalitas ASN	Tinggi (81)	2. Menyusun Analis Kebutuhan Diklat	Pengelolaan Data Dikiat dalam rangka Penilaian IP ASN Tahun 2022 Koordinasi dengan unit kerja mengenai Data Dikiat Triwulan I-2023	1. Pengelolaan Data Diklat dalam rangka Penilaian IP ASN Tahun 2022 2. Koordinasi dengan unit kerja mengenai Data Diklat Triwulan 1-2023 3. Sosialisasi IP ASN bagi seluruh pegawai ANRI dalam rangka meningkatnya pemahaman pegawai	Pengelolaan Data Diklat dalam rangka Penilaian IP ASN Tahun 2022 Koordinasi dengan unit kerja mengenai Data Diklat Triwulan III-2023 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat Triwulan I-III Tahun 2023
			Indeks Reformasi Hukum	85	Hukum (koordinasi dengan Pusiibang-	Mengumpulkan bukti dukung penilaian IRH 2023 Berkoordinasi dengan Kepegawaian terkait penilaian variabel Pengembangan Kompetensi Perancang Per-UU Melakukan Mapping, Evaluasi Produk Hukum guna kepentingan Proleg dan Deregulasi Berkoordinasi dalam pengelolaan JDIH	Melakukan unggah tahap akhir bukti dukung penilaian IRH 2023 Melaksanskan rapat pleno penetapan nilai IRH 2023 bersama Asesor dan Tim Kerja Menetapkan BAP	Melakukan evaluasi dan persiapan untuk penilaian IRH Tahun 2024

Jakarta, 24 Oktober 2023 Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum,



Lampiran 7 Renaksi Biro OKH Revisi-2 Tahun 2023

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2023

Kementerian : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Unit Organisasi 01 ARSIP NASIONAL

Satuan Kerja : 450448 ARSIP NASIONAL R I JAKARTA Hal 1 dari 10

Union	Damu Davisi	Lock Pagu		SISA			
Uraian	Pagu Revisi Lock Pag		Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode %	ANGGARAN	
JUMLAH SELURUHNYA	3,283,613,000	0	3,024,589,480	220,217,647	3,244,807,127 ^{98.82} %	38,805,873	
WA Program Dukungan Manajemen	3,283,613,000	0	3,024,589,480	220,217,647	3,244,807,127 98.82 %	38,805,873	
WA.3614 Pelayanan Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum	3,283,613,000	0	3,024,589,480	220,217,647	3,244,807,127 98.82 %	38,805,873	

Lampiran 8 Realisasi Keuangan Biro OKH Tahun 2023